



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2023 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2027;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemsikinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 – 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
5. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.
7. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

Sistematika RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Kondisi Umum Daerah
- BAB III : Profil Kemiskinan Daerah
- BAB IV : Prioritas Program
- BAB V : Lokasi Prioritas
- BAB VI : Penutup

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan RPKD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 81

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2023 – 2027

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023 – 2027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I.....	7
PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Maksud dan Tujuan.....	9
1.2.1 Maksud.....	9
1.2.2 Tujuan.....	9
1.3. Dasar Hukum	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	12
KONDISI UMUM DAERAH.....	12
2.1. Geografis dan Demografi Wilayah.....	12
2.1.1. Geografi.....	12
2.1.2. Demografi.....	16
2.2. Kawasan Strategis.....	18
2.3. Struktur dan Perekonomian.....	27
2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	27
2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	30
BAB III.....	34
PROFIL KEMISKINAN DAERAH	34
3.1. Analisis Karakteristik Masalah Kemiskinan Konsumsi.....	34
3.1.1. Persentase Penduduk Miskin.....	34
3.1.2. Jumlah Penduduk Miskin	35
3.1.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1).....	37
3.1.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	38
3.1.5. Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Konsumsi	40
3.2. Analisis Karakteristik Masalah Ketenagakerjaan	41
3.2.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	41
3.2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	43
3.2.3. Tingkat Kesempatan Kerja	44
3.2.4. Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan.....	46
3.3. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Kesehatan.....	47
3.3.1. Angka Kematian Ibu	47
3.3.2. Angka Kematian Bayi	48
3.3.3. Angka Harapan Hidup	49

3.3.4.	Prevalensi Balita Stunting	51
3.3.5.	Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Kesehatan	52
3.4.	Analisis Karakteristik Masalah Bidang Pendidikan	53
3.4.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA	53
3.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA	54
3.4.3.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).....	55
3.4.4.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah.....	56
3.4.5.	Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Pendidikan	57
3.5.	Analisis Karakteristik Masalah Bidang Infrastruktur Dasar	58
3.5.1.	Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak.....	58
3.5.2.	Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak.....	60
3.5.3.	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik	61
3.5.4.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau	63
3.5.5.	Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar.....	65
3.6.	Analisis Karakteristik Masalah Bidang Kesetaraan Gender.....	65
3.6.1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	66
3.6.2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68
3.6.3.	Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Kesetaraan Gender	69
3.7.	Analisis Karakteristik Masalah Bidang Kesejahteraan Sosial	69
3.7.1.	Jumlah Penduduk Disabilitas	69
3.7.2.	Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar	71
3.7.3.	Jumlah Kepala RT Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	73
3.7.4.	Jumlah Anak Terlantar	74
3.7.5.	Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial.....	77
3.8.	Kemiskinan Ekstrem di DIY	78
3.8.1.	Analisis Karakteristik Masalah Kemiskinan Ekstrem di DIY.....	79
3.8.2.	Peta Persebaran Data P3KE Tahun 2022.....	81
3.8.2.1.	Status Kesejahteraan.....	81
3.8.2.2.	Pendidikan.....	85
3.8.2.3.	Kesehatan.....	88
3.8.2.4.	Ketenagakerjaan	91
3.8.2.5.	Informasi Rumah.....	94
BAB IV	98
PRIORITAS PROGRAM	98
4.1. Analisis Determinan Keterkaitan	98
4.1.1. Theory of Change (ToC)/Logika Program	98

4.1.1.1.	Analisis ToC Bidang Kemiskinan Konsumsi	98
4.1.1.1.1.	Program Prioritas	100
4.1.1.1.2.	Sasaran Jangka Menengah	100
4.1.1.2.	Analisis Toc Bidang Ketenagakerjaan	100
4.1.1.2.1.	Program Prioritas	102
4.1.1.2.2.	Sasaran Jangka Menengah	102
4.1.1.3.	Analisis ToC Bidang Kesehatan	102
4.1.1.3.1.	Program Prioritas	104
4.1.1.3.2.	Sasaran Jangka Menengah	104
4.1.1.4.	Analisis ToC Bidang Pendidikan	104
4.1.1.4.1.	Program Prioritas	106
4.1.1.4.2.	Sasaran Jangka Menengah	106
4.1.1.5.	Analisis ToC Bidang Infrastruktur Dasar	106
4.1.1.5.1.	Program Prioritas	108
4.1.1.5.2.	Sasaran Jangka Menengah	108
4.1.1.6.	Analisis ToC Bidang Kesetaraan Gender	108
4.1.1.6.1.	Program Prioritas	110
4.1.1.6.2.	Sasaran Jangka Menengah	110
4.1.1.7.	Analisis ToC Bidang Kesejahteraan Sosial	110
4.1.1.7.1.	Program Prioritas	112
4.1.1.7.2.	Sasaran Jangka Menengah	112
4.1.2.	Casual Attribution	112
4.1.2.1.	Bidang Kemiskinan Konsumsi	112
4.1.2.2.	Bidang Ketenagakerjaan	113
4.1.2.3.	Bidang Kesehatan	114
4.1.2.4.	Bidang Pendidikan	115
4.1.2.5.	Bidang Infrastruktur Dasar	116
4.1.2.6.	Bidang Kesetaraan Gender	117
4.1.2.7.	Bidang Kesejahteraan Sosial	118
4.2.	Analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan	120
4.2.1.	Kemandirian Fiskal	120
4.2.2.	Keleluasaan Fiskal	124
4.3.	Faktor Pendorong dan Penghambat Penanggulangan Kemiskinan	125
4.4.	Kekuatan	125
4.5.	Kelemahan	126
4.6.	Isu Strategi Penanggulangan Kemiskinan	127

4.7. Asas dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di DIY ((ditambah asas)).	128
BAB V	130
LOKASI PRIORITAS	130
5.1. Penentuan Lokasi Prioritas.....	130
5.1.1. Bidang Kemiskinan Konsumsi.....	130
5.1.2. Bidang Ketenagakerjaan	132
5.1.3. Bidang Kesehatan	134
5.1.4. Bidang Pendidikan.....	138
5.1.5. Bidang Infrastruktur	139
5.1.6. Bidang Kesetaraan Gender	141
5.2. Lokus 15 Kapanewon Penanggulangan Kemiskinan di DIY	147
5.3. Rekomendasi (pesisir, diambil dr permasalahan dan)	149
5.4. Target Penurunan Persentase Kemiskinan	149
BAB VI	151
PENUTUP.....	151
6.1. Matriks Prioritas Bidang Ketenagakerjaan :	152
6.2. Matriks Prioritas Bidang Kesehatan :.....	156
6.3. Matriks Prioritas Bidang Pendidikan.....	160
6.4. Matriks Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar	163
6.5. Matriks Prioritas Bidang Kesetaraan Gender	167

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota mengamanatkan kepada Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Dokumen RPKD adalah dokumen rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun atau menyesuaikan dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berjalan.

Pemerintah Indonesia juga menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai hal yang strategis. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) 2005-2025 dinyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) upaya penanggulangan kemiskinan terdapat kelompok pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Terdapat tiga strategi pembangunan SDM, yaitu layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas dan pembangunan karakter.

Kemiskinan juga merupakan masalah yang bersifat global. Perserikatan Bangsa – Bangsa telah menjadikan masalah kemiskinan sebagai masalah yang harus ditangani bersama, yaitu melalui kesepakatan *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000 yang selanjutnya pada tahun 2015, komitmen bersama tersebut diperbaharui menjadi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan menjadikan tujuan pertamanya adalah mengakhiri/menghapuskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun.

Penyusunan RPKD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027 ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Skenario pembangunan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan ini telah disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah dalam upaya Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan

mengembangkan budaya Yogyakarta. Dokumen ini juga sudah memasukan lokasi prioritas, program prioritas juga program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2023. Dokumen RPKD ini juga selaras dengan RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Untuk penanggulangan kemiskinan di DIY menjadi salah satu bagian visi-misi Gubernur DIY, dan terjabarkan Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Penanggulan Kemiskinan sebagai berikut :

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1) Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan	1.1) Terwujudnya akualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat	IGI (<i>Inclusive Growth Index</i>)		
		Indeks Kebahagiaan		
			1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan
			1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB
				Pendapatan Perkapita (Rp juta)
				TPT
	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	Inflasi		
		IPM		
		Indeks Williamson		
2) Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan sumber dayasetempat	2.1) Mengecilnya Ketimpangan Wilayah		2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY
3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI	3.1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi		
			3.1.1) Meningkatnya Good Governance	Opini BPK
				SAKIP
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)		
4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik	4.1) Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
			4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
				4.1.2) Menurunnya risiko bencana

Sebagai dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah, RPKD ini akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terutama

penanggulangan kemiskinan. Bagi pelaksanaan di tiap tahun nya tertuang pada rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan yang disebut Rencana Aksi Tahunan (RAT).

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Dokumen RPKD DIY Tahun 2023-2027 ini dimaksudkan untuk:

1. Merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 tahun;
2. Menjabarkan dari strategi dan program kebijakan penanggulangan kemiskinan Provinsi DIY;
3. Memandu penajaman intervensi program bagi OPD DIY dan Kabupaten/Kota dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

1.2.2 Tujuan

Penyusunan Dokumen RPKD DIY Tahun 2023-2027 ini disusun dengan tujuan:

1. Menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan;
2. Acuan bagi seluruh Instansi/Badan/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Dewan di Daerah DIY/ dunia usaha serta berbagai komponen masyarakat untuk pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
3. Menentukan prioritas intervensi kebijakan daerah dan merancang sinergi antara inisiatif kebijakan (program) provinsi dan daerah;
4. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah DIY dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) ini meliputi :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- b. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

- c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-05889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 No 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 3);
- k. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- l. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 323/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan
 - 1.3. Dasar Hukum
 - 1.4. Sistematika
- BAB II KONDISI UMUM DAERAH
 - 2.1. Geografi dan Demografi Wilayah
 - 2.2. Kawasan Strategis
 - 2.3. Struktur Perekonomian
- BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH
 - 3.1. Konsep Kemiskinan
 - 3.2. Analisis Karakteristik Kemiskinan
- BAB IV PRIORITAS PROGRAM
 - 4.1. Pengembangan Logika Program (*Theory of Change*)
 - 4.2. Analisis Keterkaitan (*Causal Relationship*)
 - 4.3. Analisis Kondisi Fiskal
 - 4.4. Analisis Anggaran Pendapatan
 - 4.5. Analisis Anggaran Belanja
 - 4.6. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi
- BAB V LOKASI PRIORITAS
 - 5.1. Isu Strategis
 - 5.2. Analisis Kuadran Wilayah
- BAB VI 6.1. Matriks Prioritas Program

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Geografis dan Demografi Wilayah

2.1.1. Geografi

Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km² atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.860.359,67 km²) dan merupakan provinsi dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Wilayah administrasi DIY memiliki batas-batas:

- a. Sebelah utara dengan Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sebelah timur dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebelah selatan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Secara administratif, DIY terdiri atas empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kalurahan, dengan perincian:

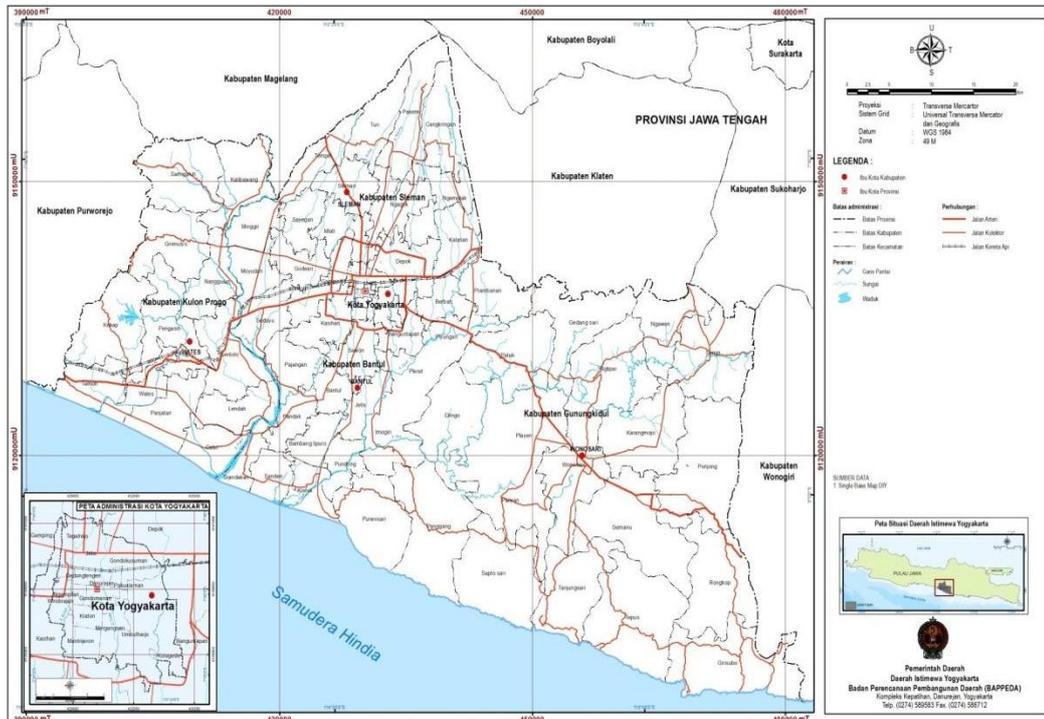
Tabel 2. 1. Pembagian Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kapanewon/ Kemantren	Kelurahan/ Kalurahan
Kulonprogo	Wates	12	88
Bantul	Bantul	17	75
Gunungkidul	Wonosari	18	144
Sleman	Sleman	17	86
Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45
DIY	Yogyakarta	78	438

Dari luas dan batas wilayah administrasi ini, terdapat delapan kelurahan di wilayah DIY sampai saat ini mengalami kesenjangan ekonomi dengan daerah perbatasan Jawa Tengah. Delapan kalurahan perbatasan yang masuk dalam lokus kapanewon penanggulangan kemiskinan dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi ini tujuh diantaranya masuk Gunungkidul. Sedangkan satu kalurahan masuk Kabupaten Sleman, diantaranya adalah Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semin, Kalurahan Sambirejo, Tancep, Kapanewon Ngawen, Kalurahan Sampang, Tegalrejo, dan Serut, Watugajah Kapanewon Gedangsari serta Kalurahan Gayamharjo Prambanan.

Pada semua kelurahan tersebut sangat terlihat disparitas dari kondisi fisik dan ekonomi dengan desa sebelah yang notabene masuk Jawa Tengah dan juga kesenjangan infrastruktur terutama akses jalan. Di sebagian besar jalan kalurahan

menuju ibu kota kecamatan atau kapanewon juga harus memutar ke wilayah Jawa Tengah. Sebagai contoh antara Kelurahan Sampang dan Serut di Kapanewon Gedangsari yang notabene berbatasan dan dekat, tidak ada jalan antar desa. Hal ini perlu diupayakan langkah cepat untuk mengurangi disparitas ekonomi dengan berbagai program pemerintah.



Gambar 2. 1. Peta Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

2.1.1.1. Topografi

Topografi secara kualitatif adalah bentang lahan (*landform*) dan secara kuantitatif dinyatakan dalam satuan kelas lereng (% atau derajat), arah lereng, panjang lereng dan bentuk lereng. Keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi tebal atau tipisnya lapisan tanah dan sistem pengaliran. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit memiliki lapisan tanah yang lebih tipis karena tingkat erosi lebih tinggi, sedangkan daerah dengan topografi datar memiliki lapisan tanah yang tebal karena tingkat sedimentasi lebih tinggi. Kecepatan pengaliran air pada topografi datar lebih kecil daripada topografi yang lebih miring. Topografi DIY dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Kemiringan lahan

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional DIY, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat kategori kemiringan, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km², lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km², lahan dengan

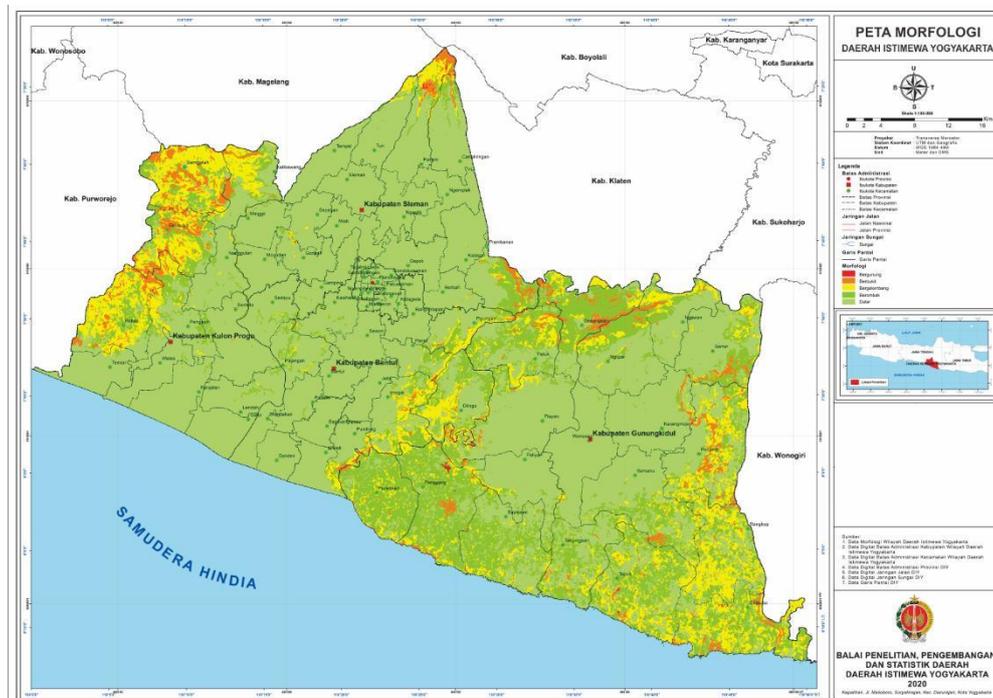
kemiringan 16-40% seluas 806,17 km², dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km².

b. Ketinggian lahan

Wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori ketinggian lahan, yaitu wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl sebesar 28,84%, wilayah dengan ketinggian 100—499 mdpl sebesar 65,65%, wilayah dengan ketinggian 500—999 mdpl sebesar 5,04%, dan wilayah dengan ketinggian di atas 1000 mdpl sebesar 0,47%.

c. Unit Fisiografis

Wilayah DIY terdiri dari ekosistem gunung api, karst, dataran aluvial, dan samudra Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumber daya alam. Dengan penampang topografis yang dimiliki.



Gambar 2. 3. Peta Morfologi DIY

Selain potensi sumber daya alam yang menyebabkan pertanian subur, kondisi topografi DIY yang beragam ini juga menyebabkan erosi yang tinggi yang berakibat longsor. Bencana seperti longsor secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perubahan sosial ekonomi terjadi di kalangan masyarakat yang bermukim sekitar daerah terdampak longsor. Terutama untuk masyarakat yang kegiatan ekonominya bergantung pada alam seperti sektor pertanian, peternakan, kelautan sangat terdampak dalam mencari sumber penghasilan. Untuk beberapa daerah yang memiliki kemiringan lereng yang cukup terjal dan rawan bencana banjir maupun longsor, menyebabkan masyarakat

nya lebih banyak membangun bangunan non permanen dan memenuhi syarat sebagai rumah layak huni. Begitu juga untuk masyarakat yang sangat miskin dan miskin, kondisi pasca bencana akan membuat perekonomian masyarakat menjadi lebih rendah.

2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Pada rancangan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana DIY 2018-2022 dijelaskan tentang potensi ancaman bencana yang menyajikan rincian indeks bahaya dengan luas daerah terpapar (hektar) untuk bencana yang berpotensi di wilayah DIY sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Tingkat Ancaman Bencana di Wilayah DIY

No	Jenis Ancaman Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
1	Banjir	158.551	Tinggi
2	Banjir Bandang	3.059	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	287.466	Sedang
4	Epidemi Dan Wabah Penyakit	20.317	Rendah
5	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	2.476	Sedang
6	Gempa bumi	313.315	Tinggi
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	12.757	Tinggi
8	Kegagalan Teknologi	1.901	Tinggi
9	Kekeringan	313.315	Tinggi
10	Letusan Gunungapi Merapi	7.755	Tinggi
11	Tanah Longsor	44.458	Tinggi
12	Tsunami	7.522	Tinggi

Sumber: Kajian Rencana Pengurangan Risiko Bencana DIY 2018-2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kelas resiko bahaya di DIY berada pada rentang kelas rendah, sedang, hingga tinggi. Adapun bencana dengan kelas bahaya rendah yaitu epidemi dan wabah penyakit, bencana yang memiliki kelas bahaya sedang yaitu cuaca ekstrim dan gelombang ekstrim dan abrasi. Sedangkan bencana yang memiliki kelas bahaya tinggi yaitu banjir bandang, gempabumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kegagalan teknologi, letusan gunungapi, kebakaran hutan dan lahan dan tsunami. Penentuan indeks tersebut diperoleh berdasarkan luas terpapar bahaya yang paling besar, selain itu juga mengacu pada peta bahaya untuk tiap potensi bencana yang mengancam di wilayah DIY. Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial di DIY antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme.

Sementara itu, potensi bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Namun demikian frekuensi dan kerawanan bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial dan nonalam, selama ini masih relatif kecil.

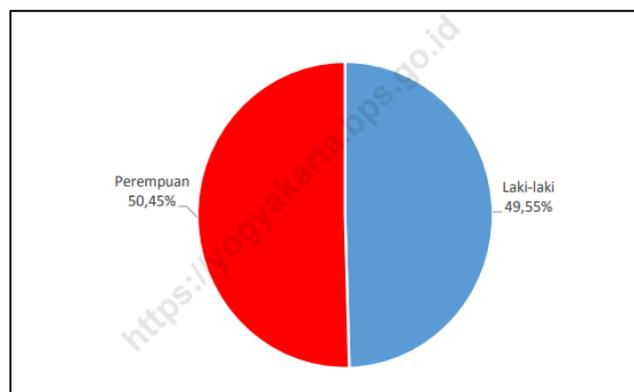
Risiko bencana harus tetap menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah. Wilayah rawan bencana telah diidentifikasi. Kawasan rawan bencana gunung berapi berada di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman. Kawasan yang terdampak mencakup hampir seluruh wilayah DIY terutama Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul. Gerakan tanah/batuan dan erosi berpotensi terjadi pada kawasan lereng pegunungan di Kulon Progo yang mengancam wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat serta pada lereng pegunungan selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Gunungkidul bagian utara dan Kabupaten Bantul bagian timur. Resiko bencana ini juga akan berdampak langsung terhadap usaha penanggulangan kemiskinan.

Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Banjir terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Sleman dan Kulon Progo. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan khususnya pada wilayah dengan bentang alam karst. Kawasan rawan bencana angin topan berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan daerah-daerah di Kabupaten Sleman bagian utara serta wilayah perkotaan Yogyakarta. Adanya resiko-resiko alam seperti ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memikirkan solusi terbaik, terutama kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan.

2.1.2. Demografi

Pada Sensus Penduduk 2020 (SP2020) jumlah penduduk D.I. Yogyakarta sebanyak 3.668.719 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.817.927 jiwa dan perempuan sebanyak 1.850.792 jiwa. Secara persentase proporsi penduduk laki-laki sebanyak 49,55 persen dan perempuan sebanyak 50,45 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa antara penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Posisi di level nasional jumlah penduduk D.I. Yogyakarta relatif kecil. Jumlah penduduk Indonesia hasil SP2020 sebanyak 270.203.917 jiwa. Jadi penduduk D.I. Yogyakarta hanya 1,36 persen dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2020. Sementara kalau dilihat di Pulau Jawa, proporsi penduduk D.I. Yogyakarta sebesar 2,42 persen dari penduduk Pulau

Jawa. Sebaran penduduk menurut kabupaten/kota memperlihatkan bahwa Kabupaten Sleman mempunyai penduduk terbesar di antara lima kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.125.804 jiwa. Sementara Kabupaten Bantul menempati urutan kedua dengan jumlah penduduk sebanyak 985.770 jiwa, dan urutan ketiga Gunungkidul sebanyak 747.161 jiwa. Proporsi terhadap jumlah penduduk D.I. Yogyakarta, Kabupaten Sleman sebesar 30,69 persen, Bantul sebesar 26,87 persen, Gunungkidul sebesar 20,37 persen. Hal ini berarti pula bahwa sebanyak 77,92 persen penduduk D.I. Yogyakarta berada di ketiga kabupaten tersebut. Sementara itu, proporsi penduduk Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta masing-masing sebesar 11,90 persen dan 10,18 persen.



Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Kabupaten Kulon Progo	216.167	220.228	436.395
Kabupaten Bantul	491.033	494.737	985.77
Kabupaten Gunungkidul	369.323	377.838	747.161
Kabupaten Sleman	559.385	566.419	1.125.804
Kota Yogyakarta	182.019	191.57	373.589
D.I. Yogyakarta	1.817.927	1.850.792	3.668.719

Sumber: Sensus Penduduk 2020

Jumlah penduduk dapat menjadi nilai tambah sekaligus beban bagi pemerintah apabila tidak ditangani dengan baik. Penduduk yang berkualitas dapat memperkuat produksi dan menjadi potensi ekonomi. Sebaliknya, penambahan penduduk yang tidak terkendali akan menjadi bom waktu yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hingga bermuara pada terhambatnya pembangunan. Masalah kesenjangan sosial, penyediaan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan bahkan hingga ke perumahan adalah sebagian masalah yang ditimbulkan dari keadaan tersebut.

Berdasarkan proporsi penduduk menurut usia, mayoritas penduduk DIY berusia produktif. Kelompok tersebut terdiri dari kelompok usia 25-29 tahun sekitar 16,76% dari seluruh penduduk dan usia 20-34 tahun sekitar 15,55%. Selain usia produktif, dengan tingginya Usia Harapan Hidup di DIY juga memberikan bonus demografi berupa 15,28% penduduk usia diatas 60 tahun yang tentunya ini akan menimbulkan masalah baru yaitu bertambahnya jumlah lanjut usia terlantar. Kondisi sumber daya manusia tersebut mengindikasikan potensi sumber daya manusia yang produktif yang besar dan merupakan modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan di DIY.

2.2. Kawasan Strategis

Dalam rangka untuk dapat memperoleh gambaran ketimpangan dan kemiskinan di DIY khususnya untuk mendapatkan gambaran prioritas pembangunan, telah ditentukan 15 Kapanewon Prioritas Penanggulangan Kemiskinan. Penentuan 15 Lokus Kapanewon Tahun 2022-2023 ini dilakukan dengan Monitoring dan Evaluasi berkaitan dengan capaian penanggulangan kemiskinan di 15 kapanewon prioritas yang telah ditentukan di Tahun 2017. Penanggulangan Kemiskinan untuk bahan pengambilan kebijakan selanjutnya. Aktifitas monitoring dan evaluasi terhadap hasil pencapaian dan strategi Penanggulangan Kemiskinan pada 15 kapanewon Prioritas disertai perhitungan terhadap seluruh kapanewon lain di DIY untuk ke depan diambil langkah kebijakan dan strategi.

Penentuan lokus Kapanewon prioritas kemiskinan ini menggunakan 8 (delapan) ini merupakan identifikasi dari kemiskinan multidimensi, yaitu : (1). Desil 1 dan 2 Rumah Tangga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2020, (2). Indeks Pembangunan Manusia 2018, (3). Indeks Desa Membangun 2020, (4). Desa Rawan Pangan 2020, (5). Rumah Tangga Tidak Layak Huni dari sisi Lantai, Dinding dan Atap, dari DTKS 2020 (6). Rumah Tanpa Sanitasi Layak, dari DTKS 2020 (7). Rumah Tangga Sumber Air Layak dari DTKS 2020, dan (8). Rumah Tangga Tanpa Sambungan Listrik dari DTKS 2020.

Indikator dan metode yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi 15 kecamatan (kapanewon) prioritas Penanggulangan Kemiskinan telah konsisten menggunakan indikator dan metode yang sama dengan simulasi penentuan 15 kecamatan (kapanewon) prioritas terdahulu. Namun ada 1 indikator yang berubah yaitu IPD (Indeks Pembangunan Desa) dirubah menjadi IDM (Indeks Desa Membangun) dikarenakan data IPD tersedia terakhir update tahun 2014.

Untuk memberikan gambaran prioritas sasaran, berdasarkan data-data yang telah ada, maka dihitung agregat dari seluruh nilai melalui klasifikasi dan pembobotan. Klasifikasi menggunakan formula yang sangat umum digunakan selama ini, yaitu formula *Sturgess*:

$$K = 1 + 3,3 \text{ Log } N$$

K = jumlah kelas
N = banyaknya data

Dalam perhitungan kita yang berdasarkan prioritas sasaran pada level Kapanewon maka dengan jumlah Kapanewon di DIY sebesar 78 diperoleh klasifikasi sebanyak 7 kelas. Masing-masing kondisi elemen di Kapanewon dengan nilai 7 untuk yang paling prioritas sampai pada nilai 1 sebagai nilai yang paling tidak prioritas penanganannya dan begitu juga sebaliknya. Untuk prioritasasi perlu pembobotan pada elemen-elemen sesuai dengan proporsionalitas. Dalam hal ini bobot dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot
1.	Status Kesejahteraan 1 dan 2	10
2.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)	10
3.	Rata-Rata Indeks Desa Membangun (IDM)	10
4.	Desa Rawan Pangan	7
5.	RTLH - Atap	1
6.	RTLH – Lantai	3
7.	RTLH - Dinding	4
8.	Sanitasi	4
9.	Sumber Air	8
10.	Akses Listrik	5

Berikut ini hasil pembobotan di seluruh Kapanewon di masing-masing Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 didapatkan hasil sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN / KAPANEWON	Desil 1+2		IPM		IDM		DESA RAWAN PANGAN	RTLH						SKOR TOTAL PEMBOBOTAN (TANPA KOTA)	RANK (TANPA KOTA)	SKOR TOTAL PEMBOBOTAN (TANPA IDM, KOTA MASUK)	RANK (TANPA IDM, KOTA MASUK)							
									Atap	Lantai	Dinding	Sanitasi	Sumber Air	Akses Listrik											
	BOBOT	10		10		10		7	1	3	4	4	4	8	5										
A.	KULON PROGO																								
1	TEMON	3	30	4	40	7	70	1	49	1	1	1	3	1	4	1	4	1	8	1	5	214	46	144	59
2	WATES	4	40	4	40	7	70	1	49	1	1	1	3	2	8	1	4	1	8	1	5	228	38	158	51
3	PANJATAN	4	40	5	50	7	70	1	49	1	1	2	6	2	8	1	4	2	16	1	5	249	31	179	36
4	GALUR	3	30	5	50	7	70	1	49	1	1	1	3	1	4	1	4	1	8	1	5	224	41	154	52
5	LEDAH	5	50	5	50	7	70	1	49	1	1	2	6	3	12	1	4	2	16	1	5	263	27	193	26
6	SENTOLO	7	70	6	60	7	70	1	49	1	1	4	12	6	24	1	4	5	40	1	5	335	1	265	1
7	PENGASIH	7	70	5	50	7	70	1	49	1	1	4	12	4	16	1	4	3	24	1	5	301	8	231	8
8	KOKAP	7	70	6	60	7	70	4	49	1	1	5	15	7	28	1	4	3	24	1	5	326	3	256	2
9	GIRIMULYO	4	40	6	60	7	70	1	49	1	1	3	9	2	8	1	4	3	24	1	5	270	25	200	21
10	NANGGULAN	5	50	6	60	7	70	1	49	1	1	2	6	3	12	1	4	2	16	1	5	273	22	203	19
11	KALIBAWANG	5	50	6	60	6	60	1	42	1	1	3	9	2	8	1	4	2	16	1	5	255	30	195	24
12	SAMIGALUH	6	60	6	60	6	60	7	42	1	1	4	12	4	16	1	4	3	24	1	5	284	14	224	12
B.	BANTUL																								
13	SRANDAKAN	3	30	4	40	3	30	1	21	3	3	2	6	3	12	2	8	1	8	3	15	173	57	143	61
14	SANDEN	3	30	3	30	4	40	1	28	2	2	2	6	2	8	2	8	1	8	2	10	170	59	130	63
15	KRETEK	3	30	4	40	4	40	1	28	3	3	2	6	3	12	2	8	1	8	3	15	190	42	150	54
16	PUNDONG	4	40	4	40	5	50	1	35	3	3	3	9	3	12	3	12	1	8	4	20	229	36	179	36
17	BAMBANGLIPURO	4	40	3	30	3	30	1	21	2	2	2	6	2	8	2	8	1	8	2	10	163	60	133	62
18	PANDAK	6	60	4	40	4	40	1	28	2	2	3	9	2	8	3	12	1	8	2	10	217	43	177	39
19	BANTUL	4	40	3	30	4	40	1	28	2	2	2	6	2	8	2	8	1	8	3	15	185	55	145	57
20	JETIS	5	50	3	30	3	30	1	21	2	2	3	9	3	12	4	16	1	8	3	15	193	52	163	47
21	IMOGIRI	6	60	4	40	4	40	1	28	5	5	7	21	7	28	5	20	2	16	5	25	283	15	243	4

22	DLINGO	4	40	5	50	4	40	1	28	2	2	3	9	3	12	2	8	2	16	2	10	215	45	175	41	
23	PLERET	4	40	4	40	4	40	1	28	4	4	4	12	5	20	4	16	1	8	4	20	228	38	188	30	
24	PIYUNGAN	4	40	3	30	3	30	1	21	2	2	3	9	3	12	3	12	2	16	2	10	182	56	152	53	
25	BANGUNTAPAN	4	40	3	30	3	30	1	21	4	4	3	9	4	16	4	16	1	8	4	20	194	49	164	46	
26	SEWON	6	60	2	20	4	40	1	28	7	7	6	18	7	28	7	28	1	8	7	35	272	23	232	6	
27	KASIHAN	6	60	2	20	4	40	1	28	4	4	4	12	4	16	3	12	2	16	4	20	228	38	188	30	
28	PAJANGAN	5	50	4	40	5	50	1	35	2	2	4	12	3	12	2	8	3	24	3	15	248	32	198	22	
29	SEDAYU	4	40	3	30	4	40	1	28	4	4	4	12	4	16	4	16	1	8	5	25	219	42	179	36	
C.	KOTA																									
30	MANTRIJERON	2	20	2	20					1	1	1	3	1	4	1	4	1	8	1	5			107	68	
31	KRATON	1	10	2	20					1	1	1	3	1	4	1	4	1	8	1	5			104	70	
32	MERGANGSAN	2	20	2	20					2	2	1	3	2	8	1	4	1	8	1	5			112	67	
33	UMBULHARJO	3	30	2	20					2	2	2	6	2	8	2	8	1	8	2	10			113	66	
34	KOTAGEDE	2	20	2	20					2	2	1	3	2	8	1	4	1	8	2	10			89	75	
35	GONDOKUSUMAN	2	20	1	10					3	3	2	6	2	8	2	8	1	8	2	10			94	74	
36	DANUREJAN	2	20	3	30					1	1	1	3	1	4	1	4	1	8	1	5			82	76	
37	PAKUALAMAN	1	10	1	10					1	1	1	3	1	4	1	4	1	8	1	5			80	77	
38	GONDOMANAN	1	10	3	30					1	1	1	3	1	4	1	4	1	8	1	5			107	68	
39	NGAMPILAN	1	10	2	20					1	1	1	3	2	8	1	4	1	8	1	5			66	78	
40	WIROBRAJAN	2	20	2	20					2	2	1	3	2	8	1	4	1	8	1	5			98	72	
41	GEDONG TENGEN	2	20	3	30					1	1	1	3	1	4	1	4	1	8	1	5			96	73	
42	JETIS	2	20	3	30					1	1	1	3	1	4	1	4	1	8	1	5			103	71	
43	TEGALREJO	2	20	2	20					2	2	1	3	2	8	2	8	1	8	2	10			121	65	
D.	SLEMAN																									
44	MOYUDAN	2	20	3	30	6	60	1	42	5	5	4	12	4	16	5	20	2	16	5	25	246	34	193	26	
45	MINGGIR	2	20	3	30	7	70	1	49	5	5	2	6	4	16	5	20	2	16	5	25	257	28	166	44	
46	SEYEGAN	3	30	4	40	6	60	1	42	7	7	6	18	6	24	7	28	2	16	7	35	300	10	226	11	

47	GODEAN	2	20	3	30	3	30	1	21	7	7	5	15	6	24	6	24	1	8	7	35	214	46	205	17	
48	GAMPING	1	10	3	30	2	20	1	14	6	6	5	15	5	20	5	20	1	8	6	30	173	57	188	30	
49	MLATI	2	20	2	20	3	30	1	21	7	7	5	15	6	24	6	24	2	16	7	35	212	47	203	19	
50	DEPOK	1	10	1	10	1	10	1	7	5	5	3	9	5	20	4	16	1	8	5	25	120	63	145	57	
51	BERBAH	1	10	3	30	5	50	1	35	4	4	3	9	4	16	3	12	1	8	4	20	194	49	144	59	
52	PRAMBANAN	2	20	4	40	6	60	1	42	7	7	6	18	6	24	6	24	2	16	7	35	286	13	212	15	
53	KALASAN	1	10	2	20	1	10	1	7	5	5	4	12	5	20	4	16	1	8	5	25	133	62	165	45	
54	NGEMPLAK	2	20	2	20	4	40	1	28	5	5	4	12	5	20	4	16	1	8	5	25	194	49	168	43	
55	NGAGLIK	2	20	2	20	3	30	1	21	7	7	5	15	6	24	6	24	2	16	7	35	212	47	189	28	
56	SLEMAN	2	20	3	30	4	40	1	28	7	7	5	15	6	24	6	24	3	24	7	35	247	33	228	10	
57	TEMPEL	3	30	4	40	6	60	1	42	7	7	5	15	6	24	6	24	3	24	7	35	301	8	241	5	
58	TURI	3	30	3	30	7	70	1	49	5	5	4	12	4	16	4	16	3	24	5	25	277	20	186	33	
59	PAKEM	1	10	3	30	4	40	1	28	3	3	2	6	2	8	3	12	1	8	3	15	160	61	127	64	
60	CANGKRINGAN	2	20	4	40	4	40	1	28	3	3	3	9	3	12	3	12	1	8	3	15	187	54	147	56	
E	GUNUNGKIDUL																									
61	PANGGANG	4	40	7	70	6	60	1	42	1	1	2	6	1	4	1	4	3	24	1	5	256	29	189	28	
62	PURWOSARI	4	40	7	70	7	70	1	49	1	1	2	6	1	4	1	4	2	16	1	5	265	26	195	24	
63	PALIYAN	4	40	7	70	6	60	1	42	1	1	5	15	7	28	1	4	2	16	1	5	281	17	221	13	
64	SAPTO SARI	7	70	7	70	6	60	1	42	1	1	5	15	3	12	1	4	6	48	1	5	327	2	253	3	
65	TEPUS	5	50	7	70	5	50	1	35	1	1	4	12	3	12	1	4	7	56	1	5	295	11	210	16	
66	TANJUNGSARI	4	40	7	70	4	40	1	28	1	1	2	6	1	4	1	4	4	32	1	5	230	35	162	48	
67	RONGKOP	4	40	7	70	7	70	1	49	1	1	2	6	1	4	1	4	4	32	1	5	281	17	162	48	
68	GIRISUBO	4	40	7	70	6	60	1	42	1	1	1	3	1	4	1	4	6	48	1	5	277	20	175	41	
69	SEMANU	7	70	7	70	4	40	1	28	1	1	7	21	7	28	1	4	2	16	1	5	283	15	215	14	
70	PONJONG	7	70	6	60	7	70	1	49	1	1	4	12	4	16	1	4	2	16	1	5	303	7	184	35	
71	KARANGMOJO	6	60	6	60	6	60	1	42	1	1	5	15	6	24	1	4	2	16	1	5	287	12	185	34	
72	WONOSARI	6	60	4	40	4	40	1	28	1	1	5	15	5	20	1	4	2	16	1	5	229	36	161	50	

73	PLAYEN	7	70	5	50	5	50	1	35	1	1	6	18	7	28	1	4	7	56	1	5	317	4	232	6
74	PATUK	4	40	6	60	4	40	1	28	1	1	2	6	2	8	1	4	3	24	1	5	216	44	148	55
75	GEDANG SARI	7	70	7	70	5	50	4	35	1	1	7	21	7	28	1	4	4	32	1	5	316	5	231	8
76	NGLIPAR	6	60	7	70	7	70	1	49	1	1	4	12	5	20	1	4	3	24	1	5	315	6	196	23
77	NGAWEN	5	50	6	60	6	60	1	42	1	1	4	12	7	28	1	4	2	16	1	5	278	19	176	40
78	SEMIN	7	70	6	60	4	40	1	28	1	1	4	12	7	28	1	4	3	24	1	5	272	23	204	18

Berikut ini adalah diskripsi tabel peringkat lokus Kapanewon prioritas kemiskinan
DI. Yogyakarta tahun 2021:

No	Kapanewon	Deskripsi Data
1	SENTOLO	Sentolo menduduki peringkat pertama. Hal ini karena jumlah penduduk miskin yang diambil dari DTKS desil 1 dan 2 sebanyak 9746, Indeks Pembangunan Manusia sebanyak 71.60, Indeks Desa Membangun sebanyak 0.707, Desa Rawan Pangan tergolong bagus karena di Kapanewon ini tidak terdapat Desa/Kalurahan Rawan Pangan, sedangkan indikator yang mempengaruhi terakhir adalah Rumah Tidak Layak Huni atap terdapat 21, lantai sebanyak 1833, dinding sebanyak 2028, sanitasi 312, sumber air sebanyak 2876, akses listrik sebanyak 225.
2	SAPTO SARI	Sapto Sari menduduki peringkat ke-dua. Hal ini karena jumlah penduduk miskin yang diambil dari DTKS desil 1 dan 2 sebanyak 10.069, Indeks Pembangunan Manusia yakni 71.60, Indeks Desa Membangun yakni 0.736, Desa Rawan Pangan di Kapanewon ini tidak terdapat Desa/Kalurahan Rawan Pangan, sedangkan indikator yang mempengaruhi terakhir adalah Rumah Tidak Layak Huni atap terdapat 64, lantai sebanyak 2237, dinding sebanyak 1151, sanitasi 45, sumber air sebanyak 3912, akses listrik sebanyak 75.
3	KOKAP	Kokap menduduki peringkat ke-tiga. Hal ini karena jumlah penduduk miskin yang diambil dari DTKS desil 1 dan 2 sebanyak 9439, Indeks Pembangunan Manusia yakni 69.18, Indeks Desa Membangun yakni 0.710, Desa Rawan Pangan tergolong kurang bagus karena di Kapanewon ini terdapat 1 Desa/Kalurahan Rawan Pangan, sedangkan indikator yang mempengaruhi terakhir adalah Rumah Tidak Layak Huni atap terdapat 11, lantai sebanyak 2469, dinding sebanyak 2388, sanitasi 360, sumber air sebanyak 1649, akses listrik sebanyak 53.
4	PLAYEN	Playen menduduki peringkat ke-empat. Hal ini karena jumlah penduduk miskin yang diambil dari DTKS desil 1 dan 2 sebanyak 9688, Indeks Pembangunan Manusia yakni 72.42, Indeks Desa Membangun yakni 0.756, Desa Rawan Pangan tergolong bagus karena di Kapanewon ini tidak terdapat Desa/Kalurahan Rawan Pangan, sedangkan indikator yang mempengaruhi lainnya adalah Rumah Tidak Layak Huni atap terdapat 55, lantai sebanyak 2925, dinding sebanyak 2462, sanitasi 299,

No	Kapanewon	Deskripsi Data
		sumber air sebanyak 4811, akses listrik sebanyak 83.
5	GEDANG SARI	Gedang Sari menduduki peringkat ke-lima. Hal ini karena jumlah penduduk miskin yang diambil dari DTKS desil 1 dan 2 sebanyak 10.770, Indeks Pembangunan Manusia yakni 65.16, Indeks Desa Membangun berada di angka 0.766, Desa Rawan Pangan tergolong kurang bagus karena di Kapanewon ini terdapat 1 Desa/Kalurahan Rawan Pangan, sedangkan indikator yang mempengaruhi terakhir adalah Rumah Tidak Layak Huni atap terdapat 53, lantai sebanyak 3504, dinding sebanyak 2634, sanitasi 270, sumber air sebanyak 2724, akses listrik 67.
6	NGLIPAR	Nglipar menduduki peringkat ke-enam. Hal ini karena jumlah penduduk miskin yang diambil dari DTKS desil 1 dan 2 sebanyak 8556, Indeks Pembangunan Manusia berada di titik 67.23, Indeks Desa Membangun angkanya 0.699, Desa Rawan Pangan tergolong bagus karena di Kapanewon ini tidak terdapat Desa/Kalurahan Rawan Pangan, sedangkan indikator yang mempengaruhi terakhir adalah Rumah Tidak Layak Huni atap terdapat 54, lantai sebanyak 1967, dinding sebanyak 1731, sanitasi 87, sumber air sebanyak 1474, akses listrik sebanyak 61.
7	PONJONG	Ponjong menduduki peringkat ke-tujuh. Hal ini karena jumlah penduduk miskin yang diambil dari DTKS desil 1 dan 2 sebanyak 10.609, Indeks Pembangunan Manusia sebanyak 68.68, Indeks Desa Membangun berada di titik 0.688, Desa Rawan Pangan tergolong bagus karena di Kapanewon ini tidak terdapat Desa/Kalurahan Rawan Pangan, sedangkan indikator yang mempengaruhi terakhir adalah Rumah Tidak Layak Huni atap terdapat 30, lantai sebanyak 1796, dinding sebanyak 1487, sanitasi 69, sumber air sebanyak 1370, akses listrik sebanyak 50.
8	PENGASIH	Pengasih menduduki peringkat ke-delapan. Hal ini karena jumlah penduduk miskin yang diambil dari DTKS desil 1 dan 2 sebanyak 10.845, Indeks Pembangunan Manusia cukup baik yakni 75.24, Indeks Desa Membangun yakni 0.769, Desa Rawan Pangan tergolong bagus karena di Kapanewon ini tidak terdapat Desa/Kalurahan Rawan Pangan, sedangkan indikator yang mempengaruhi terakhir adalah Rumah Tidak Layak Huni atap terdapat 25, lantai sebanyak 1650, dinding sebanyak

No	Kapanewon	Deskripsi Data
		1452, sanitasi 293, sumber air sebanyak 1409, akses listrik sebanyak 61.
9	TEMPEL	Tempel menduduki peringkat ke-sembilan. Jumlah penduduk miskin yang diambil dari DTKS desil 1 dan 2 sejumlah 3.539, Indeks Pembangunan Manusia cukup baik yakni 78.34, Indeks Desa Membangun yakni 0.738, Desa Rawan Pangan tergolong bagus karena di Kapanewon ini tidak terdapat Desa/Kalurahan Rawan Pangan, sedangkan indikator yang mempengaruhi terakhir adalah Rumah Tidak Layak Huni atap terdapat 1861, lantai sebanyak 2428, dinding sebanyak 2099, sanitasi 2666, sumber air sebanyak 1537, akses listrik sebanyak 1900.
10	SEYEGAN	Seyegan menduduki peringkat ke-sepuluh. Jumlah penduduk miskin yang diambil dari DTKS desil 1 dan 2 sejumlah 3.826, Indeks Pembangunan Manusia cukup baik yakni 79.25, Indeks Desa Membangun yakni 0.721, Desa Rawan Pangan tergolong bagus karena di Kapanewon ini tidak terdapat Desa/Kalurahan Rawan Pangan, sedangkan indikator yang mempengaruhi terakhir adalah Rumah Tidak Layak Huni atap terdapat 1861, lantai sebanyak 2460, dinding sebanyak 2010, sanitasi 3149, sumber air sebanyak 1098, akses listrik sebanyak 1917.
11	TEPUS	Tepus menduduki peringkat ke-sebelas. Jumlah penduduk miskin yang diambil dari DTKS desil 1 dan 2 sejumlah 6.907, Indeks Pembangunan Manusia cukup yakni 65.55, Indeks Desa Membangun yakni 0.790, Desa Rawan Pangan tergolong bagus karena di Kapanewon ini tidak terdapat Desa/Kalurahan Rawan Pangan, sedangkan indikator yang mempengaruhi terakhir adalah Rumah Tidak Layak Huni atap yakni terdapat 22, lantai sebanyak 1657, dinding sebanyak 992, sanitasi 243, sumber air sebanyak 4766, akses listrik sebanyak 47.
12	KARANGMOJO	Karangmojo menduduki peringkat ke-dua belas. Jumlah penduduk miskin yang diambil dari DTKS desil 1 dan 2 sejumlah 9.135, Indeks Pembangunan Manusia cukup yakni 70.02, Indeks Desa Membangun yakni 0.729, Desa Rawan Pangan tergolong bagus karena di Kapanewon ini tidak terdapat Desa/Kalurahan Rawan Pangan,

No	Kapanewon	Deskripsi Data
		sedangkan indikator yang mempengaruhi terakhir adalah Rumah Tidak Layak Huni atap yakni terdapat 58, lantai sebanyak 2049, dinding sebanyak 1909, sanitasi 87, sumber air sebanyak 1374, akses listrik sebanyak 63.
13	PRAMBANAN	Prambanan menduduki peringkat ke-tiga belas. Jumlah penduduk miskin yang diambil dari DTKS desil 1 dan 2 sejumlah 3.059, Indeks Pembangunan Manusia cukup baik yakni 77.01, Indeks Desa Membangun yakni 0.732, Desa Rawan Pangan tergolong bagus karena di Kapanewon ini tidak terdapat Desa/Kalurahan Rawan Pangan, sedangkan indikator yang mempengaruhi terakhir adalah Rumah Tidak Layak Huni atap terdapat 1917, lantai sebanyak 2615, dinding sebanyak 2116, sanitasi 2515, sumber air sebanyak 995, akses listrik sebanyak 1961.
14	SAMIGALUH	Samigaluh menduduki peringkat ke-empat belas. Hal ini karena jumlah penduduk miskin yang diambil dari DTKS desil 1 dan 2 sebanyak 7918, Indeks Pembangunan Manusia yakni 69.70, Indeks Desa Membangun yakni 0.745, Desa Rawan Pangan tergolong kurang bagus karena di Kapanewon ini terdapat 2 Desa/Kalurahan Rawan Pangan, sedangkan indikator yang mempengaruhi terakhir adalah Rumah Tidak Layak Huni atap terdapat 31, lantai sebanyak 1760, dinding sebanyak 1246, sanitasi 149, sumber air sebanyak 1839, akses listrik sebanyak 69.
15	IMOGIRI	Imogiri menduduki peringkat ke-lima belas. Hal ini karena jumlah penduduk miskin yang diambil dari DTKS desil 1 dan 2 sebanyak 9.053, Indeks Pembangunan Manusia yakni 77,12, Indeks Desa Membangun yakni 0.807, Desa Rawan Pangan di Kapanewon ini tidak ada, sedangkan indikator yang mempengaruhi terakhir adalah Rumah Tidak Layak Huni atap terdapat 1.508, lantai sebanyak 3.094, dinding sebanyak 2.286, sanitasi 2.144, sumber air sebanyak 1.139, akses listrik sebanyak 1.544.

2.3. Struktur dan Perekonomian

2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah pada tahun tertentu.

Dengan kata lain, PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya guna menciptakan nilai tambah bagi masing-masing sektor perekonomian. Lebih jauh, kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat digambarkan dengan melihat capaian PDRB yang dihasilkan baik atas dasar harga berlaku (AdHB) tahun berjalan, maupun atas dasar harga konstan (AdHK).

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB DIY atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 149,37 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini meningkat sebesar 11,06 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 138,31 triliun rupiah. Peningkatan nilai ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi dan harga barang dan jasa di hampir semua kategori. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga meningkat, dari 101,68 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 107,31 triliun rupiah pada tahun 2021. Berbeda dengan tahun sebelumnya, perekonomian DIY pada tahun 2021 tumbuh sebesar 5,53 persen. Peningkatan ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di hampir semua kategori, tanpa ada pengaruh inflasi.

Peranan berbagai kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi setiap kategori. Hingga tahun 2019, struktur perekonomian DIY masih didominasi oleh 5 (lima) kategori, yaitu: Industri Pengolahan; Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata distribusi persentase masing-masing kategori terhadap pembentukan PDRB DIY. Di tahun 2020, posisi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor tergeser oleh kategori Informasi dan Komunikasi dan kategori Jasa Pendidikan. Namun pada tahun 2021, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mampu kembali ke posisi 5 (lima) besar menggeser Jasa Pendidikan. Sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor masih tergeser oleh Informasi dan Komunikasi. Hal ini menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat terutama untuk makan minum yang sudah membaik setelah wabah corona sehingga berimbas pada turunnya kemiskinan di DIY.

Peranan terbesar dalam PDRB DIY pada tahun 2021 didominasi oleh kategori Industri Pengolahan, yaitu mencapai 12,36 persen. Angka ini berangsur-angsur menurun dari tahun 2017 sebesar 13,13 persen. Urutan kedua adalah kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 10,72 persen (meningkat drastis dari 8,21 persen di tahun 2017).

Selanjutnya Konstruksi, sebesar 10,14 persen atau naik dari 9,49 persen di tahun 2017. Peranan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,72 persen, turun dari 10,02 persen di tahun 2017. Sedangkan kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mempunyai peranan sebesar 9,16 persen, turun dari 10,33 persen di tahun 2017. Dari kelima kategori tersebut, peranan Informasi dan Komunikasi dan Konstruksi cenderung meningkat. Sebaliknya, Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Penyediaan Akomodasi dan makan minum peranannya cenderung menurun.

Tabel 1.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto D.I Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori, 2017-2021

	Kategori/Industry	2017	2018	2019	2020*	2021**
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	10,02	9,78	9,39	10,19	9,72
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,52	0,52	0,51	0,49	0,45
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	13,13	13,00	12,82	12,81	12,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	9,49	10,28	11,14	9,63	10,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	8,58	8,59	8,48	8,42	8,15
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5,69	5,75	5,63	4,57	4,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	10,33	10,22	10,37	8,84	9,16
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	8,21	8,11	7,99	9,73	10,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	3,90	3,93	4,00	4,04	3,99
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	7,03	6,95	7,00	7,39	7,02
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1,02	1,01	1,02	0,90	0,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	8,57	8,43	8,19	8,44	8,07
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	8,14	8,09	8,13	8,87	8,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,52	2,48	2,49	3,18	3,17
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,61	2,60	2,59	2,27	2,60

sumber : BPS Provinsi DIY, 2021

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. Nilai tersebut merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku periode 2017-2021 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 31,67 juta rupiah per tahun. Secara nominal terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 mencapai 40,23 juta rupiah per tahun. Atau meningkat dari 2,64 juta rupiah menjadi 3,35 juta rupiah per bulan dalam periode 2017-2021. Angka PDRB per kapita ini masih dipengaruhi inflasi. Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2017-2021, PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 meningkat dari 24,53 juta rupiah per tahun di tahun 2017 menjadi 28,90 juta rupiah per tahun di tahun 2021. Atau meningkat dari 2,04 juta rupiah menjadi 2,41 juta rupiah per bulan dalam periode 2017-2021. Sehingga rata-rata pertumbuhan per tahun selama periode tersebut adalah sebesar 2,97 persen.

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita D.I. Yogyakarta, 2017-2021

Uraian/Description	2017	2018	2019	2020*	2021**
Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion Rupiahs)					
- ADHB/at Current Price	119.129	129.818	141.048	138.307	149.369
- ADHK/at 2010 Constant Price	92.300	98.024	104.490	101.684	107.309
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHB/at Current Price	31.665	34.137	36.460	37.745	40.230
- ADHK/at 2010 Constant Price	24.534	25.776	27.010	27.750	28.902
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	3,87	4,11	4,79	2,74	4,15
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (ribu orang)/ Population (Thousand People)					
	3.762	3.803	3.869	3.664	3.713
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)					
	1,11	1,08	1,73	-5,28	1,33

2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan

terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kategori kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berbeda dengan tahun sebelumnya, nilai PDRB DIY tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan. Di tahun sebelumnya, peningkatan jumlah produksi hanya terjadi di 6 (enam) kategori, sedangkan di tahun ini, peningkatan produksi terjadi di hampir semua kategori. Peningkatan PDRB inisudah bebas dari pengaruh inflasi.

Nilai PDRB DIY tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010 sebesar 107,31 triliun rupiah, meningkat dari 101,68 triliun rupiah pada tahun 2020. Di tahun sebelumnya DIY mengalami kontraksi ekonomi 2,69 persen, namun di tahun 2021, perekonomian DIY tercatat membaik. Pertumbuhan ekonominya mencapai 5,53 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 3,69 persen. Membaiknya kondisi perekonomian juga terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi DIY menduduki peringkat ke-4 setelah Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah. Pertumbuhan ekonomi ketiganya masing- masing mencapai 2 (dua) digit, diantaranya 15,11 persen, 16,40 persen, dan 11,40 persen. Namun demikian, masih ada 2 (dua) provinsi yang mengalami kontraksi ekonomi, yaitu Bali dan Papua. Keduanya mengalami kontraksi sebesar 2,47 persen dan 0,51 persen

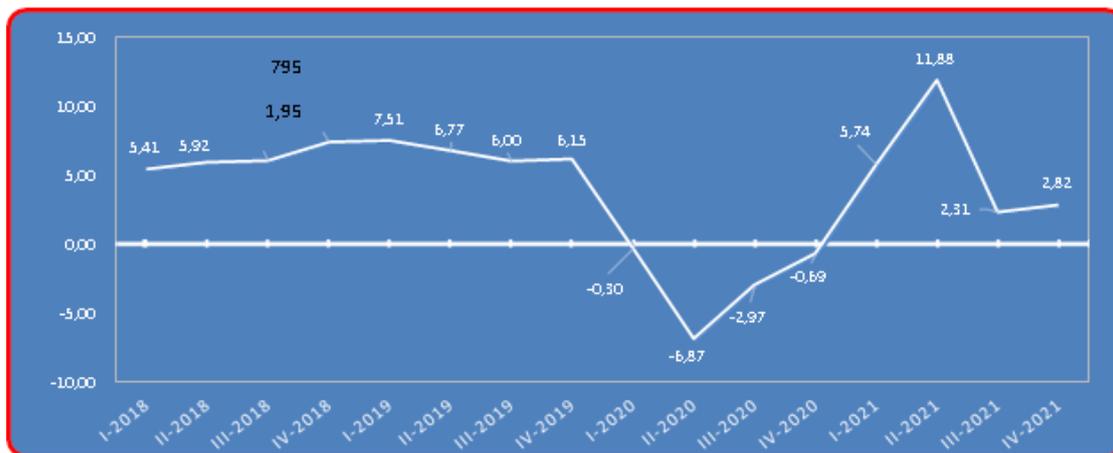
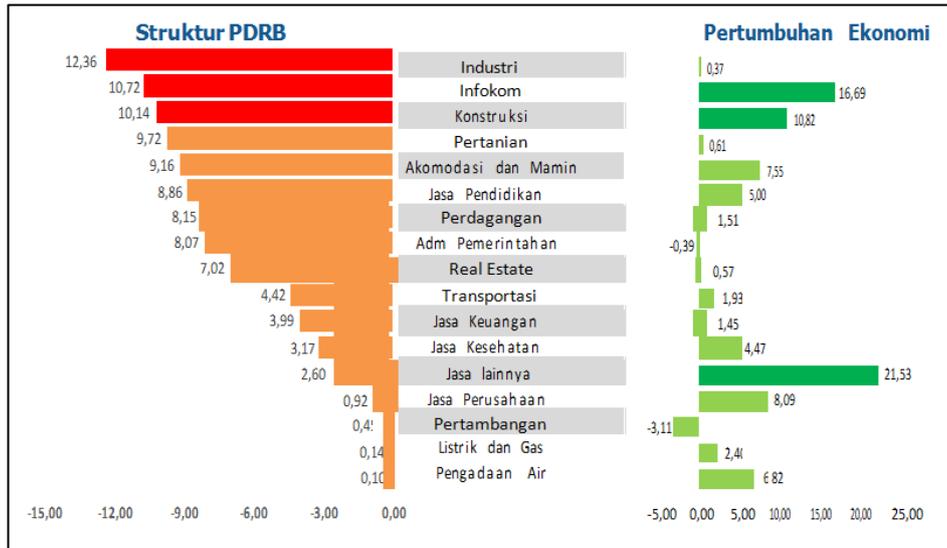
Perekonomian DIY tahun 2021 lebih kondusif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal serupa juga terjadi di provinsi lain, di level nasional bahkan di seluruh dunia. Kasus pertama *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) masuk ke DIY pada 15 Maret 2020. Jumlah penderita yang terus bertambah menyebabkan pandemi sampai akhir tahun hingga menyebabkan kontraksi ekonomi . Kondisi ini masih berlanjut hingga 2021, namun Pemerintah DIY mampu menekan dengan berbagai kebijakan, mulai dari pembatasan kegiatan masyarakat maupun pemberian vaksin kepada seluruh lapisan masyarakat.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 D.IYogyakarta Menurut Kategori (persen), 2017-2021

	Kategori/Industry	2017	2018	2019	2020*	2021* *
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	1,93	2,16	1,03	4,25	0,61
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	3,39	10,59	3,04	-8,84	-3,11

C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,74	5,12	5,72	-4,37	0,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,96	3,31	5,43	-1,38	2,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	3,46	5,13	8,90	0,51	6,82
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,01	13,10	14,38	-15,62	10,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	5,72	5,54	5,16	-4,51	-1,51
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,76	6,60	3,55	-20,21	1,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	6,21	6,77	8,88	-16,91	7,55
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	6,14	6,48	7,45	19,66	16,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,81	6,14	8,49	-1,06	1,45
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,91	5,54	5,93	1,27	0,57
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	5,92	5,51	6,75	-14,89	8,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	4,51	4,06	3,30	-2,24	-0,39
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,52	6,01	6,57	4,47	5,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	5,84	6,05	6,61	19,18	4,47
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	5,76	6,19	6,25	-15,74	21,53

Pada tahun 2021, hampir semua kategori tumbuh positif. Kategori Jasa Lainnya tumbuh melesit melebihi 20 persen. Pertumbuhannya mencapai 21,53 persen. Pertumbuhan tertinggi kedua dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 16,69 persen dan diikuti Kontruksi sebesar 10,82 persen. Empat kategori lainnya tumbuh lima hingga sepuluh persen, diantaranya kategori Jasa Perusahaan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan Jasa Pendidikan. Delapan kategori lainnya tumbuh kurang dari lima persen, bahkan tiga diantaranya tumbuh kurang dari satu persen. Sebaliknya, kategori Pertambangan dan Penggalian dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib justru mengalami kontraksi. Kontraksi kedua kategori tersebut masing- masing sebesar 3,11 persen dan 0,39persen.



Perekonomian DIY triwulan IV-2021 dibanding triwulan IV-2020 (y-on-y) tumbuh sebesar 2,82 persen, atau membaik jika dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 0,69 persen. Membaiknya kondisi perekonomian ini terutama didukung oleh pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan jasa lainnya. Keduanya tumbuh mencapai 2 digit, yaitu 25,41 persen dan 13,34 persen. Lapangan usaha transportasi dan listrik masing-masing tumbuh 9,56 persen dan 8,51 persen. Enam lapangan usaha yang lain tumbuh kurang dari 6 persen, sedangkan tujuh lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi.

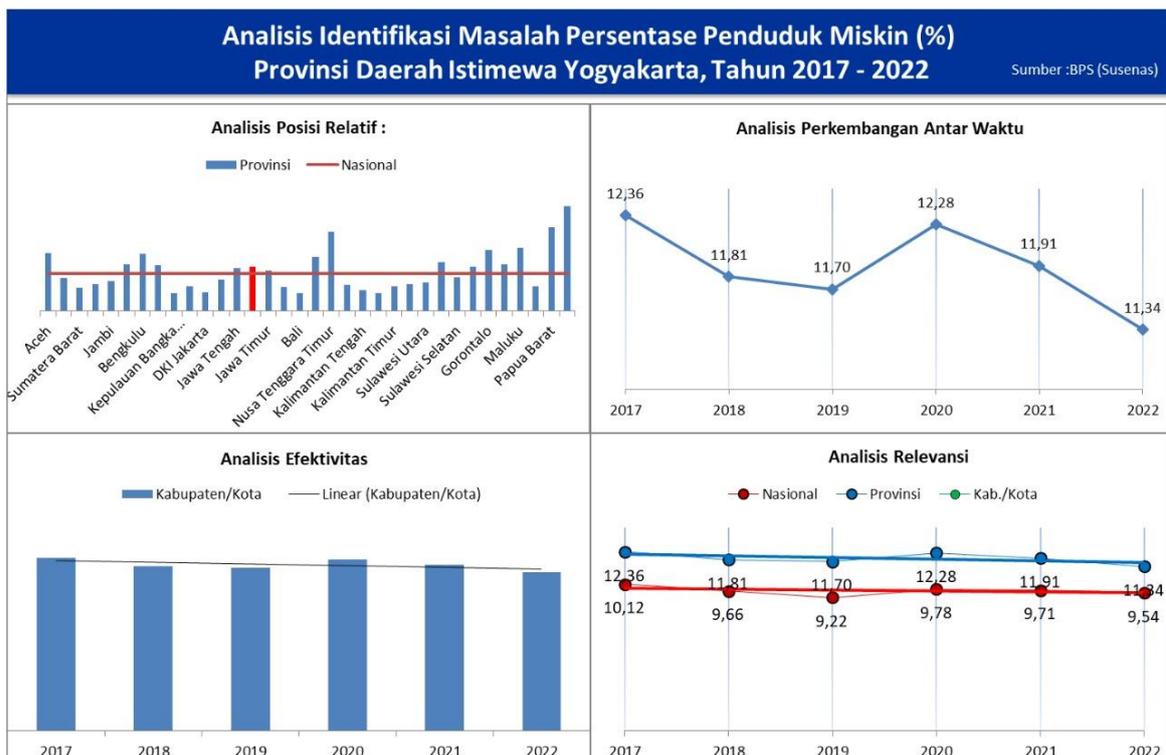
BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1. Analisis Karakteristik Masalah Kemiskinan Konsumsi

Kemiskinan diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh Worldbank. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Analisis kemiskinan konsumsi meliputi persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

3.1.1. Persentase Penduduk Miskin

Ukuran Persentase Kemiskinan (P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.



a. Analisis Posisi Relatif

Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin DIY lebih tinggi dibandingkan capaian rata-rata nasional dan merupakan yang tertinggi dibanding 5 provinsi lain di Jawa. DIY juga masuk dalam 15 besar provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Masih perlu penurunan lebih dari 2 poin untuk mencapai target persentase penduduk miskin 9,51 persen pada tahun 2026. Persentase penduduk miskin DIY masih jauh dari rata-rata nasional sebesar 9,54% Tahun 2022.

b. Perkembangan Antar Waktu

Persentase penduduk miskin DIY menurun dari posisi 11,91 persen pada tahun 2021 menjadi 11,34 persen pada tahun 2022. Dalam 5 tahun terakhir, persentase penduduk miskin cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2020 dari 11,70 persen menjadi 12,28 persen. Kenaikan persentase penduduk miskin ini bersamaan dengan pandemi covid-19. Rebound perekonomian selama tahun 2021 dan 2022 diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan setelah terjadi peningkatan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 12,28% di tahun 2020 akibat dampak pandemi.

c. Efektivitas

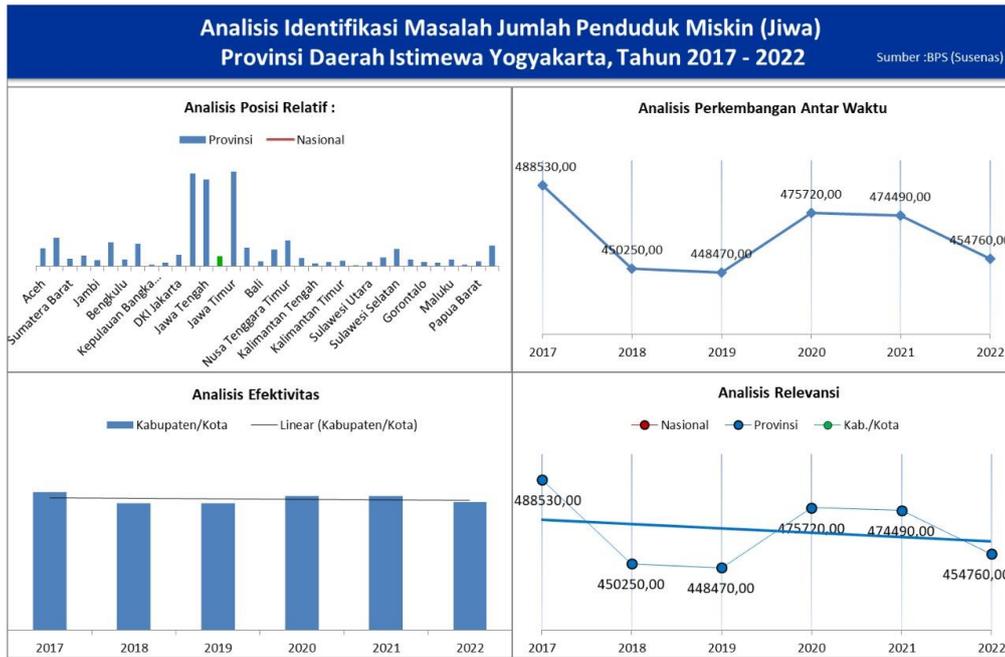
Terdapat kecenderungan penurunan persentase penduduk miskin pada periode 2017–2021. Meskipun adanya penurunan, tetapi penurunan ini tidak signifikan sehingga kurang efektif. Hal tersebut dapat terjadi karena pandemi covid-19 yang berdampak pada kehidupan masyarakat khususnya ekonomi. Pemda DIY terus berupaya untuk melakukan pemulihan akibat pandemi covid-19, terlihat dari penurunan tingkat kemiskinan yang menandakan adanya perbaikan.

d. Relevansi Perkembangan

Pada periode 2017-2021, pola perubahan persentase penduduk miskin DIY dan nasional cenderung serupa. Tingkat fluktuasi perubahannya pun relatif sama, sebesar 0,2 per tahun. Hal ini mengindikasikan adanya keselarasan penyelenggaraan dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional dan provinsi.

3.1.2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi.



a. Analisis Posisi Relatif

Pada tahun 2022, DIY memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 454.760 jiwa. Kondisi ini relatif lebih rendah dibanding 5 provinsi lain di Jawa maupun nasional (26,5 juta jiwa). Meskipun demikian, DIY masih masuk dalam 15 besar provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.

b. Perkembangan Antar Waktu

Pada tahun 2021, dalam situasi pandemi, jumlah penduduk miskin DIY menurun tipis sebanyak 1230 jiwa dari capaian 2020. Dan jumlah penduduk miskin di DIY menurun kembali di tahun 2022 menjadi 454.760 jiwa. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Perubahan tertinggi terjadi pada tahun 2018 (turun 38 ribu jiwa dari capaian 2017), sementara perubahan terendah terjadi pada tahun 2021.

c. Efektivitas

Periode 2017 hingga 2021 memiliki tren menurun meskipun tidak signifikan, sehingga cukup efektif. Penurunan pada periode tersebut, sebesar 14.040 jiwa. Pada pertengahan periode khususnya 2018 terjadi penurunan signifikan, tetapi kembali ada peningkatan pada tahun 2020. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi yang mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 dan 2021.

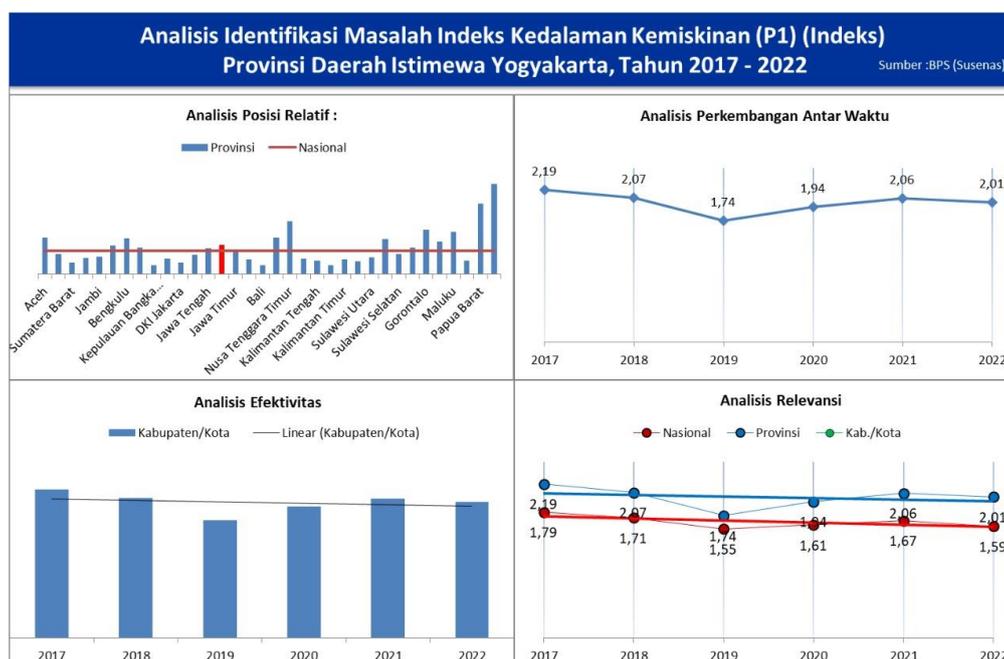
d. Relevansi Perkembangan (Tidak ada grafik analisis relevansi nasional)

Pola perubahan jumlah penduduk miskin antara DIY cenderung berbeda dibandingkan pola perubahan jumlah penduduk miskin nasional, dimana perubahan jumlah penduduk miskin DIY cenderung menurun dibanding nasional. Terutama pada masa pandemic,

secara nasional dan daerah lain mengalami kenaikan namun untuk DIY secara jumlah cenderung menurun meskipun lambat penurunannya.

3.1.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi.



a. Analisis Posisi Relatif

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengindikasikan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Data menunjukkan bahwa capaian P1 DIY Tahun 2022 sebesar 2.01 persen lebih tinggi dari rata-rata capaian provinsi lain yang ada di Pulau Jawa (1,35 persen) dan masuk pada 15 besar provinsi dengan P1 tertinggi. Dibandingkan dengan capaian nasional di angka 1,59% pada Tahun 2022, P1 DIY juga masih lebih tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran di DIY lebih jauh daripada rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di tingkat nasional.

b. Perkembangan Antar Waktu

Indeks kedalaman kemiskinan DIY menunjukkan pergerakan fluktuatif dari tahun 2017 hingga 2022. Awalnya indeks kedalaman kemiskinan DIY menunjukkan penurunan dari 2017 menuju 2019, hingga akhirnya pandemi mendorong peningkatan P1 pada tahun

2020 dan 2021. Indeks kedalaman terendah pada tahun 2019 sebesar 1,74. Indeks kedalaman tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 2,19, angka tersebut masih lebih besar daripada indeks kedalaman kemiskinan tahun 2022.

c. Efektivitas

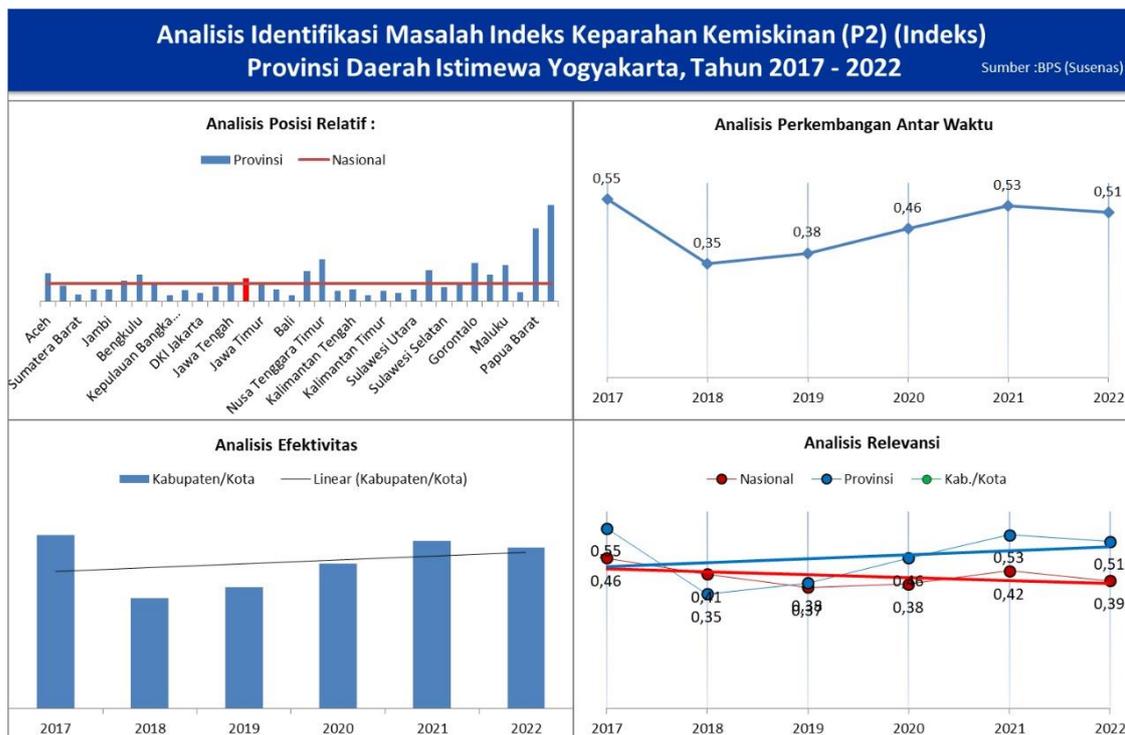
Terdapat kecenderungan penurunan kedalaman kemiskinan pada periode 2017-2022. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2017 sebesar 2,19 turun di tahun 2022 menjadi 2,01. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam mengatasi kemiskinan khususnya pada rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Meskipun adanya penurunan, tetapi penurunan ini kurang efektif karena indeks kedalaman kemiskinan DIY tahun 2022 belum dapat serendah pada tahun 2019, sehingga masih diperlukan upaya dalam mengatasi kesenjangan.

d. Relevansi Perkembangan

Pada periode 2017-2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di DIY memiliki pola yang serupa, keduanya sama menunjukkan penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya kecenderungan yang sejalan atau relevan antara DIY dengan nasional. Penurunan ini menunjukkan perbaikan serta adanya peran sejumlah program pengurangan kedalaman kemiskinan yang diinisiasi oleh pemda DIY. Meskipun demikian, peningkatan P1 DIY setelah memasuki pandemi juga lebih tinggi. Angka P1 tahun 2022 juga belum dapat serendah pada tahun 2019, hal ini mengindikasikan upaya untukantisipasi penurunan P1 setelah pandemi.

3.1.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



a. Analisis Posisi Relatif

Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin. Data menunjukkan bahwa capaian P2 DIY Tahun 2022 sebesar 0,51% lebih tinggi dari rata-rata capaian provinsi lain yang ada di Pulau Jawa (0,32 persen) dan masuk pada 15 besar provinsi dengan P2 tertinggi. Dibandingkan dengan capaian nasional yaitu 0,39% di Tahun 2022, P2 DIY juga masih lebih tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di DIY lebih tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin daripada di tingkat nasional.

b. Perkembangan Antar Waktu

Indeks keparahan kemiskinan (P2) DIY menunjukkan turun dari tahun 2017 ke 2018. P2 DIY menurun dan mencapai titik terendahnya (0,35) pada tahun 2018 dan secara konsisten meningkat sejak masa awal masa pandemi covid-19 hingga tahun 2021. Pada tahun 2022, P2 DIY berada pada posisi 0,51. Kondisi ini sudah lebih baik daripada Tahun 2021 yang menurun 0,02 persen.

c. Efektivitas

Indeks keparahan kemiskinan meningkat secara konsisten pada periode 2017-2021 dengan capaian P2 terendah pada tahun 2018 sebesar 0,35 persen, sementara pada tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi peningkatan dan hanya turun sedikit di Tahun 2022. Hal ini mengindikasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan kurang efektif dalam menanggulangi keparahan kemiskinan.

d. Relevansi Perkembangan

Pada periode 2015-2019, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) DIY bergerak secara lebih fluktuatif dibandingkan P2 nasional. Penurunan P2 DIY sebelum tahun 2019 cenderung lebih agresif dibandingkan capaian nasional. Meskipun demikian, mulai tahun 2019, P2 DIY mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibanding nasional. Hal ini mengindikasikan program antisipasi penurunan P2 di DIY yang kurang berjalan (tidak relevan) dengan program di tingkat nasional.

3.1.5. Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Konsumsi

Secara ringkas, analisis kemiskinan bidang konsumsi disajikan pada tabel di bawah ini. Pada indikator persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa di DIY lebih tinggi dari capaian nasional, tetapi persentase penduduk miskin ini menunjukkan perbaikan terlihat dari antar waktu yang cenderung menurun, meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya pandemi covid-19. Program kebijakan terkait penurunan persentase penduduk miskin menjadi kurang efektif. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada DIY saja akan tetapi juga secara Nasional.

Berbeda halnya dengan indikator jumlah penduduk miskin di DIY yang lebih rendah dari capaian nasional dan provinsi lain di Jawa. Hal tersebut dapat dipengaruhi dari populasi penduduk di DIY yang relatif lebih sedikit daripada provinsi di pulau Jawa. Sama halnya dengan persentase penduduk miskin, pada indikator jumlah penduduk miskin juga cenderung mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2020 terjadi peningkatan disebabkan pandemi covid-19. Program kebijakan terkait penurunan jumlah penduduk miskin menjadi kurang efektif. Kondisi ini juga kurang relevan dengan Nasional. Pada indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan capaian lebih tinggi daripada capaian nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran di DIY lebih jauh daripada rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di tingkat nasional. Perkembangan antar waktu juga fluktuatif, tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan, hal tersebut dapat disebabkan dari dampak adanya pandemi covid-19. Program kebijakan terkait penurunan P1 menjadi kurang efektif karena angka kedalaman kemiskinan tahun 2021 masih lebih tinggi dari tahun 2019. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada DIY saja akan tetapi juga di tingkat Nasional.

Pada indikator Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan capaian lebih tinggi daripada capaian nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di DIY lebih tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin daripada di tingkat nasional. Perkembangan antar waktu dari 2017-2021 fluktuatif, dimana penurunan hanya terjadi

pada tahun 2018. Program kebijakan terkait penurunan P2 kurang efektif. Kondisi ini berbeda dengan tingkat Nasional yang lebih cenderung menunjukkan penurunan.

Tabel 3. 1. Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Konsumsi

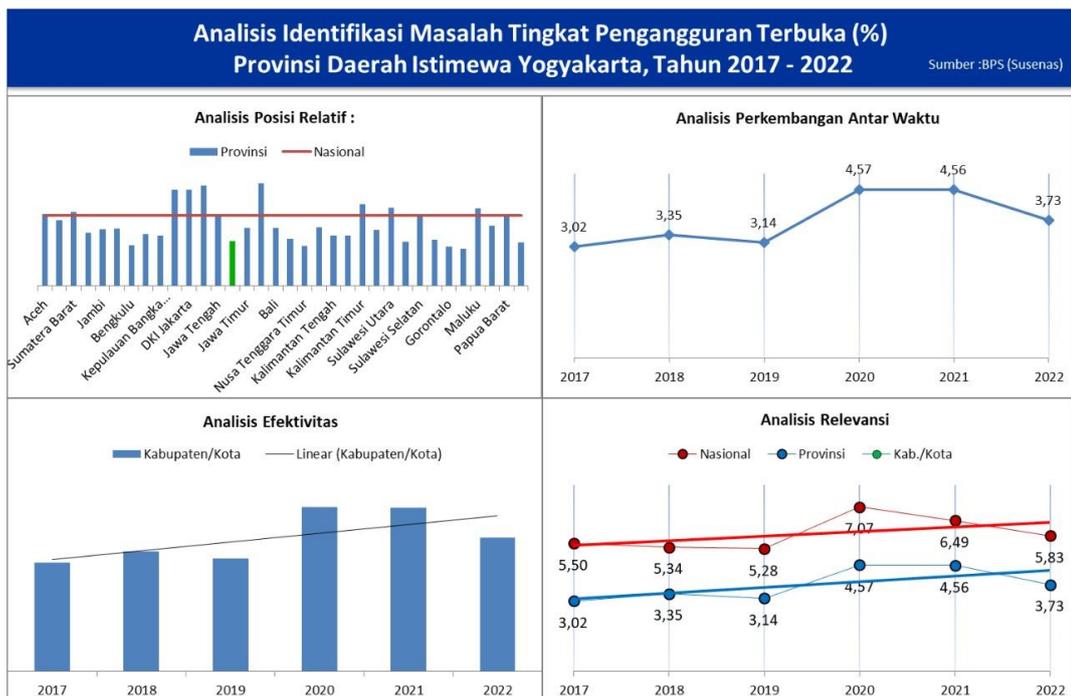
No	Indikator	Aspek yang Dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan antar Waktu	Efektifitas	Relevansi
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	Lebih tinggi dari capaian nasional & provinsi lain di wilayah Jawa	Cenderung menurun, tetapi ada peningkatan pada tahun 2020	Tidak efektif	Relevan
2	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Lebih rendah dari capaian nasional & provinsi lain di wilayah Jawa	Cenderung menurun, tetapi ada peningkatan pada tahun 2020	Tidak efektif	Tidak relevan
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)	Lebih tinggi dari capaian nasional & provinsi lain di wilayah Jawa	Fluktuatif, menurun pada tahun 2018 dan 2019, kemudian meningkat pada tahun 2020 dan 2021	Tidak efektif	Relevan
4	Indeks Keparahan Kemiskinan (%)	Lebih tinggi dari capaian nasional & provinsi lain di wilayah Jawa	Fluktuatif, penurunan hanya pada tahun 2018	Kurang efektif	Relevan

Kemiskinan bersifat multidimensi dan memiliki indikator yang saling berkaitan sehingga tidak bisa ditentukan salah satu indikator yang bermasalah.

3.2. Analisis Karakteristik Masalah Ketenagakerjaan

3.2.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan permasalahan utama di bidang ketenagakerjaan. TPT merupakan rasio antara Jumlah Orang Tidak Bekerja dengan Angkatan Kerja. TPT ini menunjukkan berapa persen dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Mereka yang tidak bekerja mungkin masih mencari pekerjaan atau untuk sementara tidak bekerja karena menunggu panggilan kerja kembali. TPT merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan. Semakin tinggi TPT maka semakin banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali sehingga mereka tidak memiliki pendapatan. Implikasi lebih lanjut adalah mereka tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dasarnya dan mereka merupakan kelompok masyarakat miskin.



a. Analisis Posisi Relatif

Pada tahun 2022, Tingkat TPT DIY pada 2022 sebesar 3.73%. Angka ini menunjukkan bahwa 3.73% dari angkatan kerja tidak bekerja sama sekali. Secara relatif angka ini masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Nasional sebesar 5,83%.

b. Perkembangan Antar Waktu

Meskipun secara relatif TPT DIY lebih rendah daripada Nasional, perkembangan TPT cenderung meningkat. Sebelum pandemi Covid-19 TPT berada pada 3.14%. Dengan adanya pandemi, TPT meningkat sekitar 0.59 poin menjadi 3.73% pada tahun 2022. Dengan semakin meredanya pandemi Covid-19 diharapkan TPT akan semakin rendah di periode-periode selanjutnya.

c. Efektivitas

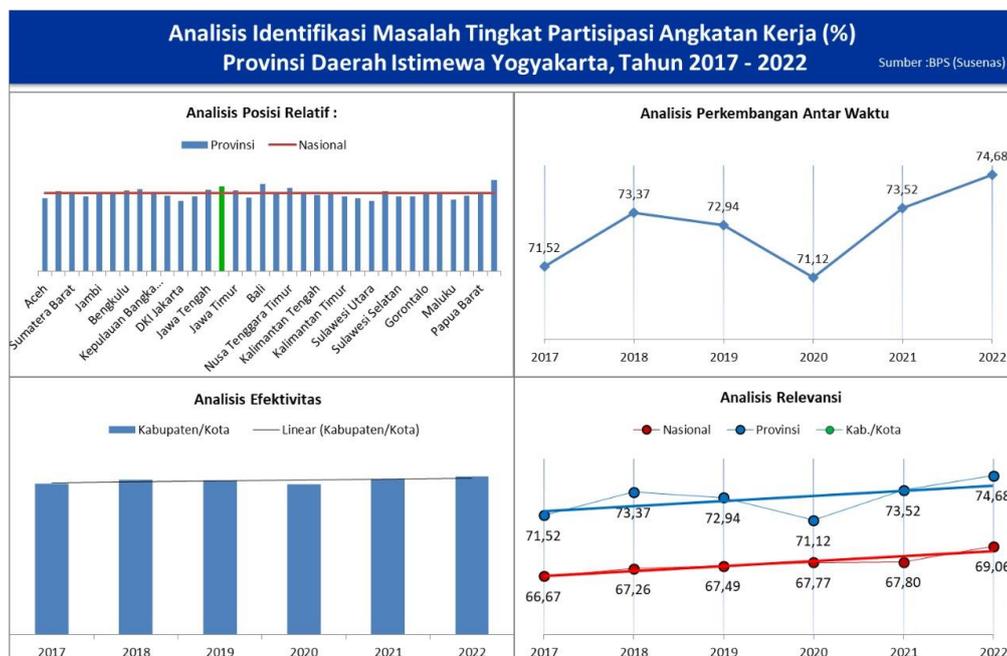
Ditinjau dari analisis efektifitas, kebijakan pengurangan TPT di DIY cukup efektif dalam menurunkan permasalahan pengangguran. Meskipun kenaikan ini lebih disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19, hal ini menjadi tantangan pemerintah untuk menurunkan kembali ke angka pengangguran sebelum periode pandemi.

d. Relevansi Perkembangan

Perkembangan TPT di DIY ternyata relevan dengan perkembangan TPT Nasional. Fluktuasi perkembangan TPT bahkan sama antara keduanya meskipun angka TPT DIY lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan TPT merupakan fenomena permasalahan makro ekonomi yang juga lazim terjadi di daerah lainnya seluruh Indonesia.

3.2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 ke atas baik yang bekerja maupun tidak bekerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan proporsi penduduk produktif yang aktif di pasar kerja. TPAK ini merepresentasikan tingkat penawaran kerja di dalam perekonomian. Semakin tinggi TPAK maka semakin tinggi tingkat penawaran tenaga kerja yang ada di perekonomian. TPAK tinggi akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi apabila kesempatan kerja di suatu perekonomian tinggi. Sebaliknya, tingginya TPAK akan menjadi permasalahan ketenagakerjaan apabila tingkat kesempatan kerja yang tersedia di perekonomian rendah. Akibatnya sebagian angkatan kerja tidak dapat terserap di pasar kerja atau mereka akan menjadi pengangguran.



a. Analisis Posisi Relatif

Pada tahun 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY sebesar 74,68%. Angka ini menunjukkan 74,68% penduduk usia produktif aktif di pasar kerja baik bekerja maupun tidak bekerja. Angka ini lebih tinggi dari pada TPAK Nasional sebesar 69,06%. Dengan kata lain kita dapat mengatakan bahwa tingkat penawaran tenaga kerja di DIY lebih tinggi daripada rata-rata tingkat penawaran tenaga kerja di Indonesia.

b. Perkembangan Antar Waktu

Dalam kurun waktu 5 tahun, TPAK DIY mengalami fluktuasi. Pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan TPAK pada tahun 2020 yaitu sebesar 71,12% dari sebelumnya sebesar 73,37% dan 72,94% berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019. Menurunnya TPAK ini mungkin disebabkan oleh adanya *discouraged worker effect*, dimana

resesi ekonomi menyebabkan seseorang yang sebelumnya aktif di pasar kerja keluar dari angkatan kerja. Hal ini dapat disebabkan karena sulitnya mencari pekerjaan pada saat pandemi sehingga mereka menyerah untuk mencari pekerjaan. Meskipun demikian, TPAK kembali meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 74,68%.

c. Efektivitas

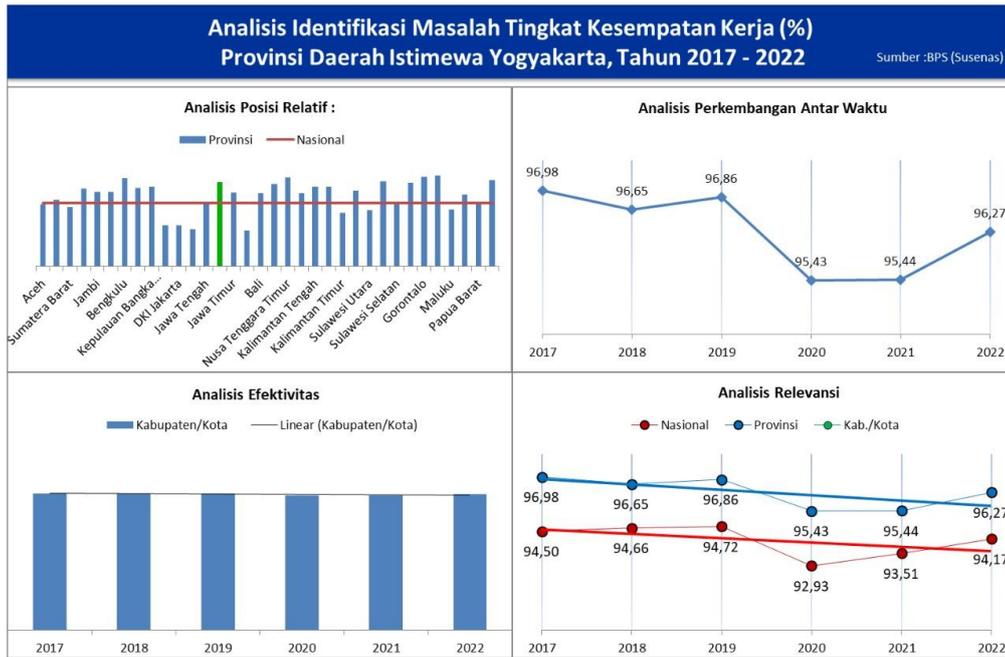
Dari Tahun 2021 ke 2022, TPAK DIY mengalami kenaikan sebesar 1,16 persen. Meskipun TPAK mengalami penurunan pada masa pandemi, penurunannya relatif tidak signifikan. Hal ini menunjukkan program kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk peningkatan partisipasi kerja telah berjalan efektif. Dengan demikian, DIY memiliki potensi tenaga kerja produktif yang besar sehingga perlu diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai.

d. Relevansi Perkembangan

Selama periode 2017–2022, peningkatan TPAK DIY relevan dengan peningkatan TPAK Nasional. Dengan kata lain, pertumbuhan TPAK juga terjadi secara umum pada daerah lain di Indonesia. Meskipun demikian, perkembangan TPAK di DIY lebih fluktuatif dibandingkan Nasional. Tingginya fluktuasi dapat disebabkan karena DIY merupakan salah satu tujuan migrasi di Indonesia sehingga mobilitas tenaga kerja menjadi lebih tinggi. Fluktuasi berupa kenaikan terjadi pada 2018, sedangkan fluktuasi berupa penurunan terjadi pada 2020 yang diakibatkan pandemi Covid-19.

3.2.3. Tingkat Kesempatan Kerja

Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja karena ketidakseimbangan antara supply dan demand tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran.



a. Analisis Posisi Relatif

Tingkat kesempatan kerja merupakan Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. Angka ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Data menunjukkan bahwa capaian kesempatan kerja di DIY Tahun 2022 sebesar 96.27% lebih tinggi 2,1% dari rata-rata kesempatan kerja nasional pada 94,17 di tahun 2022 dan termasuk 10 besar dengan tingkat kesempatan kerja tertinggi.

b. Perkembangan Antar Waktu

Tingkat Kesempatan Kerja DIY mengalami fluktuatif namun menurun tajam ketika pandemi Covid 19 Tahun 2020-2021. Tahun 2020, TTK DIY menurun menjadi 95,43% turun 1,43% dari Tahun 2019 dan bertahan di 95,44% Tahun 2021. Pada Tahun 2022 mulai naik menjadi 96,27%. Angka ini menunjukkan perbaikan meskipun di Tahun 2022 meskipun belum bisa mencapai di angka awal 2019 sebelum pandemi. Penurunan terbanyak pada saat pandemic tahun 2020-2021.

c. Efektivitas

Tingkat kesempatan kerja menunjukan perbaikan yang efektif seiring dengan meredanya Covid 19. Hal ini mengindikasikan kebijakan dan upaya Pemda DIY dalam peningkatan kesempatan kerja efektif dalam menanggulangi kemiskinan.

d. Relevansi Perkembangan

Pada periode 2017-2019, Tingkat Kesempatan Kerja DIY bergerak secara lebih relevan dengan Tingkat kesempatan Kerja Nasional. Penurunan Tingkat Kesempatan Kerja DIY sebelum tahun 2019 cenderung lebih agresif. Hal ini mengindikasikan program

antisipasi penurunan Tingkat Kesempatan Kerja di DIY berjalan relevan dengan dengan program di tingkat nasional.

3.2.4. Matriks Analisis Kemiskinan Bidang ketenagakerjaan

Secara ringkas, analisis kemiskinan bidang ketenagakerjaan disajikan pada tabel di bawah ini. Pada indikator utama berupa Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan bahwa TPT di DIY lebih rendah daripada TPT Nasional. Meskipun demikian, angka TPT cenderung meningkat terutama disebabkan karena pandemi Covid-19. Program kebijakan terkait penurunan TPT menjadi kurang efektif. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada DIY saja akan tetapi juga secara Nasional. Sedangkan pada indikator utama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, DIY memiliki TPAK yang lebih tinggi dibandingkan nasional. Dari waktu ke waktu, angka TPAK juga cenderung meningkat meskipun mengalami penurunan sedikit pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020. Program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kerja relatif berjalan efektif. Perkembangan TPAK di DIY ini juga relevan dengan perkembangan TPAK Nasional.

Meningkatnya TPT yang seiring dengan peningkatan TPAK dapat mengindikasikan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja sehingga menimbulkan pengangguran. Permasalahan ini dapat berpotensi meningkatkan angka kemiskinan apabila pemerintah tidak berupaya keras untuk menggerakkan investasi dan aktifitas ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru lebih banyak.

Tabel 3. 2. Matriks Analisis Kemiskinan Bidang ketenagakerjaan

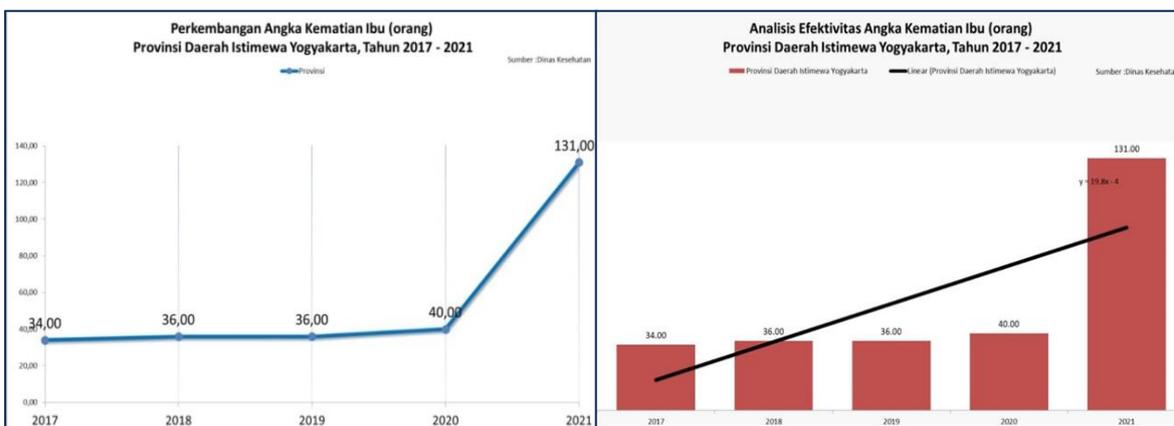
No	Indikator Utama	Aspek Analisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektifitas	Relevansi Perkembangan
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Lebih rendah	Menurun	Tidak efektif	Tidak Relevan
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Lebih tinggi	Cenderung naik	Efektif	Relevan
3	Tingkat Kesempatan Kerja	Lebih tinggi	Cenderung naik	Tidak efektif	Relevan

Dari analisis karakteristik masalah bidang ketenagakerjaan, didapatkan indikator utama yang perlu perbaikan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

3.3. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Kesehatan

3.3.1. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu disebabkan oleh kejadian yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Menurut BPS, AKI merupakan Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.



a. Analisis Posisi Relatif (Data Provinsi Lain dan Nasional kosong dari tahun 2017-2021)

b. Perkembangan Antar Waktu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) nomor tiga yaitu fokus dalam upaya penurunan AKI. Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Perkembangan AKI dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian ibu. Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di DIY dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Tahun 2017 kasus kematian ibu sebanyak 34 kasus, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 di angka 36 kasus, tahun 2020 meningkat di angka 40, dan meningkat cukup tajam di tahun 2021 menjadi 131 kasus (data sementara Dinkes DIY).

c. Efektivitas

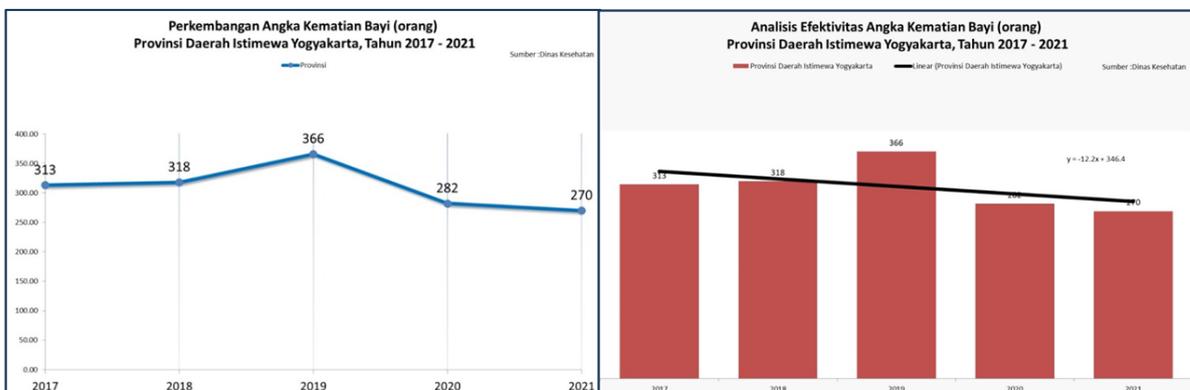
Angka kematian Ibu (AKI) di DIY terlihat melonjak pada tahun 2021. Jika ditinjau dari analisis efektifitas, kebijakan pengurangan AKI di DIY cenderung tidak efektif dalam menurunkan permasalahan kualitas kesehatan ibu. Pada tahun 2020, penyebab kematian

ibu paling banyak ditemukan di DIY karena penyakit lain-lain sebanyak 16 kasus. Kematian ibu yang lain disebabkan oleh perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, dan gangguan sistem peredaran darah. Penyakit lain-lain ini kebanyakan disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19, hal ini menjadi tantangan pemerintah untuk menurunkan AKI kembali serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu ke sebelum periode pandemi.

d. Relevansi Perkembangan (tidak dapat di analisis karena tidak ada data nasional)

3.3.2. Angka Kematian Bayi

Menurut BPS, Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup).



a. Analisis Posisi Relatif (Data Provinsi Lain dan Nasional kosong dari tahun 2017-2021)

b. Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan AKB di DIY dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian bayi. Dari data tersebut terlihat bahwa kasus kematian bayi mengalami tren penurunan. Pada tahun 2019 AKB mengalami kenaikan dari angka 318 pada tahun 2018 menjadi 366 pada tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 dan 2021 AKB di DIY terus mengalami penurunan. Penyebab umum kematian bayi dan neonatal di DIY adalah asfiksia pada saat lahir karena lama di jalan kelahiran, letak melintang, serta panggul sempit. Selain itu, penyebab lain kematian bayi yang sering dijumpai di DIY antara lain kelainan bawaan.

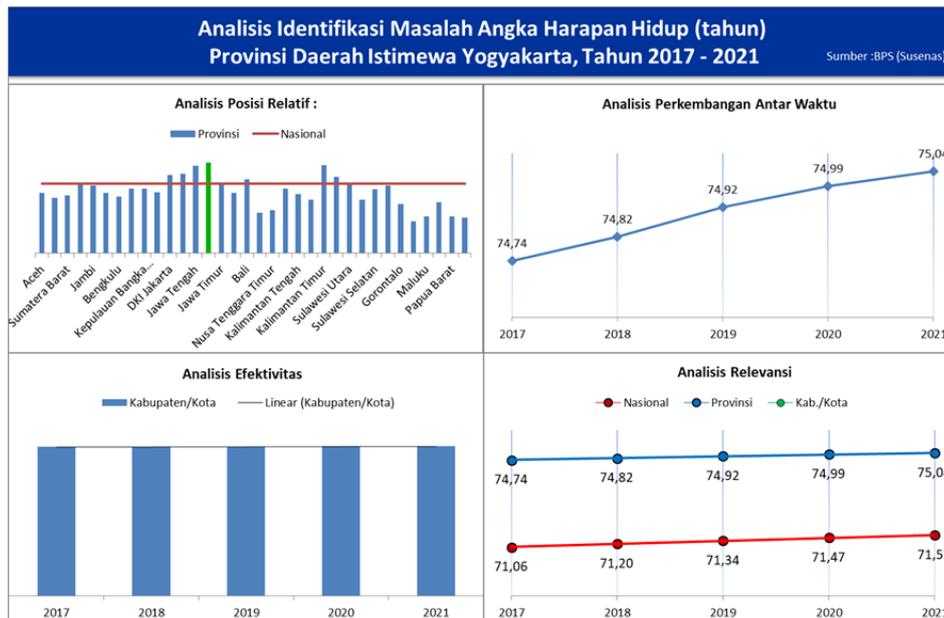
c. Efektivitas

Selama periode 2017 sampai dengan 2021, program pemerintah untuk mengurangi angka kematian bayi cukup efektif. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Untuk upaya pencegahan kasus kematian bayi banyak upaya dan rekomendasi pada area sebelum kehamilan dan selama persalinan misalnya melalui upaya pelayanan kesehatan remaja, menurunkan anemia remaja, skrining kesehatan catin, ANC Terpadu untuk mencegah BBLR, IUGR, persalinan preterm, deteksi kelainan BBL, skrining BBL (SHK) serta meningkatkan ketrampilan petugas dalam penanganan kegawatan neonatal baik di Puskesmas dan RS rujukan.

d. Relevansi Perkembangan (tidak dapat di analisis karena tidak ada data nasional)

3.3.3. Angka Harapan Hidup

Analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini dan menemukan permasalahan yang ada. Salah satunya adalah indikator Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Derajat kesehatan yang meningkat akan ditandai oleh peningkatan usia harapan hidup. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), AHH merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



a. Analisis Posisi Relatif

Secara relatif, proporsi Angka Harapan Hidup (AHH) di DIY lebih tinggi daripada Nasional. Di DIY Posisi AHH di 75,04 tahun , sedangkan di Nasional masih sebesar 71,57 tahun. DIY bahkan menduduki peringkat pertama terkait AHH pada tahun 2021. Ditinjau dari aspek ini, masyarakat di DIY jauh lebih sehat dan berusia panjang dibandingkan dengan penduduk di daerah lain.

b. Perkembangan Antar Waktu

AHH di DIY dalam kurun waktu 2014-2021 menunjukkan peningkatan dari 74,50 pada tahun 2014 meningkat menjadi 75,04 pada tahun 2021. Kenaikan AHH melandai namun naik terus menerus dari tiap tahunnya.

c. Efektivitas

Selama periode 2017 sampai dengan 2021, Program pemerintah yang dilakukan dalam rangka mendukung Angka Harapan Hidup (AHH) sangat efektif. Pengaruh kesehatan dalam upaya meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dengan semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi di masyarakat. Dari capaian peningkatan AHH DIY diprediksi akan berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk lanjut usia.

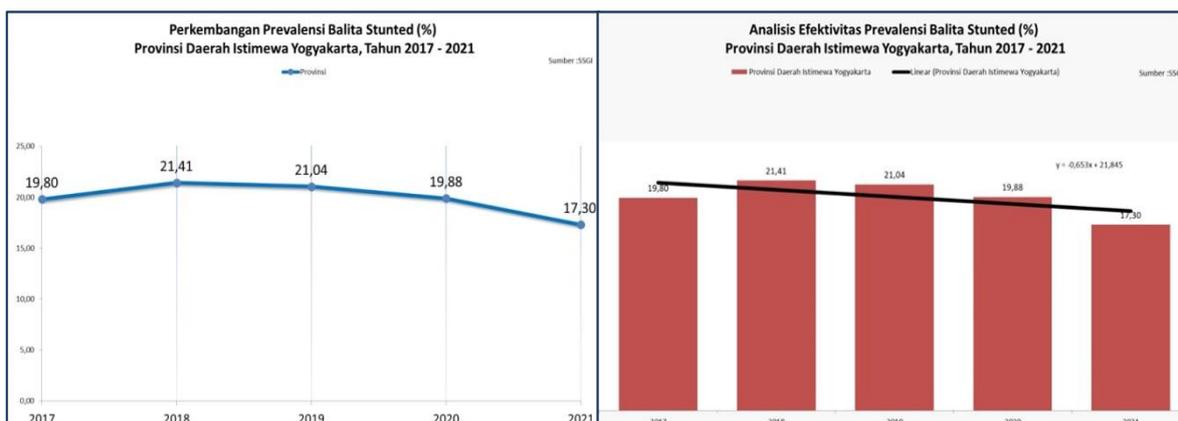
d. Relevansi Perkembangan

Beberapa faktor yang mempengaruhi AHH antara lain kesehatan, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Sektor kesehatan sangat berperan dalam pencapaian indikator AHH melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan, dan pelayanan kesehatan. Peningkatan AHH yang terjadi di DIY dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kesehatan yang menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan tersebut. Kecenderungan

perkembangan Angka Harapan Hidup di DIY juga relevan dengan perkembangan yang terjadi di Nasional.

3.3.4. Prevalensi Balita Stunting

Stunting terjadi akibat kegagalan pada saat proses tumbuh kembang seorang anak karena kondisi kesehatan dan asupan gizi yang tidak optimal sehingga diperlukan peran multi sektor multi stakeholder dalam pencegahan dan penanganannya. Pencegahan dan penanganan permasalahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik ditujukan pada penyebab langsung stunting seperti layanan kesehatan dan gizi. Sedangkan intervensi gizi sensitif lebih ditujukan pada intervensi penyebab tidak langsung seperti penyediaan akses air bersih dan aman, penyediaan rumah dan sanitasi sehat, penyediaan pangan aman, bergizi dan sehat, pola asuh, dan lingkungan sosial yang sehat.



a. Analisis Posisi Relatif (data nasional dan data provinsi lain tidak ada)

b. Perkembangan Antar Waktu

Permasalahan balita stunting di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2024 dimana prevalensi balita stunting ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024. Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 prevalensi balita stunting di DIY sebesar 17,30% sedangkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY prevalensi balita stunting di DIY tahun 2020 sebesar 11,08% dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Kabupaten Gunungkidul sebesar 17,40%.

c. Efektivitas

Selama periode 2017 sampai dengan 2021, Program pemerintah yang dilakukan dalam rangka mendukung penurunan angka stunting sangat efektif. Dari capaian penurunan angka stunting di DIY upaya program intervensi gizi secara spesifik dan sensitif cukup berhasil dalam menurunkan angka stunting di DIY.

d. Relevansi Perkembangan (tidak ada data provinsi)

3.3.5. Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Kesehatan

Secara ringkas, analisis kemiskinan bidang kesehatan disajikan dalam tabel di bawah ini. Dari keempat indikator utama bidang kesehatan hanya ada 1 indikator yang bisa menyajikan data nasional yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). AHH DIY menunjukkan lebih tinggi dari rata-rata AHH nasional yaitu 71,57 tahun. Dan AHH DIY relevan dengan rata-rata AHH nasional. Dari keempat indikator tersebut, hanya satu indikator yang menunjukkan peningkatan dalam nilai negative yaitu Angka Kematian Ibu (AKI). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa program pemerintah terkait dengan penyediaan layanan kesehatan tersebut cukup efektif. Namun untuk satu indikator AKI perlu upaya khusus untuk mencapai di angka tahun sebelumnya atau dibawahnya. Dukungan ketercapaian indikator kesehatan sesuai dengan prioritas nasional yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dimana proyek utamanya adalah menurunkan angka kematian ibu dan stunting.

Upaya menekan angka kematian ibu melahirkan perlu lebih diperkuat dalam pelayanan promotif-preventif untuk menyiapkan persalinan yang aman melalui kunjungan ibu hamil, deteksi potensi komplikasi kehamilan dan persalinan di fasilitas kesehatan. Capaian indikator pembangunan kesehatan ditinjau dari beberapa indikator, yaitu angka Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), dan Prevalensi Balita Kekurangan Energi Protein (KEP). Dari capaian indikator pembangunan kesehatan yang perlu mendapat perhatian adalah AKI di DIY yang terus meningkat selama lima tahun terakhir. Dengan demikian, angka kemiskinan yang disebabkan oleh permasalahan bidang infrastruktur dasar dapat ditekan sekecil mungkin.

Permasalahan balita stunting di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2024 dimana prevalensi balita stunting ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024.

Tabel 3. 3. Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Kesehatan

No	Indikator Utama	Aspek Analisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektifitas	Relevansi Perkembangan
1	Angka Kematian Ibu	-	Naik	Tidak Efektif	-
2	Angka Kematian Bayi	-	turun	Efektif	-
3	Angka Harapan Hidup	Lebih tinggi	Naik	Efektif	Relevan
4	Prevalensi Stunting	-	turun	Efektif	-

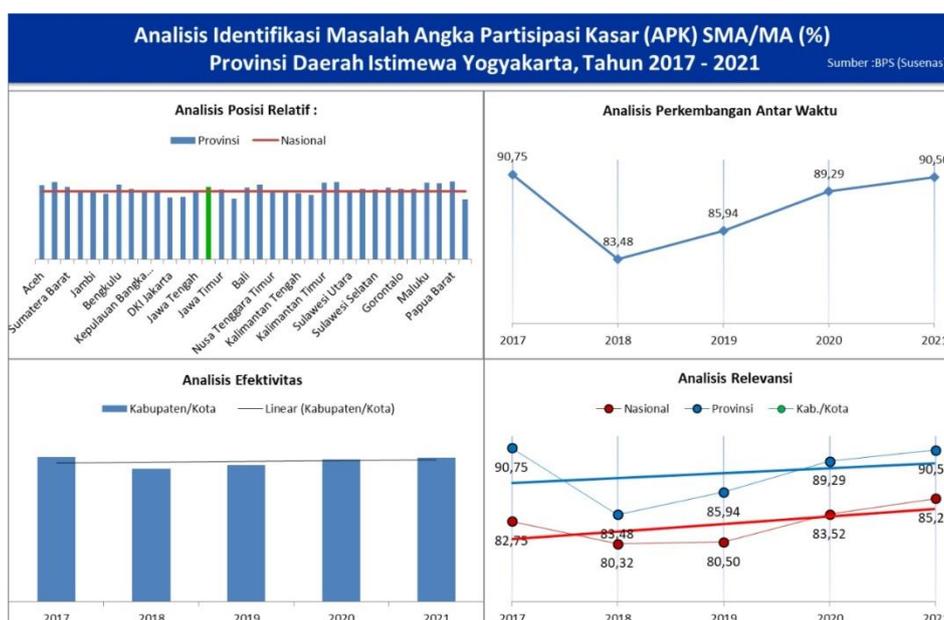
Dari analisis karakteristik masalah bidang kesehatan, didapatkan indikator utama yang perlu perbaikan adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Prevalensi Balita Stunting.

3.4. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Pendidikan

Analisis karakteristik masalah bidang pendidikan meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

3.4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA

APK SM+MA adalah proporsi siswa sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.



a. Analisis Posisi Relatif

Berdasarkan grafik tersebut, APK SMA/MA DIY Tahun 2020 sebesar 89,29 persen, angka tersebut lebih tinggi dari pada APK tingkat Nasional sebesar 83,52 persen. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, maka APK SMA/MA di DIY tertinggi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

b. Perkembangan Antar Waktu

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa APK SMA/MA DIY secara keseluruhan waktu menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2017 sebesar 90,75 persen menjadi 108,22 persen pada tahun 2021. Penurunan pernah terjadi pada tahun 2018 dari angka 90,75 persen pada tahun 2017 turun menjadi 83,48 persen pada tahun 2018.

c. Efektivitas

Berdasarkan grafik tersebut, APK SMA/MA DIY tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan ini menunjukkan hasil yang efektif dan adanya perbaikan serta Pelayanan Pendidikan di DIY. Tahun 2021 APK SMA/MA lebih

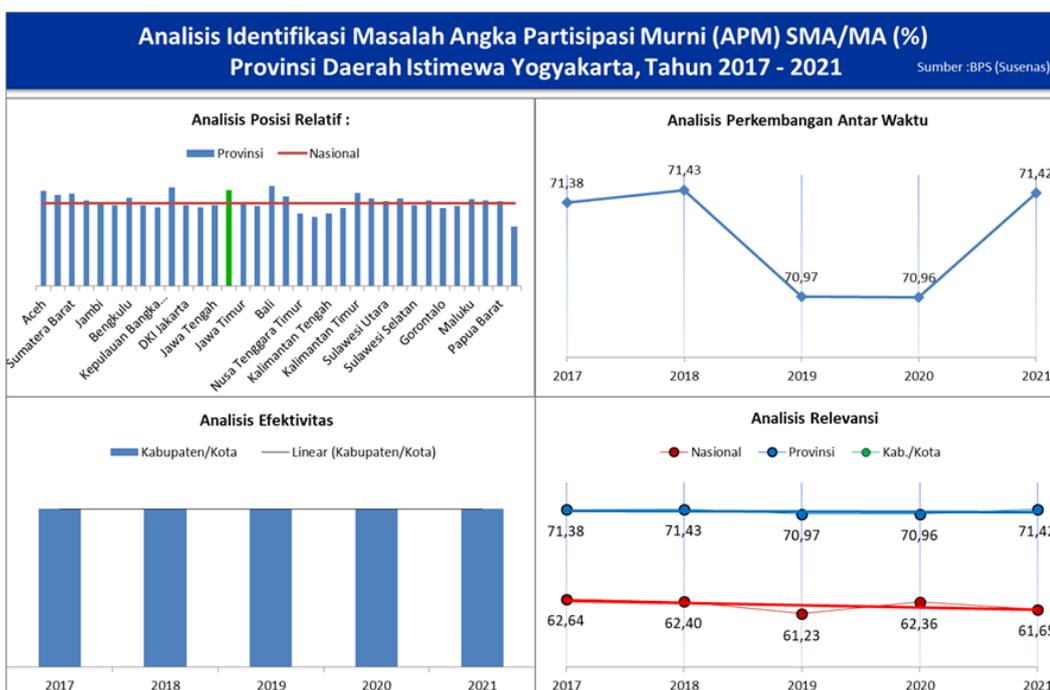
dari 100 persen, kondisi ini menunjukkan bahwa Pemda DIY mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya untuk tingkat SMA/MA.

d. Relevansi Perkembangan

Berdasarkan grafik tersebut, menunjukkan bahwa tren APK SMA/MA tahun 2017–2021 nasional relatif stagnan berbeda halnya dengan APK SMA/MA tahun 2017–2021 DIY yang meningkat. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa capaian APK SMA/MA DIY kurang relevan dengan capaian APK SMA/MA di tingkat nasional.

3.4.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA

APM SMA/MA adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SMA/MA dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Berbeda dengan APK, APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.



a. Analisis Posisi Relatif

Data mengindikasikan capaian APM SMA/MA DIY tahun 2021 lebih tinggi dari capaian nasional maupun provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Capaian APM SMA/MA DIY sebesar 71,42 persen, lebih tinggi dari nasional yang hanya 61,65 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi jumlah penduduk usia SMA /sederajat (16-18 tahun) yang menjalani studi di SMA/sederajat relatif tinggi.

b. Perkembangan Antar Waktu

Angka Partisipasi Murni (APM) DIY cenderung meningkat dengan fluktuasi yang dapat dikatakan kecil pada periode 2017–2021. Penurunan terjadi pada tahun 2019 dan

2020. Kondisi masa pandemi cenderung disertai dengan penurunan tipis angka APM SMA/MA. Kenaikan besar terjadi pada tahun 2021 yang awalnya 70,96 pada tahun 2020 menjadi 78,26 pada tahun 2021. Secara keseluruhan capaian APM SMA/MA ini terlihat semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Hal tersebut ditunjukkan dari angka APM SMA/MA yang cenderung lebih rendah daripada APM SMP/MTs dan APM SD/MI. Hal ini karena adanya kasus terlambat sekolah, tinggal kelas dan tidak melanjutkan sekolah baik untuk jenjang SD, jenjang SMP dan SMA.

c. Efektivitas

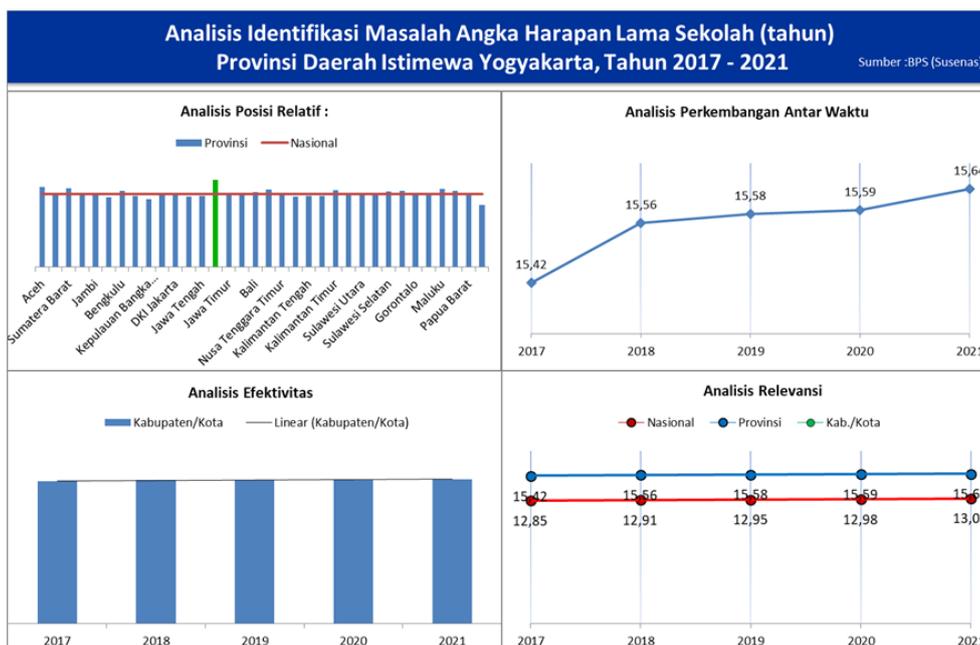
APM SMA/MA DIY cenderung menaik tipis pada periode 2017–2021. Pada periode tersebut terjadi tren meningkat, hal tersebut terlihat pada tahun 2017 APM SMA/MA DIY sebesar 71,38 kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 78,26. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan Pelayanan Pendidikan di DIY serta upaya pada capaian APM SMA DIY cukup efektif.

d. Relevansi Perkembangan

Pada periode 2017–2021, pola pergerakan APM DIY berbeda dengan APM SMA/MA secara nasional. Hal ini mengindikasikan program peningkatan partisipasi Pendidikan, khususnya tingkat menengah atas, DIY yang cenderung kurang relevan atau kurang selaras dengan program di tingkat nasional.

3.4.3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah diukur dari lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perhitungan Angka HLS berlaku bagi penduduk berusia 7 tahun ke atas.



a. Analisis Posisi Relatif

Posisi relatif angka harapan lama sekolah pada tahun 2021 posisi DIY paling tinggi diantara provinsi lainnya, dan posisinya di atas tingkat nasional. Posisinya pada tahun 2021 sebanyak 15.64 sedangkan nasional posisinya pada titik 13,08.

b. Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan antar waktu pada angka harapan lama sekolah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berprogres cenderung naik, pada tahun 2017 angka harapan lama sekolah sebesar 15,42, tahun 2018 mengalami kenaikan pada titik 15,56, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 15,58 tahun 2020 juga mengalami kenaikan pada titik 15,59 dan data terakhir pada tahun 2021 angka harapan lama sekolah sebesar 15,64.

c. Efektivitas

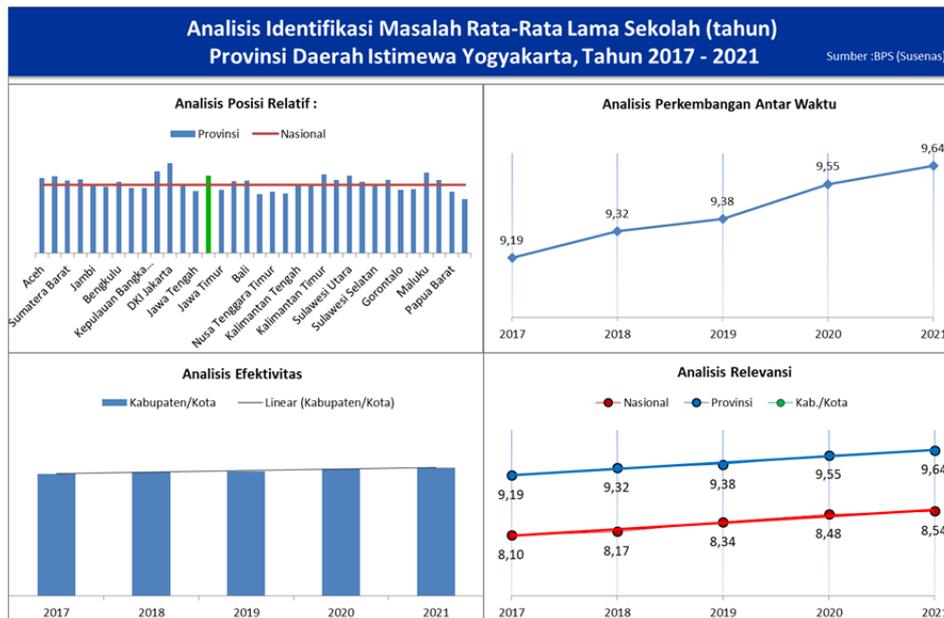
Analisis efektivitas angka harapan lama sekolah sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 cenderung mengalami perbaikan dan peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 15,42 tahun 2018 sebesar 15,56 pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar 15,58, tahun 2020 juga mengalami kenaikan meskipun hanya 0,01 sebesar 15,59 dan pada tahun terakhir tahun 2021 sebesar 15,64.

d. Relevansi Perkembangan

Relevansi perkembangan pada angka harapan lama sekolah pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami progres secara naik dan berada pada tingkat nasional serta menunjukkan kenaikan.

3.4.4. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Capaian RLS mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).



a. Analisis Posisi Relatif

Posisi relatif rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 posisi DIY di atas tingkat nasional. Posisinya pada tahun 2021 pada titik 9.64 sedangkan nasional posisinya pada titik 8,54.

b. Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan antar waktu pada rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berprogres cenderung naik, pada tahun 2017 angka rata-rata lama sekolah sebesar 9.19, tahun 2018 mengalami kenaikan pada titik 9.32, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 9.55 tahun 2020 juga mengalami kenaikan pada titik 9.55 dan data terakhir pada tahun 2021 angka harapan lama sekolah sebesar 9,64.

c. Efektivitas

Analisis efektivitas rata-rata lama sekolah sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 cenderung mengalami perbaikan dan peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 9.19 tahun 2018 sebesar 9.32 pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar 9.38, tahun 2020 juga mengalami kenaikan meskipun hanya 0,17 sebesar 9.55 dan pada tahun terakhir tahun 2021 sebesar 9,64.

d. Relevansi Perkembangan

Relevansi perkembangan pada analisis relevansi rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami progres secara naik dan berada pada tingkat nasional serta menunjukkan kenaikan.

3.4.5. Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Pendidikan

Secara ringkas, analisis kemiskinan bidang pendidikan disajikan pada tabel di bawah ini. APK SMA/MA yang menunjukkan lebih tinggi dari nasional, hal tersebut juga didukung dengan perkembangan antar waktu APK SMA/MA yang cenderung meningkat.

Program kebijakan terkait APK SMP/MTs juga efektif terlihat dari pola yang meningkat. Kondisi kurang relevan dengan capaian di tingkat nasional, hal tersebut disebabkan pada tingkat nasional cenderung stagnan.

Dilihat dari perkembangan antar waktu APM SMA/MA menunjukkan fluktuatif, meskipun pada tahun 2021 ada kenaikan yang cukup signifikan. APM SMA/MA menunjukkan perbaikan dan efektif yang ditunjukkan dari adanya peningkatan. Namun, APM SMA/MA sama –sama menunjukkan kondisi kurang relevan dengan capaian di tingkat nasional.

Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah keduanya sama-sama menunjukkan posisi yang lebih tinggi dari tingkat nasional. Perkembangan antar waktu kedua indikator tersebut juga progresif, cenderung meningkat, hal tersebut tentu mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di DIY telah baik. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah saling menunjukkan perbaikan serta relevannya di tingkat nasional.

Tabel 3. 4. Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Pendidikan

No	Indikator	Aspek yang Dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan antar Waktu	Efektifitas	Relevansi
1	APK SMA/MA	Lebih tinggi dari nasional	Cenderung meningkat	Efektif	Kurang relevan
2	APM SMA/MA	Lebih tinggi dari nasional	Fluktuatif	Efektif	Relevan
3	Harapan Lama Sekolah	Jauh lebih tinggi dari nasional	Progresif, cenderung meningkat	Berprogres dan menemui perbaikan meskipun lambat	Relevan
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Jauh lebih tinggi dari nasional	Progresif, cenderung meningkat	Berprogres dan menemui perbaikan meskipun lambat	Relevan

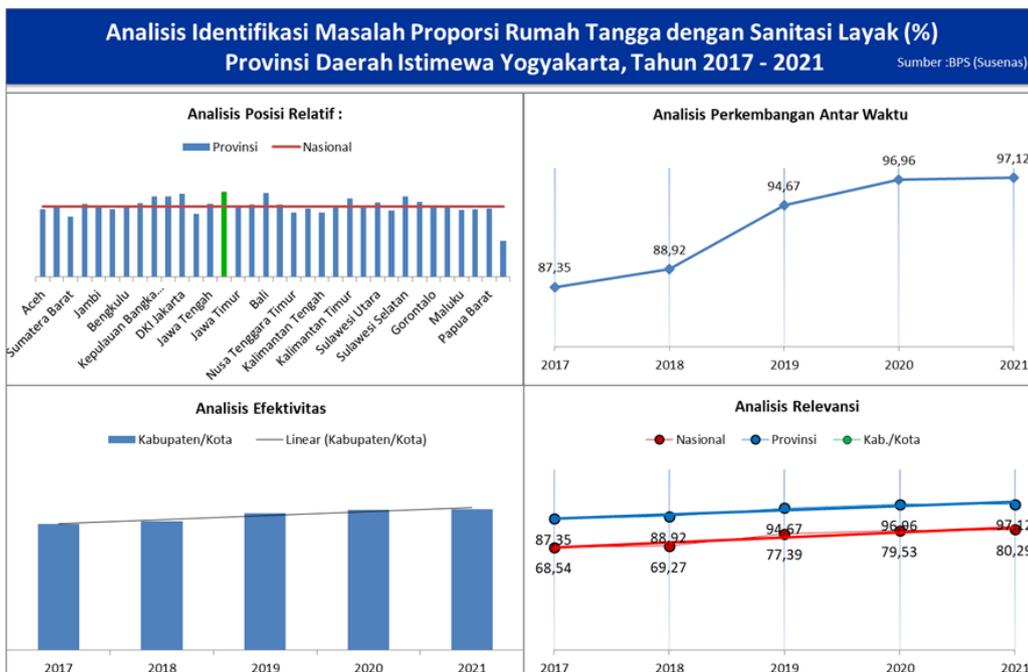
Dari analisis karakteristik masalah bidang pendidikan, didapatkan indikator utama yang perlu perbaikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MK, meskipun posisinya yang sudah diatas nasional namun posisi DIY yang masih di poin 70% sehingga perlu perhatian khusus.

3.5. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Infrastruktur Dasar

3.5.1. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga. Sanitasi dianggap layak apabila memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Indikator ini digunakan untuk mengukur rumah tangga yang memiliki akses terhadap

layanan sanitasi layak dan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.



a. Analisis Posisi Relatif

Secara relatif, proporsi rumah tangga dengan sanitasi yang layak di DIY lebih tinggi daripada Nasional. Di DIY sebanyak 97.12% rumah tangga telah memiliki layanan sanitasi yang layak, sedangkan di Nasional proporsinya masih sebesar 80.29. DIY bahkan menduduki peringkat pertama terkait proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak pada tahun 2021. Ditinjau dari aspek ini, rumah tangga di DIY jauh lebih sejahtera dibandingkan dengan penduduk di daerah lain.

b. Perkembangan Antar Waktu

Proporsi rumah tangga di DIY yang memiliki layanan sanitasi layak meningkat sangat pesat selama lima tahun terakhir, 2017-2021. Kenaikan proporsi tersebut hampir sebesar 10%. Kenaikan tajam terutama terjadi pada periode 2019 yang meningkat sebesar hampir 6% dalam kurun waktu satu tahun. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dalam periode ke depan diharapkan seluruh rumah tangga di DIY telah memiliki layanan sanitasi yang layak. Tinggal terdapat kurang dari 3% rumah tangga yang layanan sanitasinya belum layak yang dapat berpotensi untuk menimbulkan gangguan penyakit bagi rumah tangga tersebut.

c. Efektivitas

Selama periode 2017 sampai dengan 2021, program pemerintah untuk menyelenggarakan infrastruktur dasar berupa sanitasi layak sangat efektif peningkatan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak. Secara rata-rata program tersebut efektif meningkatkan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak sebesar 2.76% per tahun.

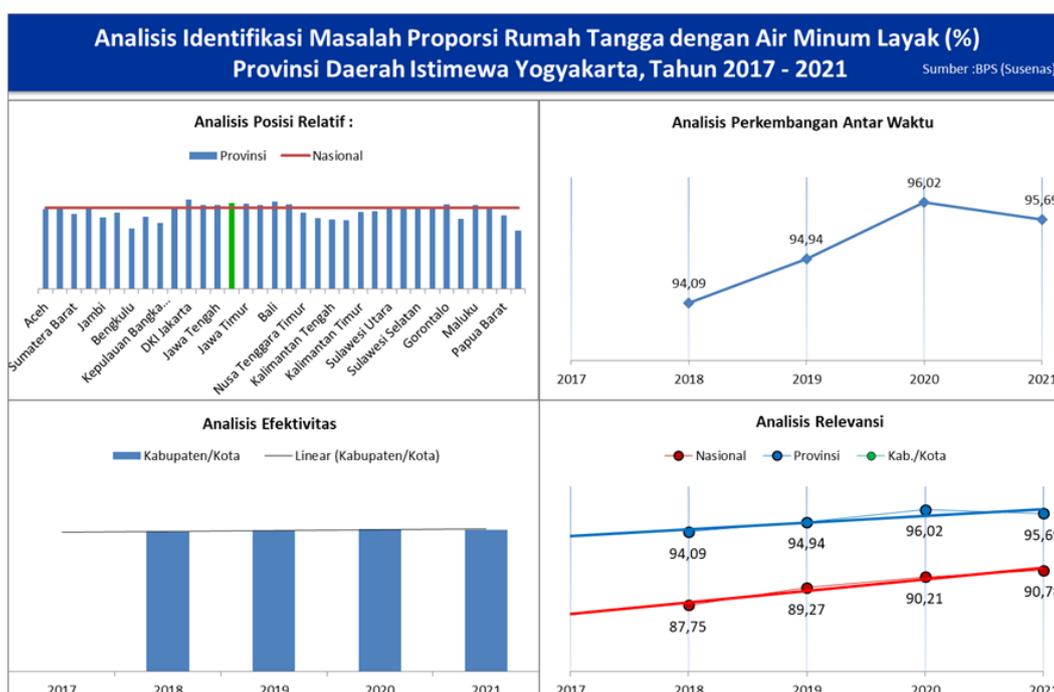
Capaian program ini diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga dalam kurun waktu dekat, semua rumah tangga diharapkan telah memiliki layanan sanitasi layak dan dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dari aspek layanan infrastruktur dasar ini.

d. Relevansi Perkembangan

Kecenderungan perkembangan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di DIY juga relevan dengan perkembangan yang terjadi di Nasional. Fluktuasi pergerakan keduanya hampir mirip setiap tahunnya namun dengan besaran proporsi yang berbeda. Peningkatan pesat pada skala Nasional juga terjadi pada periode 2019 yang mengalami peningkatan lebih dari 8% daripada periode sebelumnya, 2018. Peningkatan ini bahkan lebih tinggi daripada yang terjadi di DIY sebesar hampir 6%. Perkembangan yang sangat positif ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena layanan sanitasi merupakan salah satu aspek utama kesejahteraan rumah tangga sehingga diharapkan dapat mengurangi kemiskinan.

3.5.2. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Sumber air minum layak merupakan air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Sumber air minum layak mencerminkan akses penduduk terhadap sumber air berkualitas sehingga aman untuk diminum dan tidak menimbulkan penyakit. Semakin besar proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga dan kemiskinan di suatu daerah.



a. Analisis Posisi Relatif

Pada tahun 2021, proporsi rumah tangga di DIY yang memiliki akses air minum layak sebesar 95.69%. Dengan angka ini, menempatkan DIY pada peringkat teratas ketiga proporsi rumah tangga dengan air minum layak setelah Propinsi DKI Jakarta dan Bali pada peringkat pertama dan kedua. Adapun secara Nasional, capaian proporsi rumah tangga dengan air minum layak masih berada pada angka 90.78%. Dengan demikian, capaian DIY berada di atas rata-rata capaian Nasional.

b. Perkembangan Antar Waktu

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses layanan air minum layak cenderung meningkat selama periode lima tahun 2017-2021. Peningkatan tajam terjadi pada tahun 2018 dimana proporsinya meningkat sekitar 17% dibandingkan periode sebelumnya 2017. Setelahnya peningkatan proporsi berjalan cukup lambat bahkan pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan meskipun tidak signifikan.

c. Efektivitas

Program pemerintah terkait dengan penyelenggaraan dan penyediaan akses layanan air minum layak telah berjalan secara efektif. Kenaikan proporsi rumah tangga dengan air minum layak secara rata-rata sebesar 3.89% per tahunnya. Rata-rata kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan proporsi yang tajam dari tahun 2017 ke tahun 2018. Capaian yang baik ini perlu ditingkatkan karena masih terdapat sekitar 5% rumah tangga di DIY yang belum memiliki akses layanan air minum layak. Hal ini dapat mengancam kondisi kesejahteraannya karena air minum merupakan salah satu kebutuhan esensial. Jika air yang dikonsumsi tidak sehat maka dapat mempengaruhi status gizi dan masalah kesehatan rumah tangga tersebut. Upaya pengentasan kemiskinan akan lebih sulit dilakukan jika mereka belum memiliki akses terhadap layanan air minum sehat.

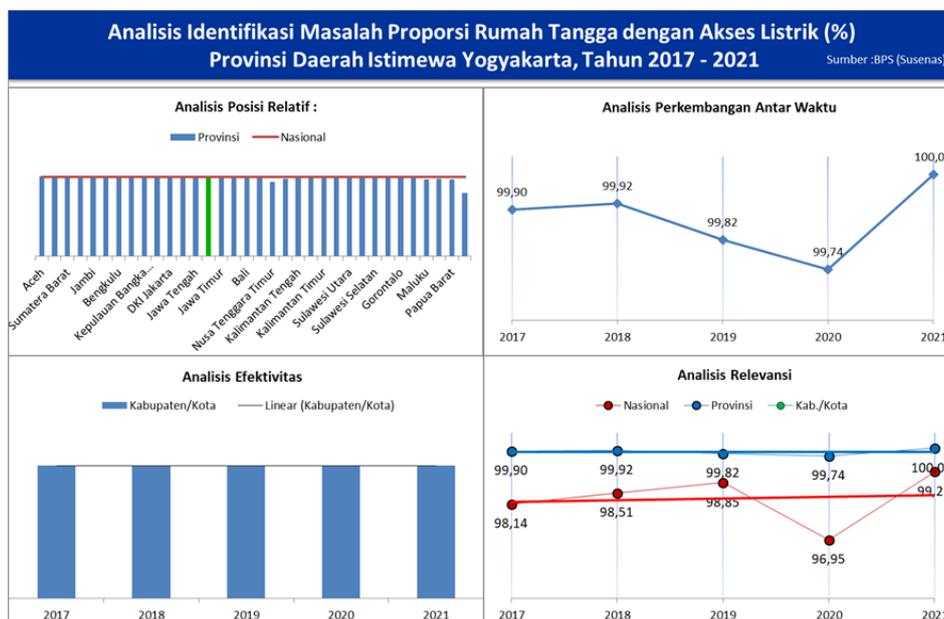
d. Relevansi Perkembangan

Dinamika proporsi rumah tangga dengan air minum layak yang terjadi di DIY juga sama persis terjadi pada skala Nasional. Pada skala Nasional, peningkatan tajam juga terjadi pada tahun 2018 meskipun peningkatannya tidak sebesar yang terjadi di DIY. Pola yang sama pada keduanya dapat mengindikasikan adanya kebijakan berskala nasional dalam penyelenggaraan dan penyediaan akses layanan air minum layak. Namun demikian, perkembangan pada periode-periode selanjutnya berjalan relatif lambat.

3.5.3. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik

Proporsi rumah tangga dengan sumber penerangan listrik merupakan persentase jumlah rumah tangga yang memiliki sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN maupun non-PLN. Sumber listrik non-PLN meliputi listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan

pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan. Ketersediaan sumber penerangan listrik dapat menggerakkan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta aktifitas ekonomi lokal di suatu daerah. Dengan demikian elektrifikasi ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan kemiskinan.



a. Analisis Posisi Relatif

Pada tahun 2021, sebanyak 100% atau seluruh rumah tangga yang berada di DIY telah memiliki sumber penerangan dari listrik. Selain DIY, seluruh rumah tangga di Propinsi DKI Jakarta juga telah memiliki akses layanan listrik. Secara nasional, proporsi rumah tangga dengan akses listrik sudah sangat tinggi yaitu sebesar 99.21%. Dengan demikian, tinggal sedikit lagi rumah tangga yang belum memiliki akses layanan listrik di Indonesia. Capaian ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengentasan kemiskinan baik di DIY maupun Indonesia secara keseluruhan.

b. Perkembangan Antar Waktu

Elektrifikasi seluruh rumah tangga di DIY baru tercapai pada tahun 2021. Meskipun demikian proporsi rumah tangga dengan akses penerangan listrik pada periode-periode sebelumnya sudah sangat tinggi mendekati 100%. Pada periode 2019 dan 2020, proporsi tersebut sempat mengalami penurunan yang tidak signifikan sebelum akhirnya mencapai 100% pada 2021. Setelah seluruh rumah tangga terelektifikasi, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengoptimalkan ketersediaan listrik ini untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan rumah tangga sehingga berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan.

c. Efektivitas

Kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan dan menyediakan layanan infrastruktur dasar listrik telah berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh rumah

tangga di DIY telah terelektifikasi mulai pada tahun 2021. Capaian ini perlu dipertahankan untuk menunjang percepatan pengentasan kemiskinan di DIY.

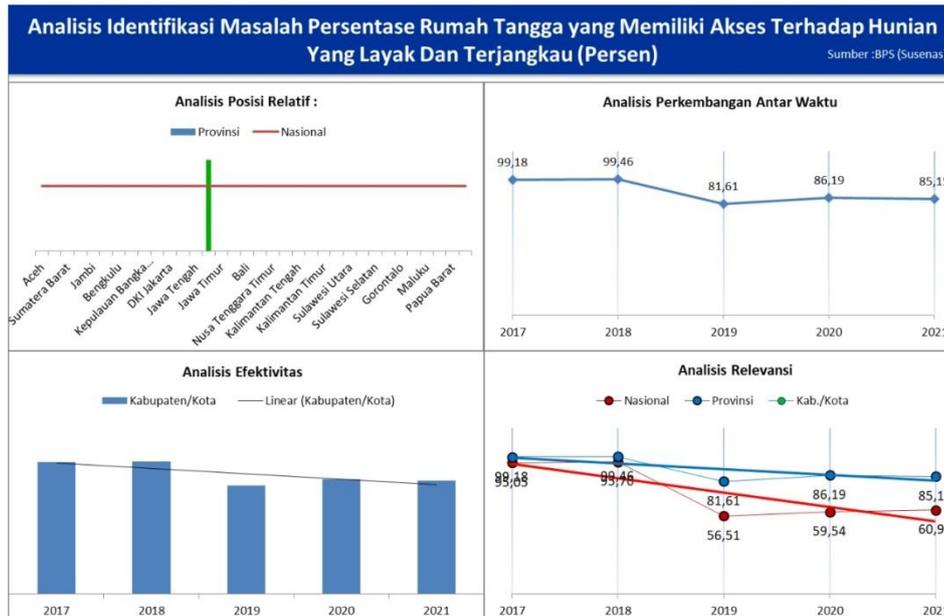
d. Relevansi Perkembangan

Secara umum perkembangan terkait proporsi rumah tangga dengan akses listrik di DIY sama dengan perkembangan yang terjadi secara Nasional. Meskipun demikian, dinamika yang terjadi di DIY tidak setinggi seperti yang terjadi di skala Nasional. Setelah mengalami kenaikan secara bertahap dari tahun 2017 ke 2019, elektrifikasi Nasional secara rata-rata turun hampir 2 persen di tahun 2020 sebelum meningkat kembali pada angka 99.21%.

3.5.4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau

Perumahan dan permukiman yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar seperti halnya pendidikan dan kesehatan yang pemenuhannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28(h). Komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan dasar tersebut juga sejalan dengan Agenda Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals) atau yang dikenal dengan SDGs, terutama Goals 6.1.1 (akses air minum); Goals 6.2.1 (akses sanitasi); dan Goals 11.1.1 (akses rumah layak huni). Wujud komitmen Pemerintah Indonesia kemudian ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan perlunya sinergi SDGs dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah. Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- a. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (sufficient living space)
- b. Memiliki akses terhadap air minum layak
- c. Memiliki akses terhadap sanitasi layak
- d. Ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah.



a. Analisis Posisi Relatif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase rumah tangga yang memiliki akses hunian layak dan terjangkau nasional pada 2020 naik 3,03%. Tahun 2019, persentase akses hunian layak dan terjangkau 56,51% meningkat menjadi 59,54% pada 2020. Dan di Tahun 2021, capaian nasional sudah di angka 60,90%. Posisi ini masih dibawah posisi DIY yaitu 85,15%. Pada 2020, Yogyakarta tercatat sebagai provinsi yang memiliki persentase tertinggi terhadap akses hunian layak dan terjangkau di tanah air yakni 86,19%. Disusul oleh Provinsi Bali dengan persentase 77,05%. Sementara itu, persentase terendah dimiliki oleh Papua yakni hanya 28,56% dan Kepulauan Bangka Belitung berada di posisi selanjutnya dengan 30,64%.

b. Perkembangan Antar Waktu

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses hunian layak dan terjangkau pada periode sebelum tahun 2019 sudah sangat tinggi mendekati 100%. Pada periode 2019 sampai dengan 2021, proporsi tersebut sempat mengalami penurunan yang tidak signifikan. Naik kembali di sampai ke tahun 2021 dengan kenaikan yang lambat.

c. Efektivitas

Kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan dan menyediakan hunian layak dan terjangkau telah berjalan efektif namun tetap memerlukan upaya percepatan. Terutama untuk peningkatan kualitas untuk hunian yang sudah ada.

d. Relevansi Perkembangan

Secara umum perkembangan terkait Proporsi rumah tangga yang memiliki akses hunian layak dan terjangkau di DIY sama dengan perkembangan yang terjadi secara Nasional.

Meskipun demikian, dinamika yang terjadi di DIY tidak setinggi seperti yang terjadi di skala Nasional.

3.5.5. Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar

Secara ringkas, analisis kemiskinan bidang infrastruktur dasar disajikan dalam tabel di bawah ini. Dari ketiga indikator utama bidang infrastruktur yaitu proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak, air minum layak dan akses listrik menunjukkan bahwa capaian DIY lebih tinggi daripada Nasional. Selain itu, capaian indikator tersebut semakin meningkat setiap periodenya. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa program pemerintah terkait dengan penyediaan layanan infrastruktur dasar tersebut telah berjalan efektif. Dinamika yang terjadi di DIY juga terjadi pada skala Nasional yang mengindikasikan bahwa kebijakan layanan infrastruktur dasar ini merupakan kebijakan nasional. Tantangan dalam waktu dekat adalah bagaimana meningkatkan layanan sanitasi layak dan air minum layak sehingga 100% atau seluruh rumah tangga di DIY dapat menikmati layanan tersebut. Dengan demikian, angka kemiskinan yang disebabkan oleh permasalahan bidang infrastruktur dasar dapat ditekan sekecil mungkin.

Tabel 3. 5. Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar

No	Indikator Utama	Aspek Analisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektifitas	Relevansi Perkembangan
1	Proporsi RT Dengan Sanitasi Layak	Lebih tinggi	Naik	Efektif	Relevan
2	Proporsi RT Dengan Air Minum Layak	Lebih tinggi	Naik	Efektif	Relevan
3	Proporsi RT Dengan Akses Listrik	Lebih tinggi	Naik	Efektif	Relevan
4	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Lebih tinggi	Naik	Kurang Efektif	Relevan

Dari analisis karakteristik masalah bidang infrastruktur dasar, didapatkan indikator utama yang perlu perbaikan adalah Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

3.6. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Kesetaraan Gender

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

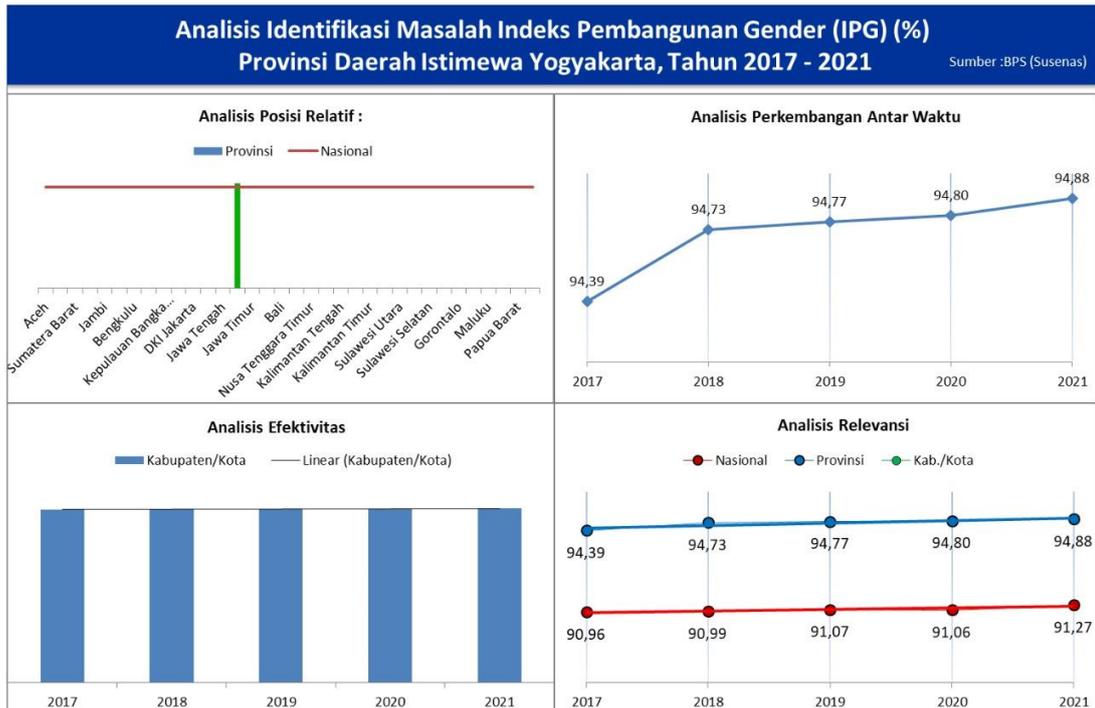
Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi indikator utama untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender.

3.6.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender atau yang biasa disebut dengan IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index (GDI)* dan *Human Development Indeks (HDI)* pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia (BPS, 2022).

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna (BPS, 2022). Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (ii) Pengetahuan (*knowledge*), dan (iii) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna (Seriusa BPS, 2022).



a. Analisis Posisi Relatif

Pada tahun 2021, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di DIY sudah melebihi capaian nasional yaitu 91,27%. Meskipun kenaikan IPG lambat namun posisi beberapa tahun terakhir sudah mendekati 100%.

b. Perkembangan Antar Waktu

Melihat perkembangan indeks pembangunan gender dalam persen setiap tahunnya cenderung naik. Pada tahun 2017 angkanya berada pada titik 94.39%, pada tahun 2018 terdapat kenaikan tingkatannya cukup tajam dan hal ini menandakan peningkatan pembangunan gender yakni berada pada 94.73% tahun 2019 berada pada titik 94.77%. Tahun 2020 juga terjadi peningkatan sampai titik 94.80%. Peningkatan selanjutnya pada tahun 2021 sebesar 94.88%.

c. Efektivitas

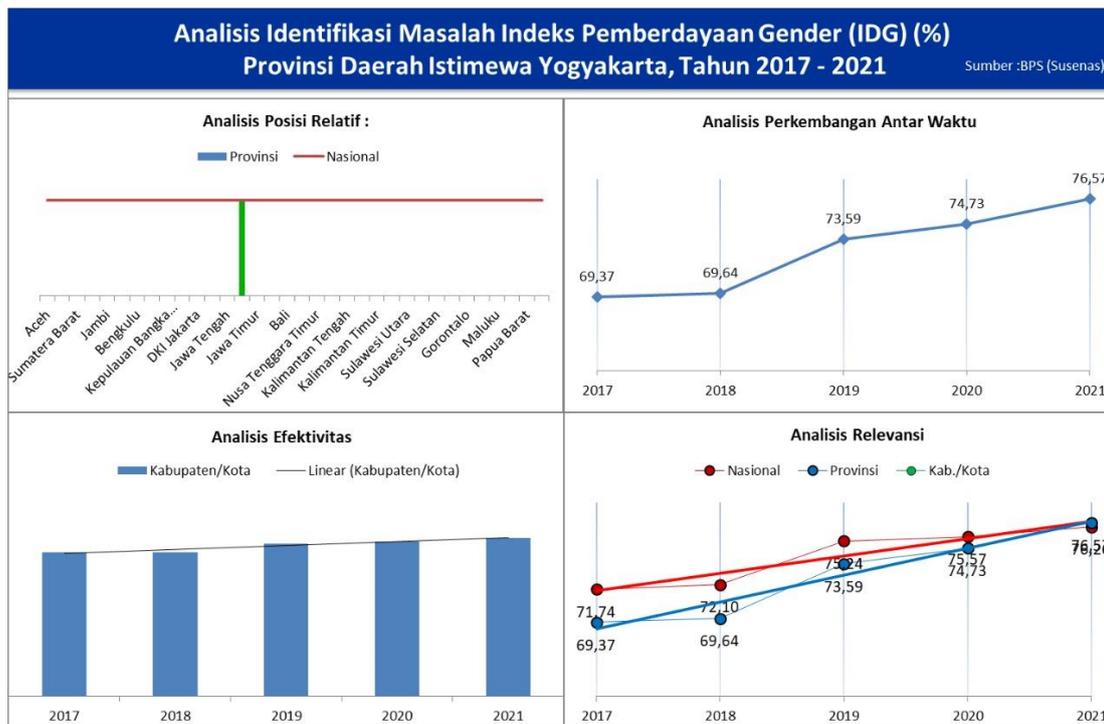
Terkait dengan efektivitas dalam indeks pembangunan gender secara umum menunjukkan perbaikan pada tahun 2017 angka IPG sebesar 94.39%, sedangkan pada tahun 2018 meningkat sebesar 94.73%. Tahun 2019 terjadi peningkatan kembali sebanyak 94.77%, tahun 2020 sebesar 94.80 sedangkan pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan pada titik 94.88%.

d. Relevansi Perkembangan

Relevansi indeks pembangunan gender (IPG) pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami progres secara naik dan berada pada tingkat nasional serta menunjukkan kenaikan dan keselarasan.

3.6.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi.



a. Analisis Posisi Relatif

Pada tahun 2021, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di DIY sebesar 76,57%. Posisi ini tidak jauh dengan posisi Nasional di 76,26%.

b. Perkembangan Antar Waktu

Melihat perkembangan indeks pemberdayaan gender dalam persen setiap tahunnya cenderung naik. Pada tahun 2017 angkanya berada pada titik 69,37%, pada tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 0,27% yakni berada pada titik 69,64%. Pada tahun 2019 tingkatannya cukup tajam dan hal ini menandakan peningkatan pembangunan gender yakni berada di titik 73,59%, peningkatan tahun 2019 paling tinggi sejauh 5 tahun *time series* yakni sebesar 3,95%. Tahun 2020 juga terjadi peningkatan sampai titik 74,73%. Peningkatan selanjutnya pada tahun 2021 sebesar 76,57%.

c. Efektivitas

Terkait dengan efektivitas dalam indeks pemberdayaan gender secara umum menunjukkan perbaikan pada tahun 2017 angka IPG sebesar 69,37%, sedangkan pada tahun 2018 meningkat sebesar 69,64%. Tahun 2019 terjadi peningkatan kembali

sebanyak 73,59%, tahun 2020 sebesar 74,73 sedangkan pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan pada titik 76,57%.

d. Relevansi Perkembangan

Relevansi indeks pemberdayaan gender (IDG) pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami progres secara naik dan berada pada tingkat nasional serta menunjukkan kenaikan dan keselarasan.

3.6.3. Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Kesetaraan Gender

Secara ringkas, analisis kemiskinan bidang kesetaraan gender pada indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) disajikan pada tabel di bawah ini. Indikator IPD dan IDG dalam rentang waktu 2017-2021 menunjukkan progres peningkatan. Selain itu indikator IPG dan IDG juga menunjukkan titik perbaikan, hal tersebut mengindikasikan bahwa program kebijakan terkait IPD dan IDG telah efektif. Kondisi ini juga relevan dengan capaian di tingkat nasional.

Tabel 3. 6. Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Gender

No	Indikator	Aspek yang Dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan antar Waktu	Efektifitas	Relevansi
1	IPG	Lebih tinggi	Meningkat	Berprogres dan menemui perbaikan meskipun lambat	Relevan
2	IDG	Lebih tinggi	Meningkat	Berprogres dan menemui perbaikan	Relevan

Dari analisis karakteristik masalah bidang kesetaraan gender, didapatkan indikator utama yang perlu perbaikan adalah Indeks Pemberdayaan Gender.

3.7. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Kesejahteraan Sosial

3.7.1. Jumlah Penduduk Disabilitas

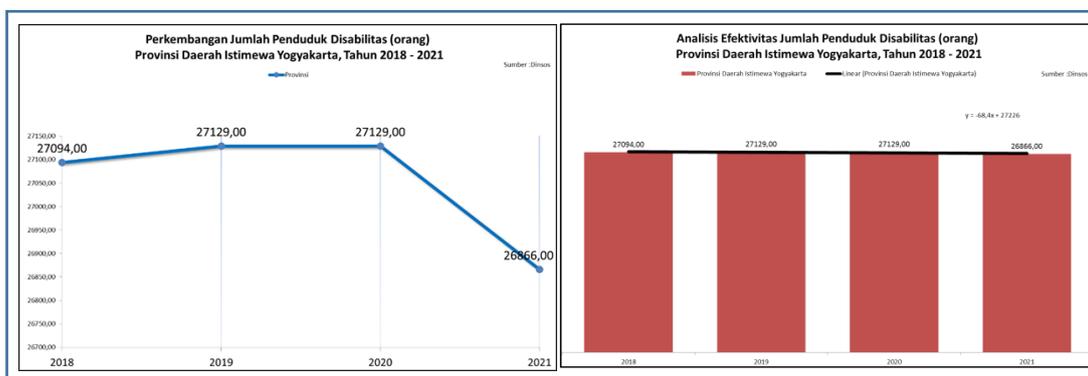
Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial. Penyandang Disabilitas juga memiliki hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

Dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas Pemerintah Daerah juga turut mendorong dan memfasilitasi, beberapa diantaranya yaitu memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha dan juga Pemerintah Daerah mendorong penyandang disabilitas untuk mendapat akses permodalan ataupun fasilitas yang memadai. DIY adalah wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Semua jenis bencana alam yang

terjadi antara lain gempa vulkanik, gempa tektonik, tsunami, angin ribut, banjir atau tanah longsor telah menyebabkan banyaknya penyandang disabilitas di DIY.

Populasi penyandang disabilitas di DIY jumlahnya terus meningkat. Peningkatan ini terjadi secara signifikan khususnya pasca bencana gempa bumi pada bulan Mei 2006. Peningkatan populasi yang paling nyata terjadi di Kabupaten Bantul. Warga yang menjadi korban gempa banyak yang menderita kecacatan. Ratusan orang menjadi paraplegi yang mengakibatkan sebagian besar waktunya harus berada di kursi roda. Kondisi kehidupan para penyandang disabilitas masih memprihatinkan. Penyandang disabilitas sebagian besar berada dalam keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dan disabilitas memang menjadi dua masalah yang sulit untuk dipisahkan. Seorang ibu yang berasal dari keluarga miskin dalam beberapa kasus tidak tercukupi kebutuhan gizinya selama hamil serta sesudah melahirkan anak-anaknya juga mengalami gizi yang kurang sehingga akan mengakibatkan anak menjadi penyandang disabilitas.

Dalam perkembangannya, disabilitas itu sendiri sebagian besar akan mengakibatkan kemiskinan. Penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi bahkan harus bergantung pada orang lain. Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, serta aksesibilitas.



- a. Analisis Posisi Relatif (data nasional dan data provinsi lain tidak ada)
- b. Perkembangan Antar Waktu

Berdasarkan grafik perkembangan antar waktu jumlah penduduk disabilitas DIY, Tahun 2018-2021 menunjukkan tren yang cenderung menurun meski dalam beberapa tahun

terakhir, yakni 2018 hingga 2019 mengalami sedikit kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan untuk menentukan program yang dijalankan oleh Pemerintah DIY sudah tepat sasaran sehingga pada periode tahun 2020 sampai tahun 2021 jumlah penduduk disabilitas menurun. Pemerintah saat ini mempunyai komitmen yang kuat untuk menyediakan layanan jaminan kesehatan baik melalui skema jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan sosial maupun jaminan kesehatan daerah. Pada kenyataannya, tidak mudah bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas tersebut. Informasi tentang adanya jaminan kesehatan tersebut banyak yang belum dipahami oleh keluarga penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang sudah mempunyai kartu juga masih menghadapi persoalan dengan mobilitas ke unit pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang menjadi alasan utama harus ada Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas.

c. Efektivitas

Berdasarkan grafik Analisis Efektivitas jumlah penduduk disabilitas DIY, Tahun 2018-2021 cenderung tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan DIY dalam hal Peningkatan fasilitasi terhadap penyandang disabilitas sudah cukup efektif.

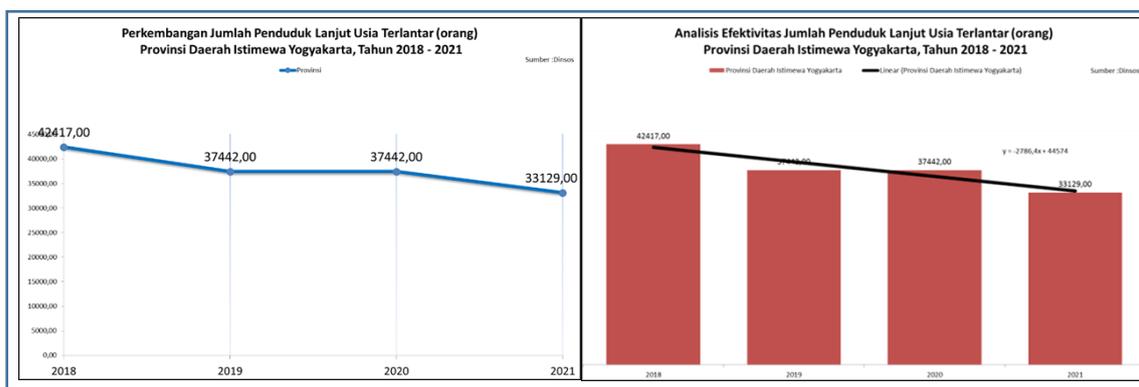
d. Relevansi (data nasional dan data provinsi lain tidak ada)

3.7.2. Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar

Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. DIY merupakan salah satu provinsi yang memiliki persentase populasi Lanjut Usia tinggi di Indonesia. Persentase Lanjut Usia di Daerah Istimewa Yogyakarta telah melebihi proyeksi persentase jumlah Lanjut Usia di tingkat nasional. Meningkatnya jumlah Lanjut Usia diproyeksikan akan terus berlangsung dari tahun ke tahun sebagai salah satu dampak dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk di Daerah. Seiring dengan meningkatnya jumlah Lanjut Usia tentu saja akan memunculkan persoalan-persoalan di Daerah. Persoalan yang akan dialami dengan meningkatnya jumlah Lanjut Usia tersebar dalam berbagai macam bidang/sector. Bidang atau sector tersebut erat kaitannya dengan pelayanan yang harus didapatkan oleh Lanjut Usia. Terdapat delapan aspek yang perlu diberikan pelayanan kepada Lanjut Usia, yaitu: 1) pelayanan keagamaan dan mental spiritual; 2) pelayanan kesehatan; 3) pelayanan kesempatan kerja; 4) pelayanan pendidikan dan pelatihan; 5) pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; 6)

pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; 7) Bantuan Sosial; dan 8) Perlindungan Sosial.

Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi munculnya kompleksitas persoalan yang terjadi dalam memenuhi Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah. Kebijakan yang dilaksanakan harus mampu menjamin Kesejahteraan dan kualitas hidup Lanjut Usia. Selain itu kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia harus diikuti dengan upaya untuk menguatkan keterlibatan Keluarga dan Masyarakat. Hal ini mengingat upaya untuk menjamin Kesejahteraan Lanjut Usia tidak semata-mata tugas Negara (Pemerintah Daerah), namun merupakan tanggung jawab dari Keluarga dan Masyarakat di Daerah. Dengan adanya tanggung jawab ini akan mampu membangun Masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai Lanjut Usia. Upaya untuk meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah memerlukan payung hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan bagi semua pihak. Untuk itu, berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk membentuk regulasi di tingkat daerah maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.



a. Analisis Posisi Relatif (data nasional dan data provinsi lain tidak ada)

b. Perkembangan Antar Waktu

Pada Grafik Perkembangan antar waktu Perkembangan Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Pada rentang waktu 2018 hingga 2021 cenderung menurun. Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2018 sebanyak 42.417 orang dan pada 2019 dan 2020 jumlah ini menurun pada angka 37.442 orang dan Kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 33.129 orang.

c. Efektivitas

Berdasarkan grafik Analisis Efektivitas Jumlah penduduk lanjut usia terlantar DIY Tahun 2018-2021 menunjukkan tren atau kecenderungan menurun walaupun pada tahun 2019 dan 2020 jumlahnya tetap sama, akan tetapi pada tahun 2021 jumlah penduduk lanjut usia terlantar mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa program-program yang

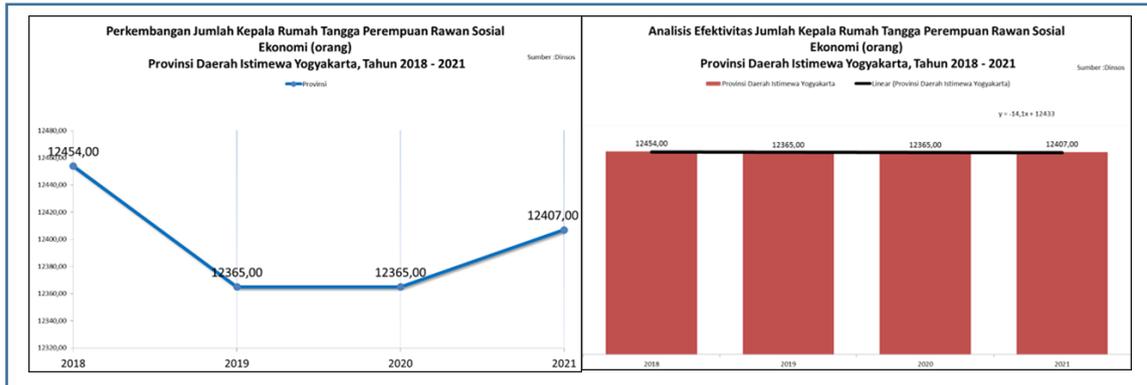
dijalankan oleh DIY dalam menyediakan fasilitas, pelayanan, serta penyelenggaraan Kesejahteraan bagi Lanjut Usia dapat dikatakan efektif.

d. Relevansi Perkembangan (data nasional dan data provinsi lain tidak ada)

3.7.3. Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi merupakan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan kehidupan sehingga menimbulkan interaksi sosial. Sosial ekonomi bisa berdampak baik dan buruk. Berdampak baik jika kesejahteraannya tinggi namun akan berdampak buruk jika kesejahteraannya rendah dan mengakibatkan kesenjangan sosial, salah satunya adalah wanita rawan sosial ekonomi yang memiliki kesejahteraan rendah, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (selanjutnya disebut WRSE) merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan, sebab salah satu faktor penyumbang kemiskinan adalah wanita rawan sosial ekonomi dimana pendapatannya dibawah rata-rata, sehingga dengan pendapatan yang rendah akan mengakibatkan kesenjangan sosial.

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) merupakan wanita dewasa yang berusia lebih dari 15 tahun keatas baik, belum menikah, sudah menikah atau janda, yang berpenghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan wanita tersebut merupakan kepala rumah tangga, kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari pendidikan yang pernah di tempuh, karena pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir setiap individu. Tuntutan ekonomi yang berat mendorong perempuan untuk mencari nafkah demi kesejahteraannya, berbagai motivasi perempuan bekerja, yaitu suami tidak memiliki penghasilan yang cukup sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan rumah tangga, sedangkan tanggungan cukup berat pada keluarganya, sehingga perempuan akan bekerja untuk mencari uang sendiri untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, wanita rawan sosial ekonomi memiliki kriteria diantaranya pencari nafkah bagi keluarganya, pendidikan rata-rata rendah, berpenghasilan sangat kurang. Dalam kasus kemiskinan terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya kemiskinan, dalam penelitian ini salah satu faktor penyumbang terjadinya kemiskinan adalah WRSE, dimana kondisi tersebut adalah wanita dengan kondisi yang kurang layak, dari segi yang dapat dilihat yaitu penghasilan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang akan berdampak pada kondisi sosial ekonomi wanita tersebut, sehingga ketika angka WRSE terus meningkat maka secara otomatis tingkat kemiskinan juga ikut meningkat.



a. Analisis Posisi Relatif (data nasional dan data provinsi lain tidak ada)

b. Perkembangan Antar Waktu

Berdasarkan grafik perkembangan antar waktu perkembangan jumlah kepala rumah tangga perempuan rawan sosial ekonomi DIY tahun 2018 hingga 2020 grafik cenderung menurun berbeda pada tahun 2020 hingga 2021 yang jumlahnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 jumlah rawan sosial ekonomi adalah sejumlah 12.545 orang lalu angka ini turun pada 2019 dan 2020 daengan jumlah 12.365 orang dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 12.407 orang. Terjadinya peningkatan pada tahun 2020 ke 2021 menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan Pemerintah DIY dalam menurunkan jumlah kepala rumah tangga perempuan rawan sosial ekonomi dapat dikatakan sudah cukup baik.

c. Efektivitas

Berdasarkan grafik analisisi efektifitas jumlah kepala rumah tangga perempuan rawan sosial ekonomi DIY tahun 2018-2021 cukup fluktuatif. Pada tahun 2018 - 2020 jumlahnya cenderung menurun, berbeda dengan tahun 2020-2021 yang cenderung meningkat, peningkatan ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengurangi jumlah kepala rumah tangga perempuan rawan sosial ekomomi sudah cukup efektif walaupun penurunanya tidak terlalu signifikan.

d. Relevansi Perkembangan (data nasional dan data provinsi lain tidak ada)

3.7.4. Jumlah Anak Terlantar

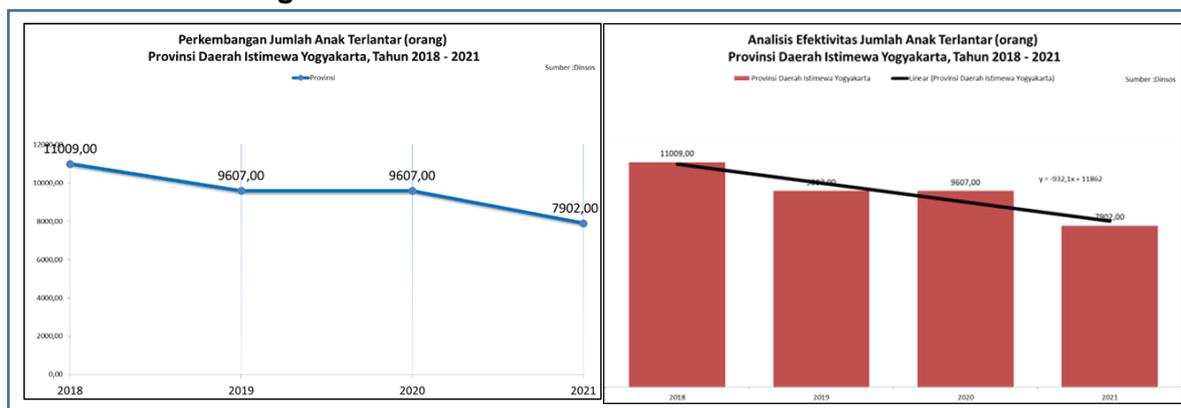
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, selanjutnya sejak tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dengan

diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, Negara berkewajiban untuk melakukan harmonisasi terhadap segala peraturan perundang-undangan terkait dengan anak guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Komitmen negara tersebut kemudian dikuatkan dalam amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah kemudian mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 -32- tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak.

Dalam lingkup di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki tiga Peraturan Daerah terkait dengan Anak, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ketiga peraturan tersebut lebih banyak mengatur berkaitan dengan persoalan khusus.

Pelaksanaan ketiga Peraturan Daerah tersebut secara garis besar hanya mengatur bagian kecil dari konsep Pelindungan Anak di Daerah. Regulasi yang mengatur Pelindungan Anak secara menyeluruh dirasakan belum mencukupi sebagai payung hukum penyelenggaraan Pelindungan Anak di Daerah. Untuk itu perlu ditetapkan sebuah Peraturan Daerah yang mengatur secara menyeluruh (komprehensif) mengenai Pelindungan Anak di Daerah dalam konteks pemenuhan Hak Anak. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan Hak Anak dan memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi hak dan kedudukannya dalam kehidupan. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga ditujukan untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak.

- a. Analisis Posisi Relatif (data nasional dan data provinsi lain tidak ada)
- b. Perkembangan Antar Waktu



Berdasarkan grafik perkembangan antar waktu Jumlah Anak Terlantar (orang) Tahun 2018 – 2021 menunjukkan bahwa pada periode antar waktu pada tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami penurunan. Tahun 2018 data anak terlantarnya berjumlah 11.009 orang dan turun pada 2019 menjadi menjadi 9.607 untuk kemudian pada 2020 jumlahnya sama dikarenakan tidak melakukan pendataan, dan kemudian pada Tahun 2021 mengalami penurunan lagi hingga berjumlah 7.902 anak. Penurunan jumlah anak terlantar ini merupakan hal baik, dan menandakan kebijakan pemerintah dalam menangani anak terlantar sudah cukup baik.

c. Efektivitas

Berdasarkan Grafik Analisis Efektivitas Jumlah anak terlantar (orang) tahun 2018 – 2021 menunjukkan bahwa pada periode perkembangan antar waktu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Tahun 2018 data anak terlantarnya berjumlah 11.009 orang dan turun pada 2019 menjadi menjadi 9.607 untuk kemudian pada 2020 jumlahnya sama dikarenakan tidak melakukan pendataan, dan kemudian pada Tahun 2021 mengalami penurunan lagi hingga berjumlah 7.902 anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan untuk menurunkan jumlah anak terlantar sudah efektif.

d. Relevansi Perkembangan

Secara ringkas, analisis kemiskinan bidang kesejahteraan sosial disajikan dalam tabel di bawah ini. Dari keempat indikator utama, keempat indikator tersebut tidak dapat menyajikan data nasional sehingga analisis yang dapat dilakukan yakni analisis perkembangan antar waktu dan analisis efektivitas. Pada jumlah penduduk disabilitas perihal analisis perkembangan antar waktu tahun 2018-2021 menunjukkan tren yang cenderung menurun meski dalam beberapa tahun terakhir, yakni 2018 hingga 2019 mengalami sedikit kenaikan, sedangkan pada sub bab efektivitas, jumlah penduduk disabilitas cenderung tidak banyak berubah dari tahun ke tahun walau beberapa data

mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan DIY dalam hal Peningkatan fasilitasi terhadap penyandang disabilitas sudah cukup efektif. Pada jumlah penduduk lanjut usia terlantar datanya menunjukkan data yang cenderung menurun dari tahun 2018-202, sedangkan pada analisis efektifitas datanya juga cenderung menurun pada rentang tahun yang sama yang menandakan bahwa kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menurunkan jumlah lanjut usia terlantar dikatakan efektif.

Pada analisis perkembangan antar waktu Jumlah kepala rumah tangga perempuan rawan sosial ekonomi, datanya cenderung fluktuatif pada rentang waktu tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan, dan pada 2021 mengalami kenaikan (tahun 2020 tidak melakukan pendataan), kemudian pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami kenaikan dan hal ini mengindikasikan kebijakan Pemerintah DIY dalam menurunkan jumlah kepala rumah tangga perempuan rawan sosial ekonomi dapat dikatakan sudah cukup baik. Pada analisis efektivitas data DIY tahun 2018-2021 cukup fluktuatif. Pada tahun 2018 - 2020 jumlahnya cenderung menurun, berbeda dengan tahun 2020-2021 yang cenderung meningkat hal ini menunjukkan bahwa intervensi Pemda terhadap kepala rumah tangga perempuan rawan sosial ekonomi DIY sudah cukup efektif. Pada analisis perkembangan antar waktu Jumlah Anak Terlantar, tahun 2018 – 2021 menunjukkan bahwa pada periode antar waktu pada tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini menandakan kebijakan pemerintah dalam menangani anak terlantar sudah cukup baik, sedangkan pada analisis efektivitas data yang sama menunjukkan penurunan jumlah anak terlantar pada rentang waktu yang sama yakni 2018-2021. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk menurunkan jumlah anak terlantar dapat dikatakan efektif.

3.7.5. Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial

Tabel 3. 7. Matriks Analisis Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial

No	Indikator Utama	Aspek Analisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektifitas	Relevansi Perkembangan
1	Jumlah Penduduk Disabilitas	-	Cenderung mengalami penurunan	efektif	-
2	Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar	-	Menurun	Efektif	-
3	Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	Fluktuatif (pada 2018 ke 2019, 2020 turun, dan pada 2020 ke 2021 mengalami kenaikan)	efektif	-
4	Jumlah Anak Terlantar	-	Menurun	Efektif	-

Dari analisis karakteristik masalah bidang kesejahteraan sosial, didapatkan indikator utama yang perlu perbaikan adalah Jumlah Penduduk Usia Terlantar dan Jumlah Penyandang Disabilitas.

3.8. Kemiskinan Ekstrem di DIY

Dalam rangka mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia 0% pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Serta telah ditetapkannya Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul dan Sleman sebagai lokus kemiskinan ekstrem tahun 2022-2023. Maka dari itu, sesuai dengan pilar 1 (satu) komitmen pemerintah dalam upaya mewujudkan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2024 agar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Hal ini menjadi perhatian khusus DIY dan diterjemahkan melalui Surat Edaran Wakil Gubernur DIY Nomor 401/17506 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di DIY yang disampaikan kepada seluruh OPD DIY, Kabupaten/Kota dan lembaga-lembaga lainnya.

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Bank Dunia menggunakan estimasi konsumsi dalam US\$ Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli. Bank dunia menstandarkan pada USD 1,99 atau sekitar Rp. 25.654 yang disebut dengan kemiskinan ekstrem dan USD 3,20 atau setara dengan Rp. 45.607 yang termasuk sebagai kategori miskin, angka tersebut dihitung dari pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi per orang per harinya. Lalu bagaimana dengan jumlah kemiskinan ekstrem di Indonesia? Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kemiskinan ekstrem di Indonesia sebanyak 10,9 juta jiwa. Arahan Presiden berdasarkan rapat terbatas strategi penanggulangan kemiskinan kronis yang dilaksanakan 21 Juli 2021, menargetkan kesmiskinan ekstrem pada tahun 2024 dapat mencapai 0%.

2020 ke tahun 2021, namun pada tahun 2022 penurunannya tidak signifikan namun tetap mengalami penurunan.

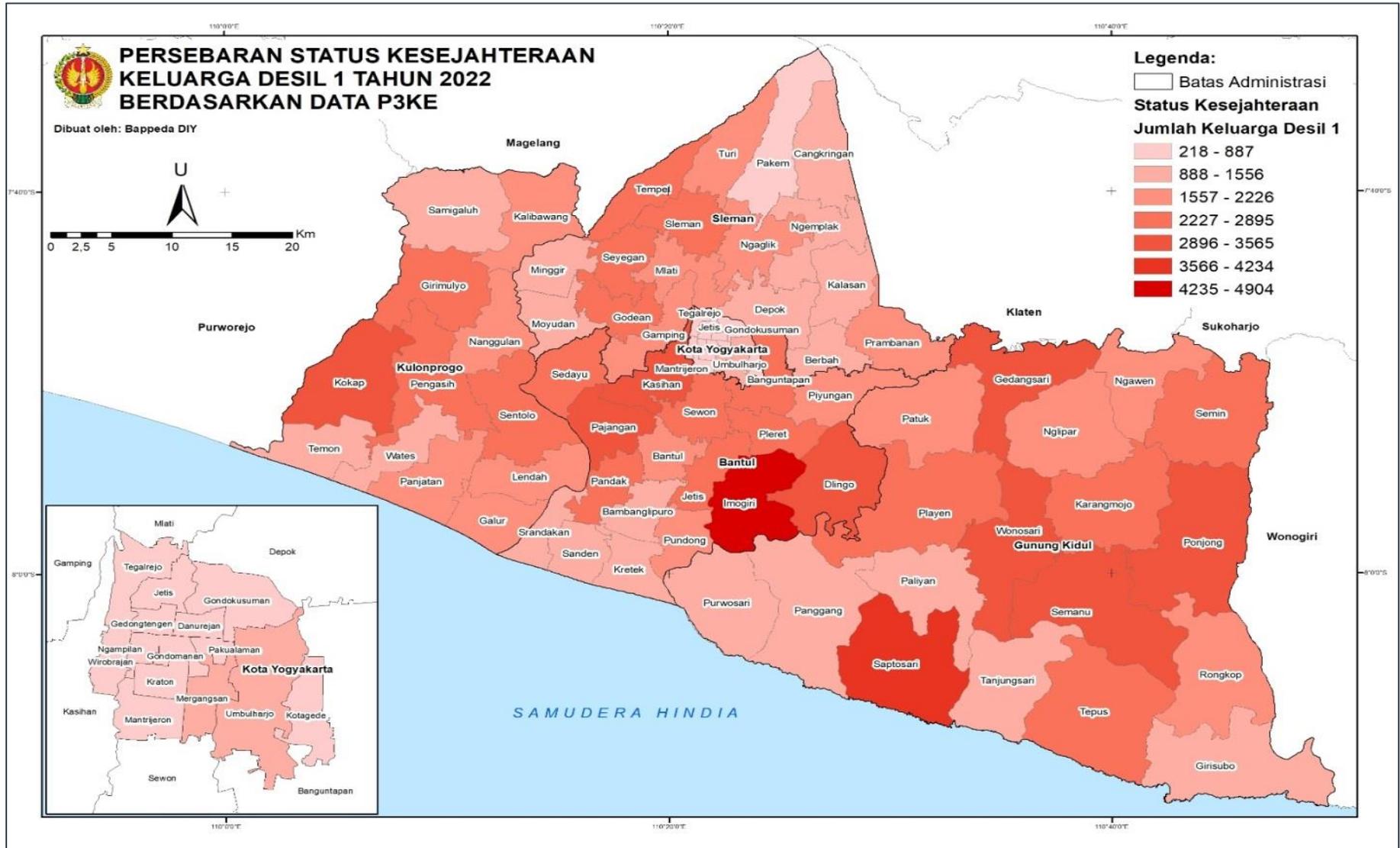
e. Relevansi

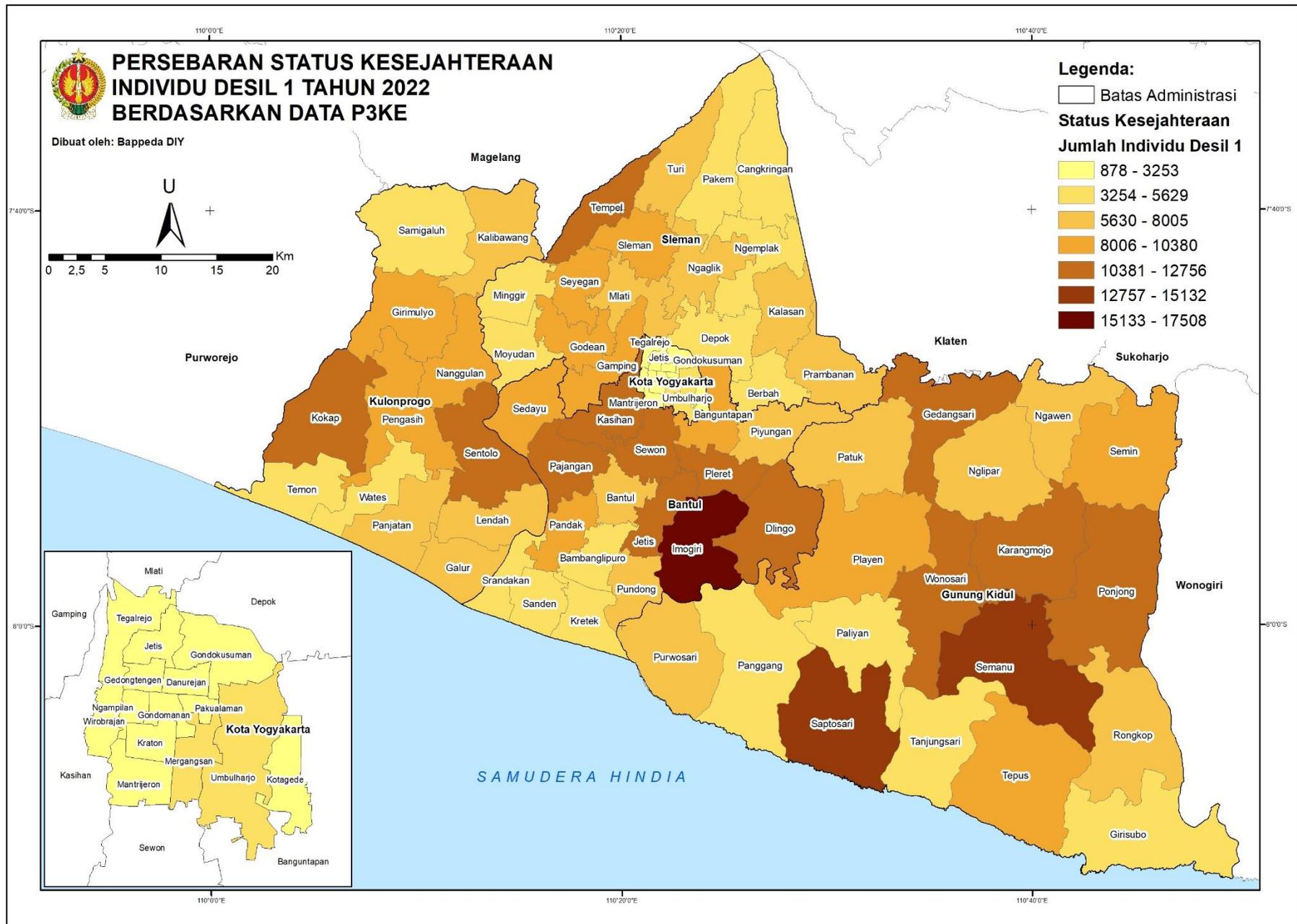
Sedangkan jika dilihat pada analisis relevansi dapat dilihat bahwa DIY masih tinggi dari pada rata-rata nasional, namun penurunannya cukup baik dan penurunannya diikuti oleh Kabupaten/Kota di DIY. Meskipun pada tahun 2020 angka kemiskinan ekstrem cukup jauh di atas rata-rata nasional, namun pada tahun 2021 dan 2022 DIY membuktikan dapat mengalami penurunan mengikuti grafik nasional dan hal ini diikuti oleh Kabupaten/Kota di DIY.

3.8.2. Peta Persebaran Data P3KE Tahun 2022

3.8.2.1. Status Kesejahteraan

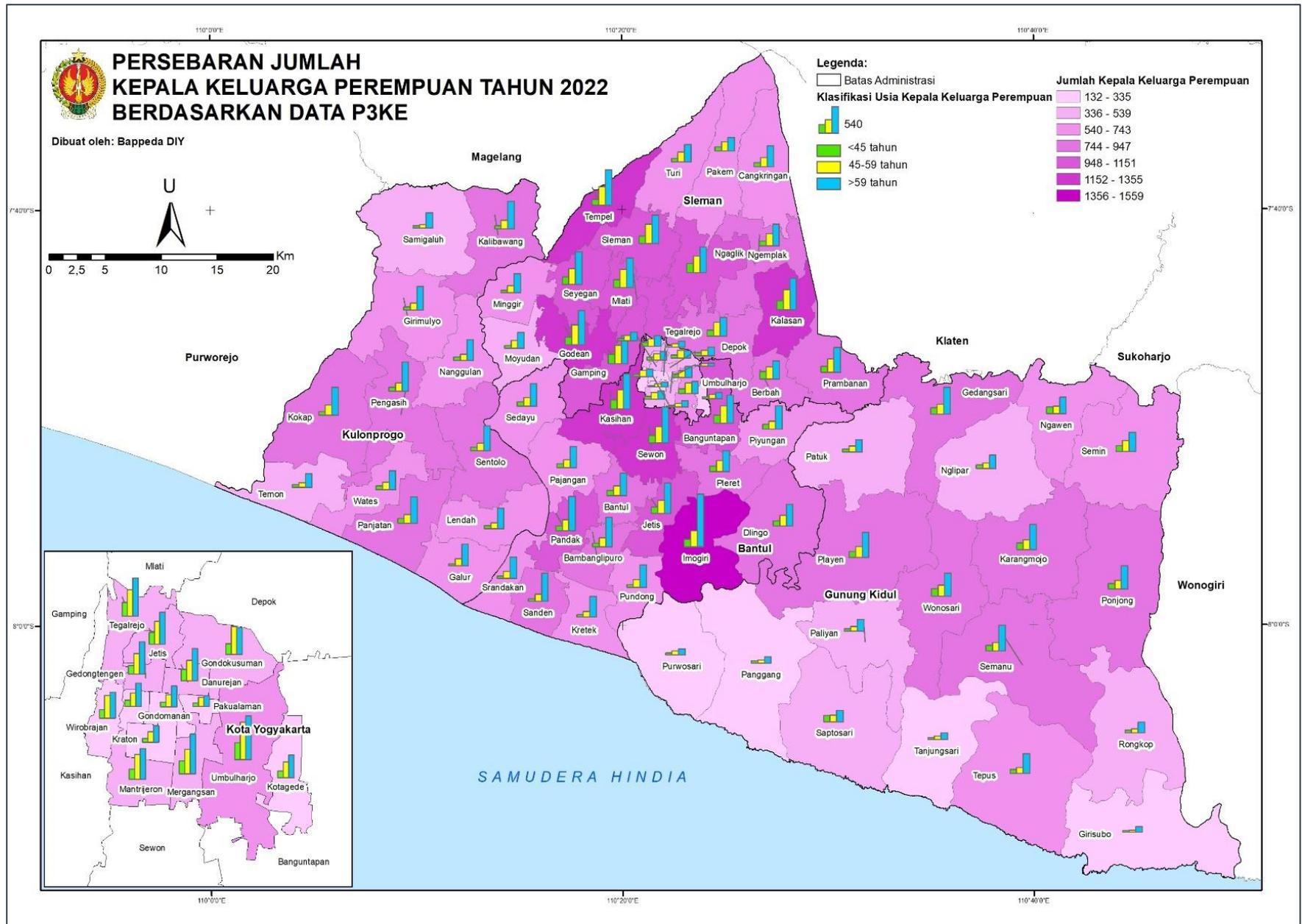
a. Keluarga dan Individu





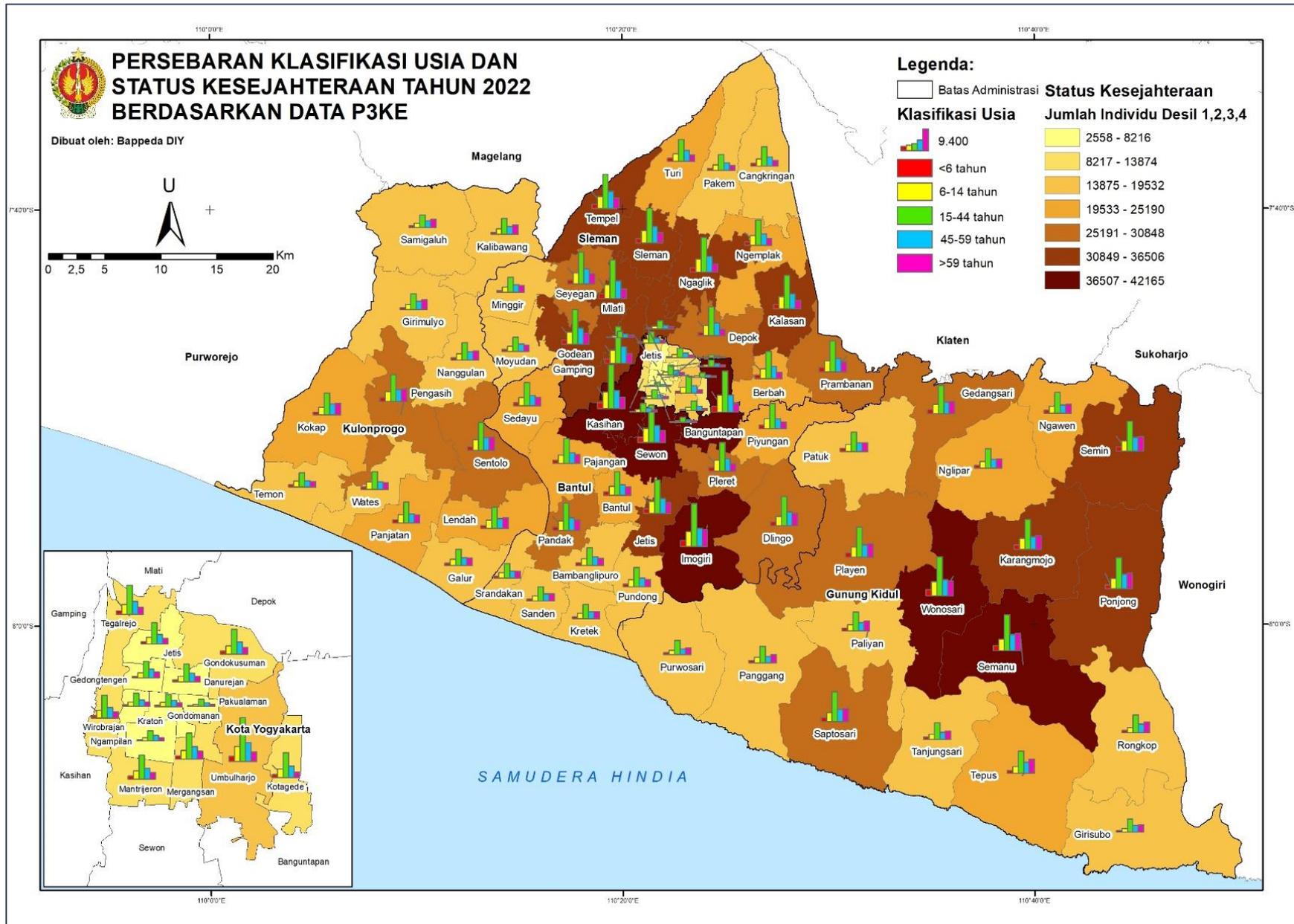
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

b. Kepala Keluarga Perempuan

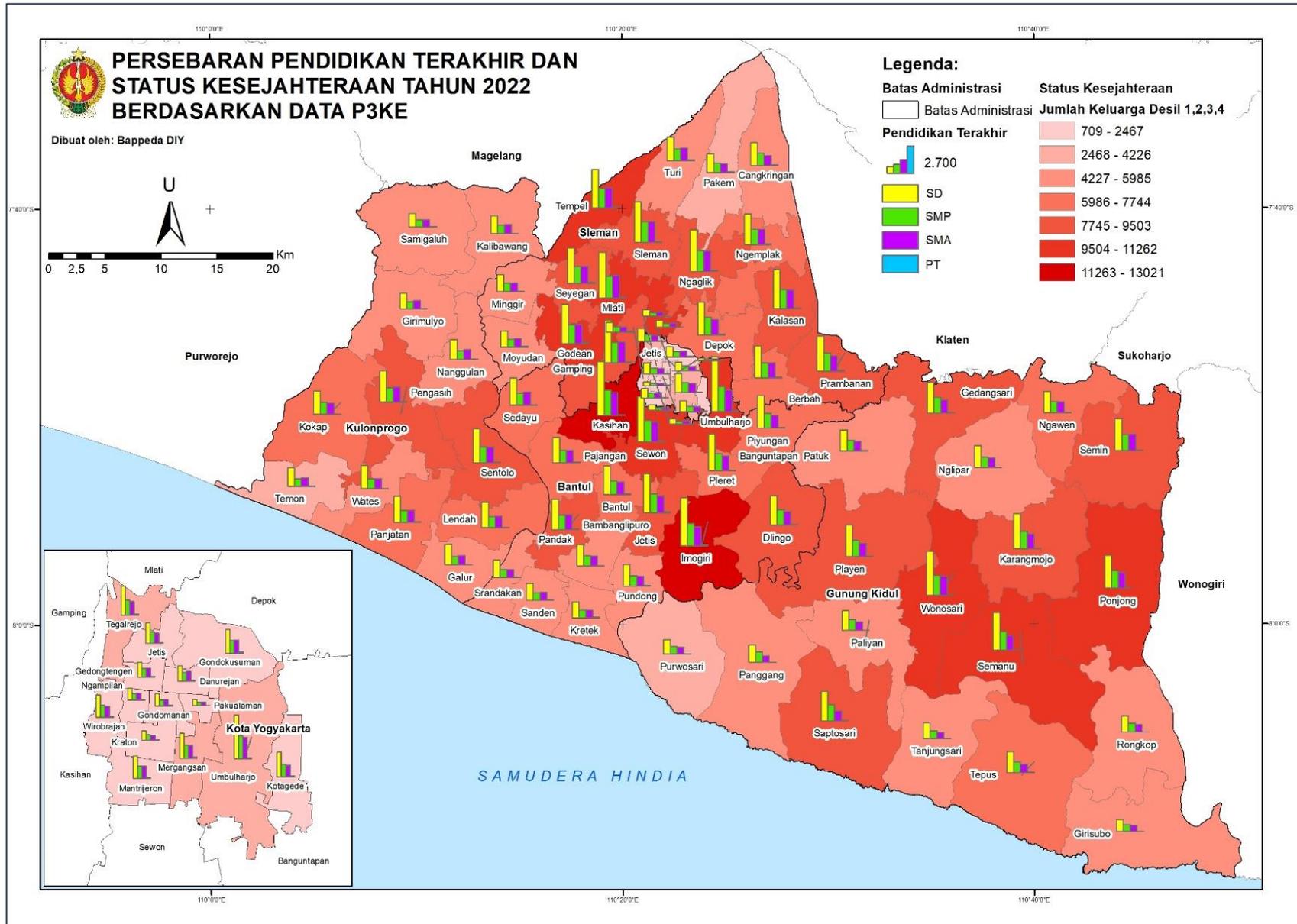


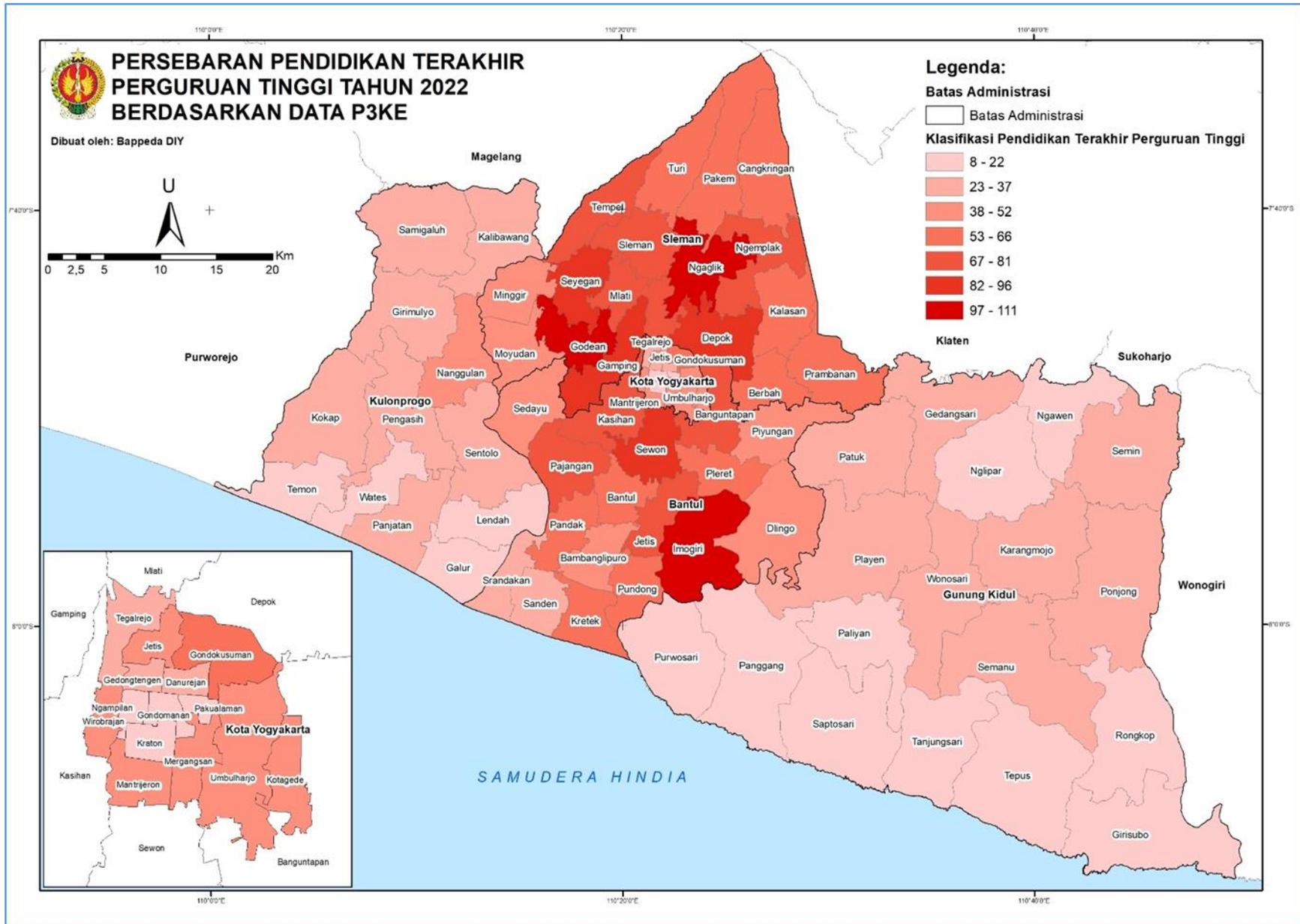
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

c. Klasifikasi Usia



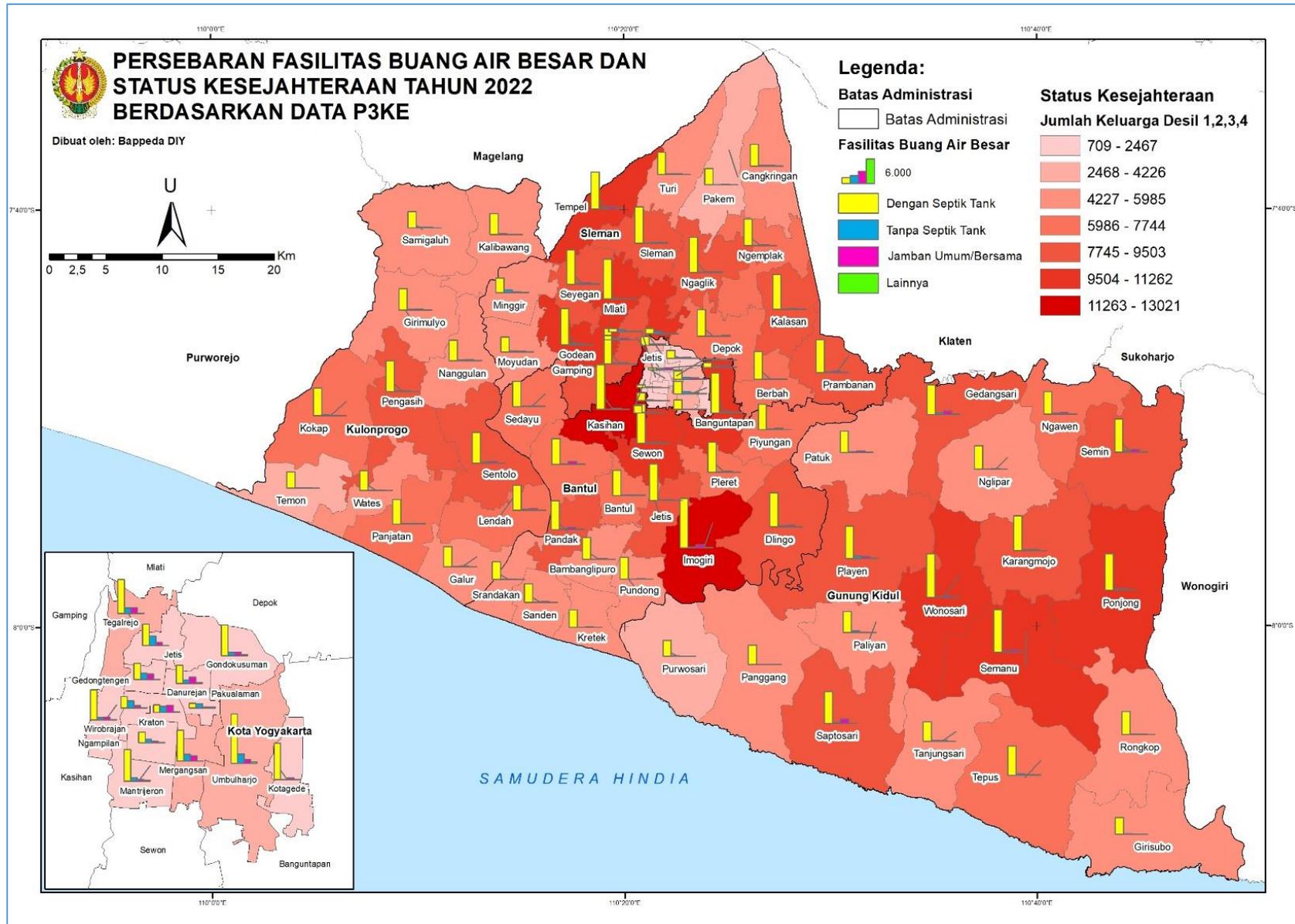
b. Pendidikan Terakhir

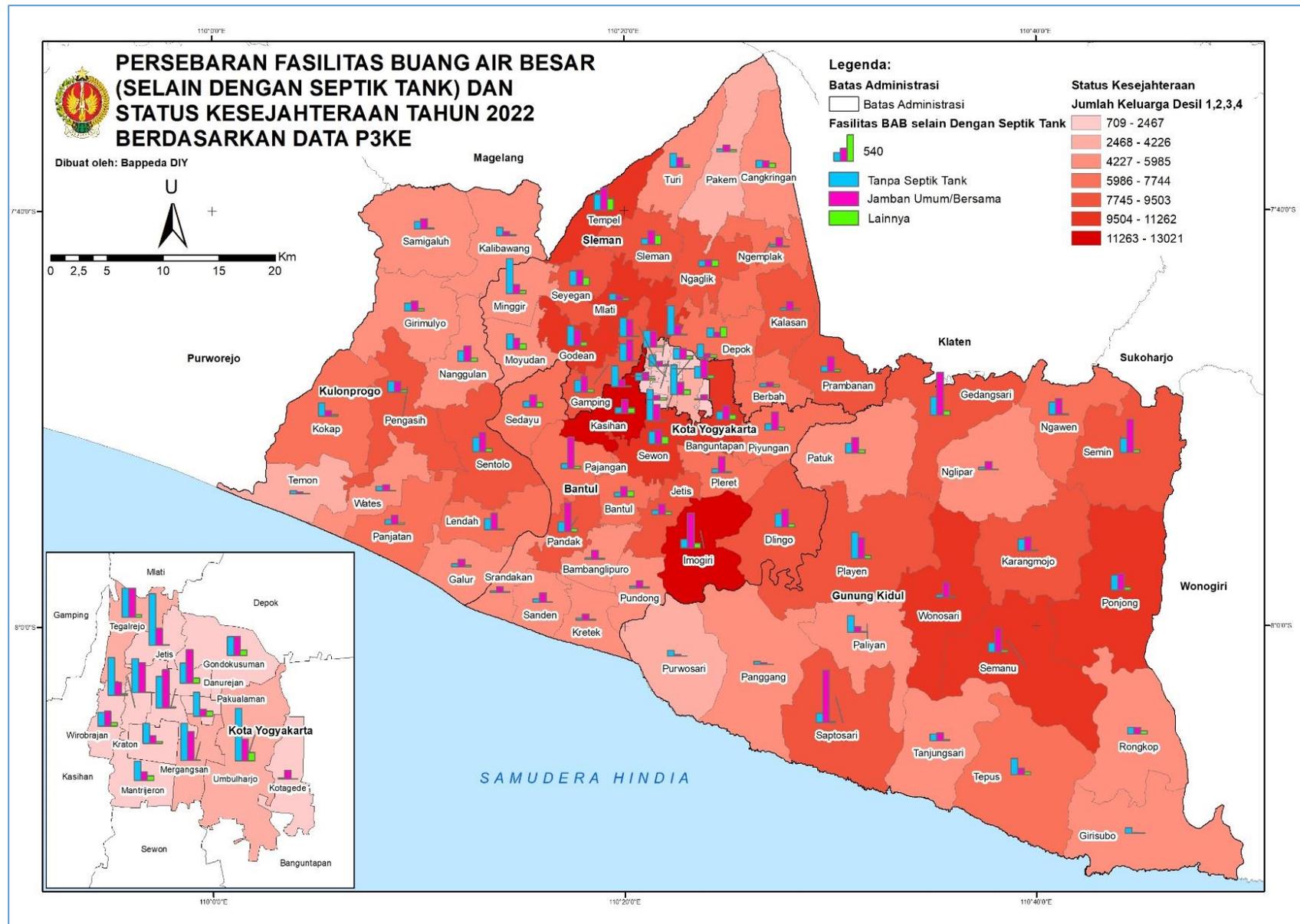




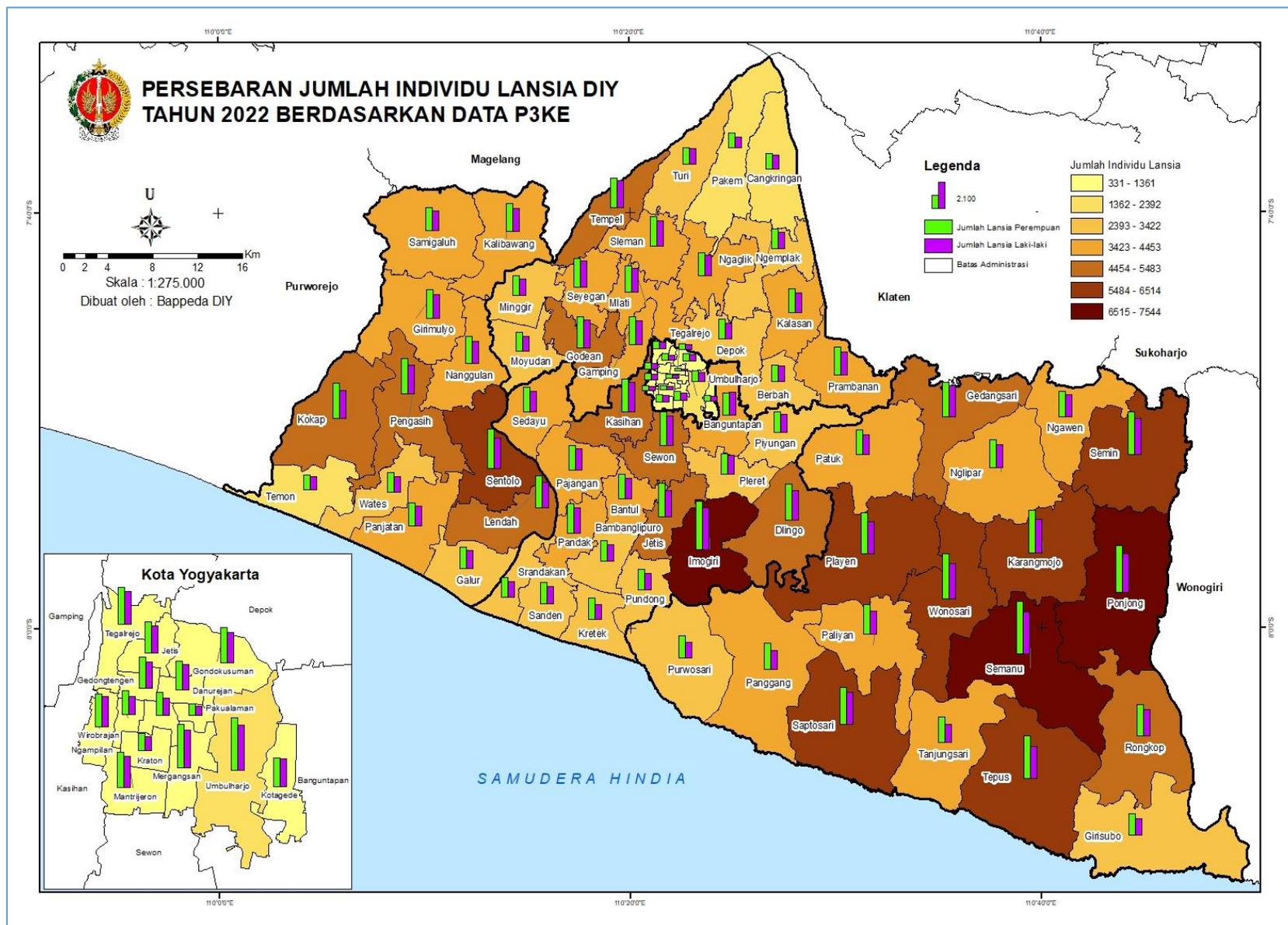
3.8.2.3. Kesehatan

a. Fasilitas Buang Air Besar



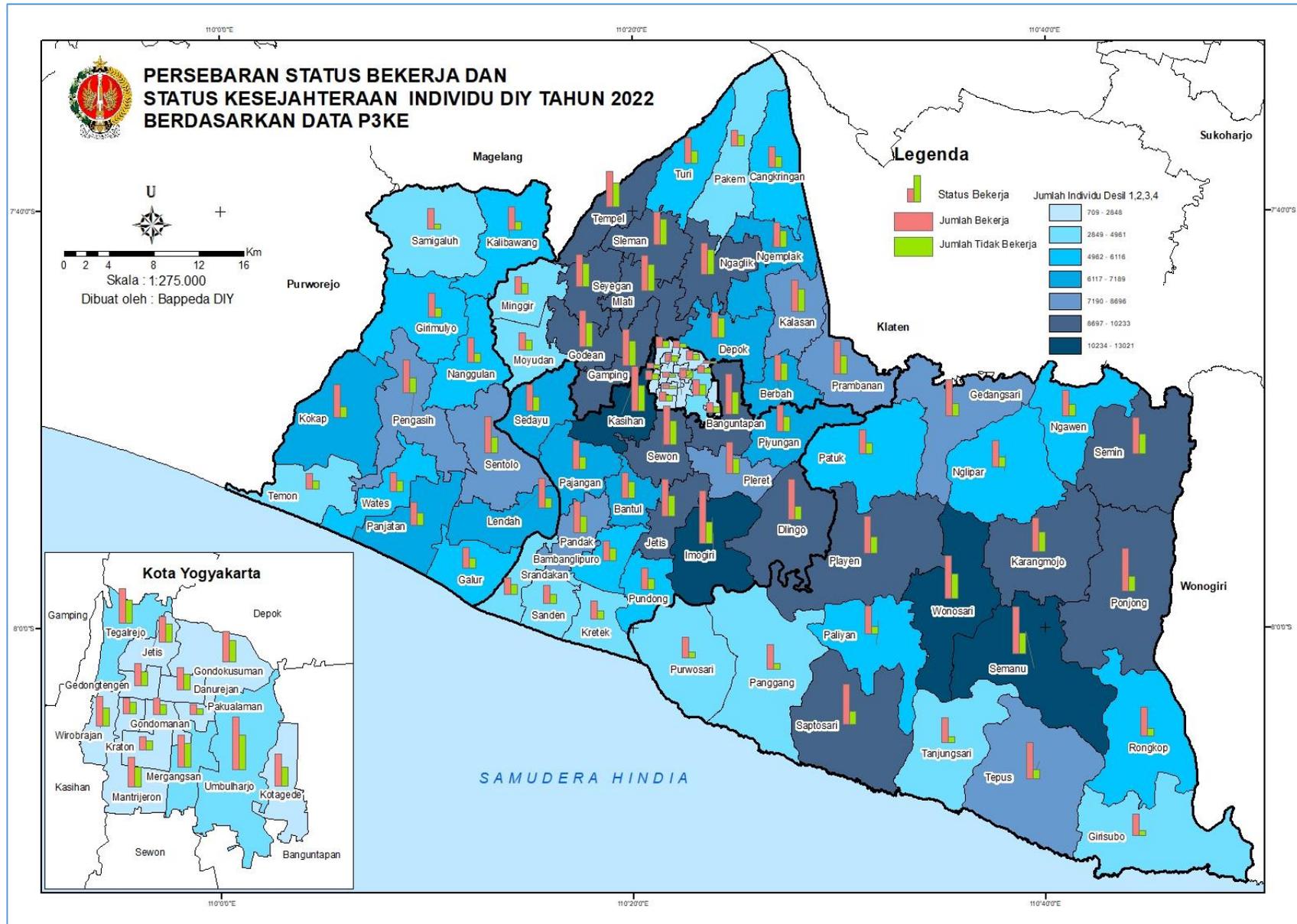


b. Individu Lansia

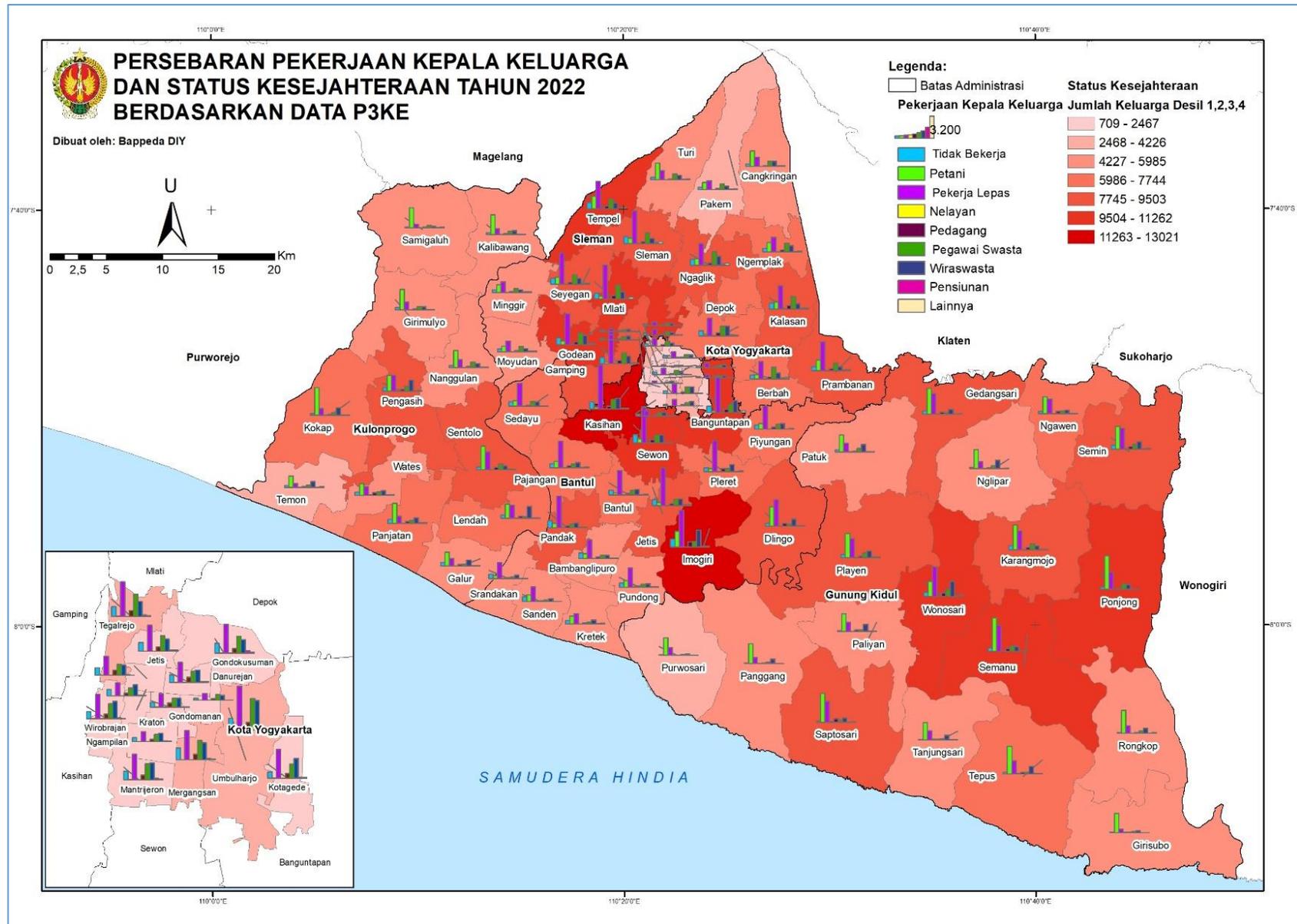


3.8.2.4. Ketenagakerjaan

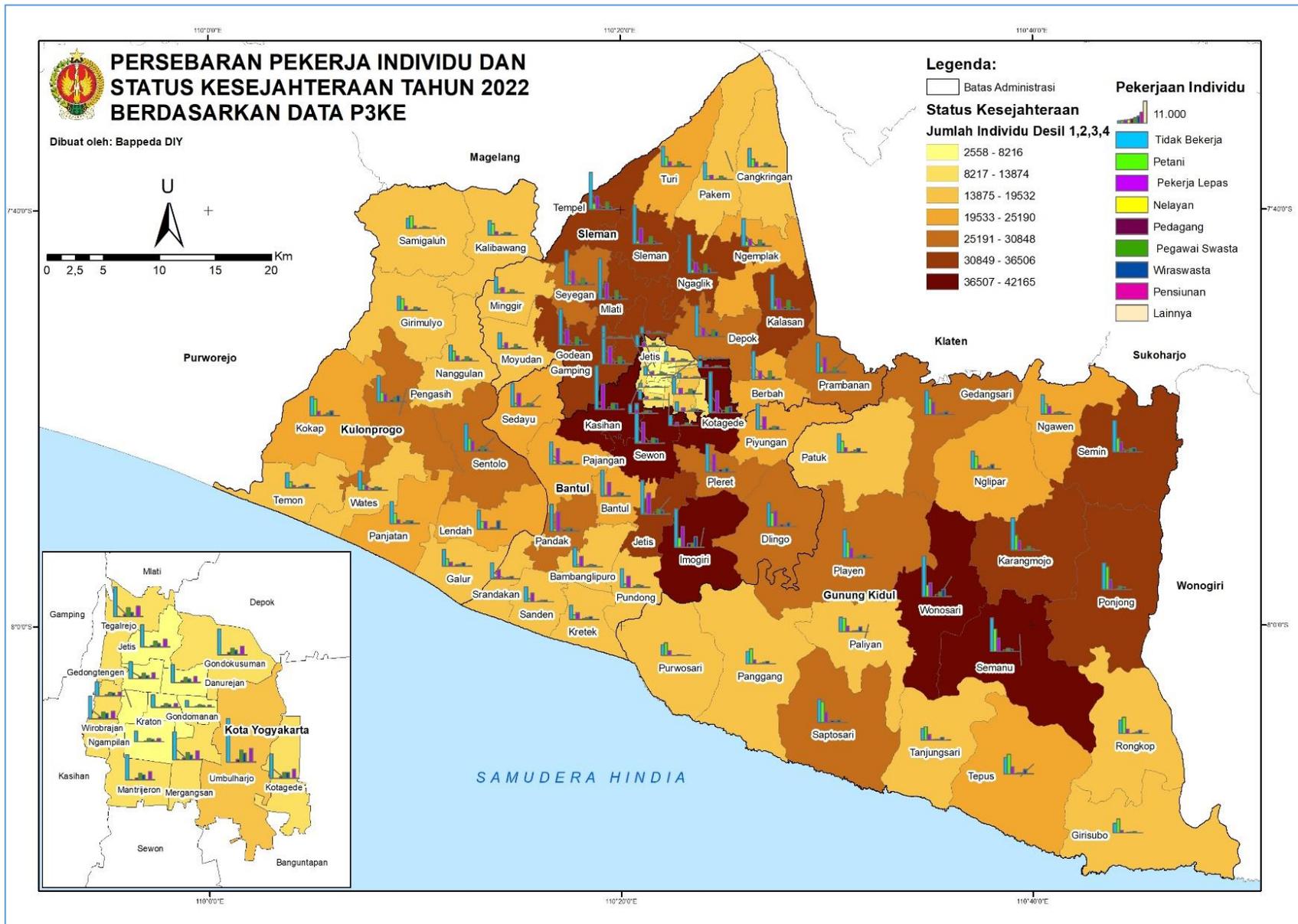
a. Status Bekerja



b. Pekerjaan Kepala Keluarga

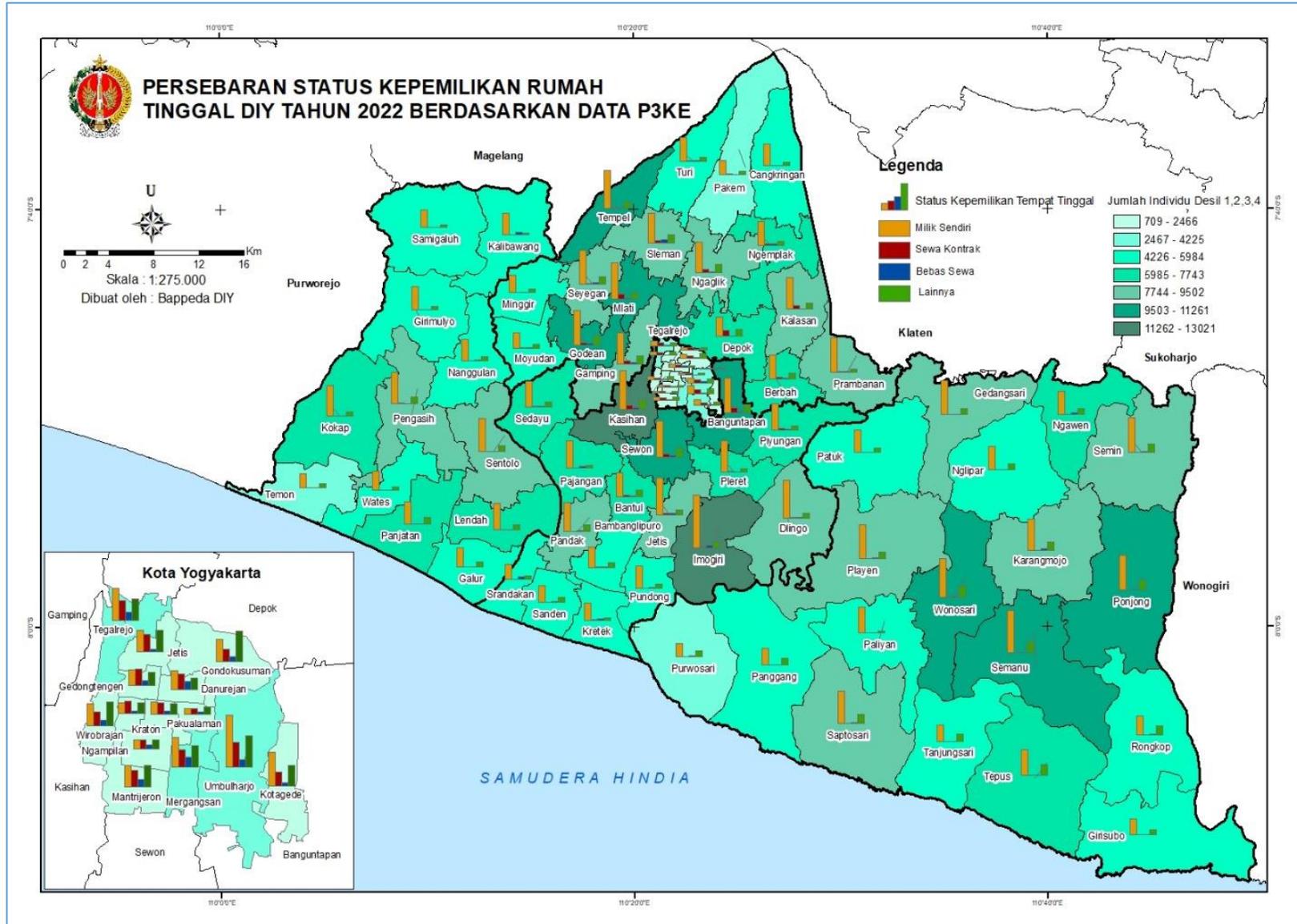


c. Pekerjaan Individu

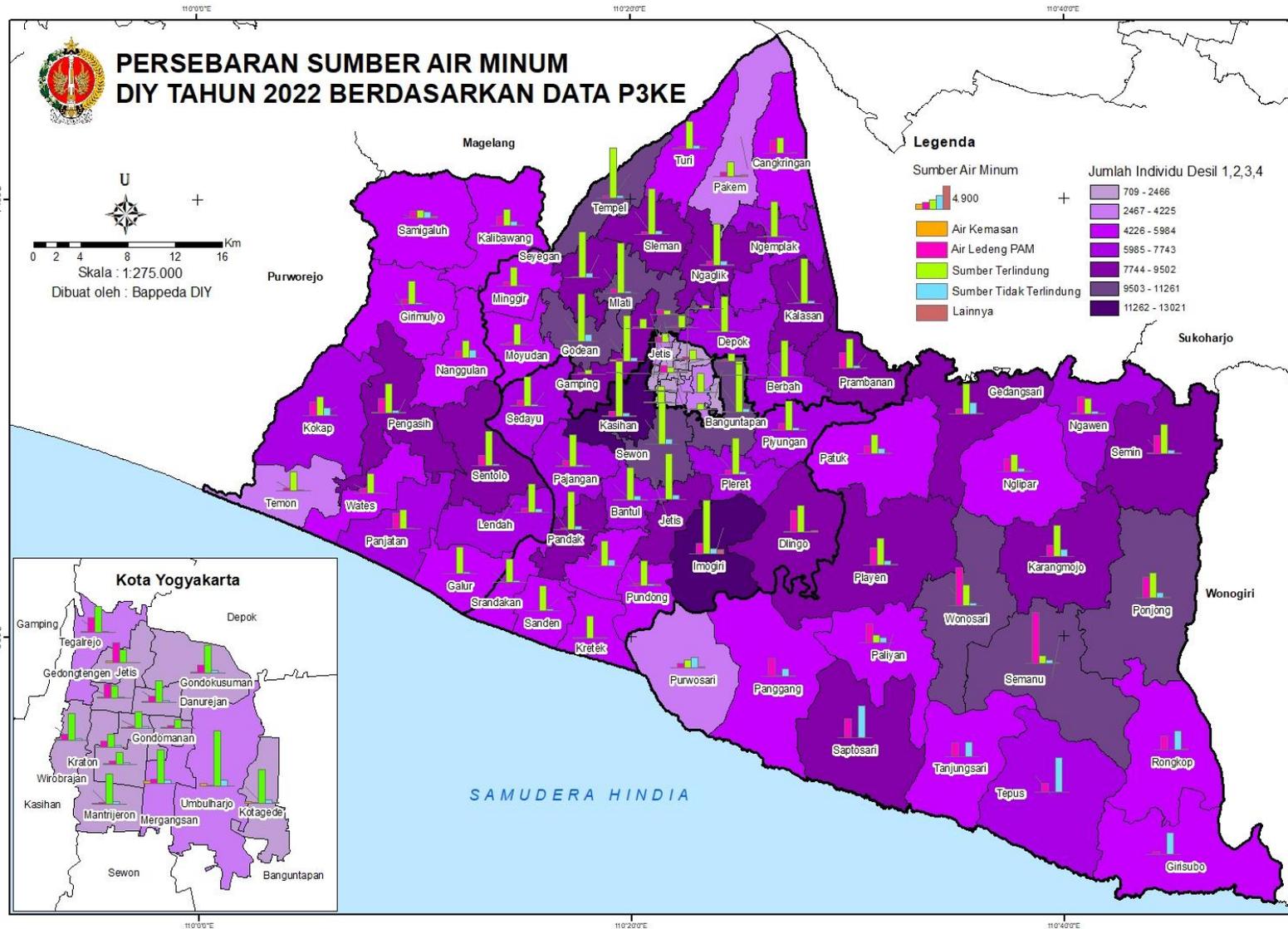


3.8.2.5. Informasi Rumah

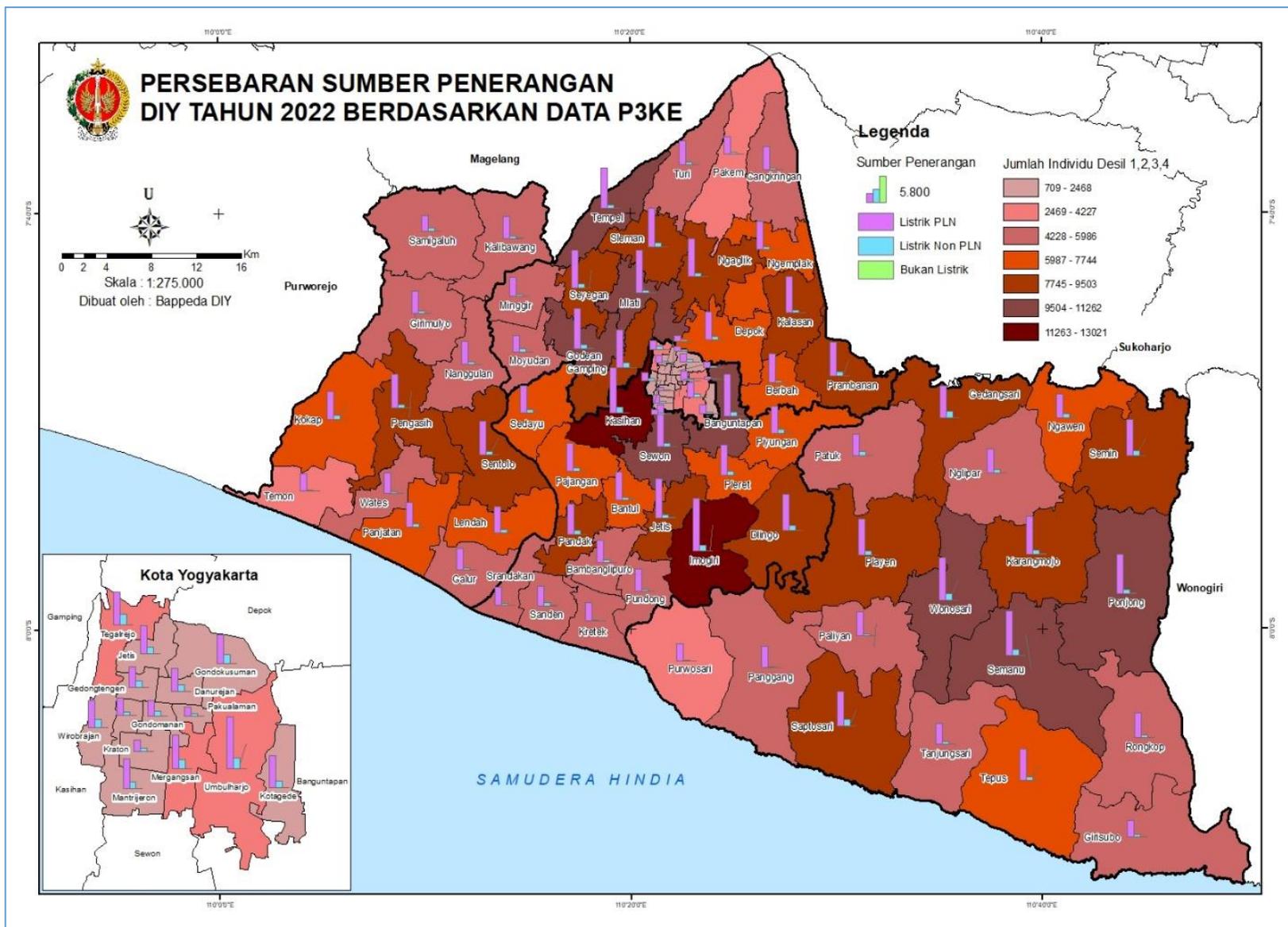
a. Kepemilikan Tempat Tinggal



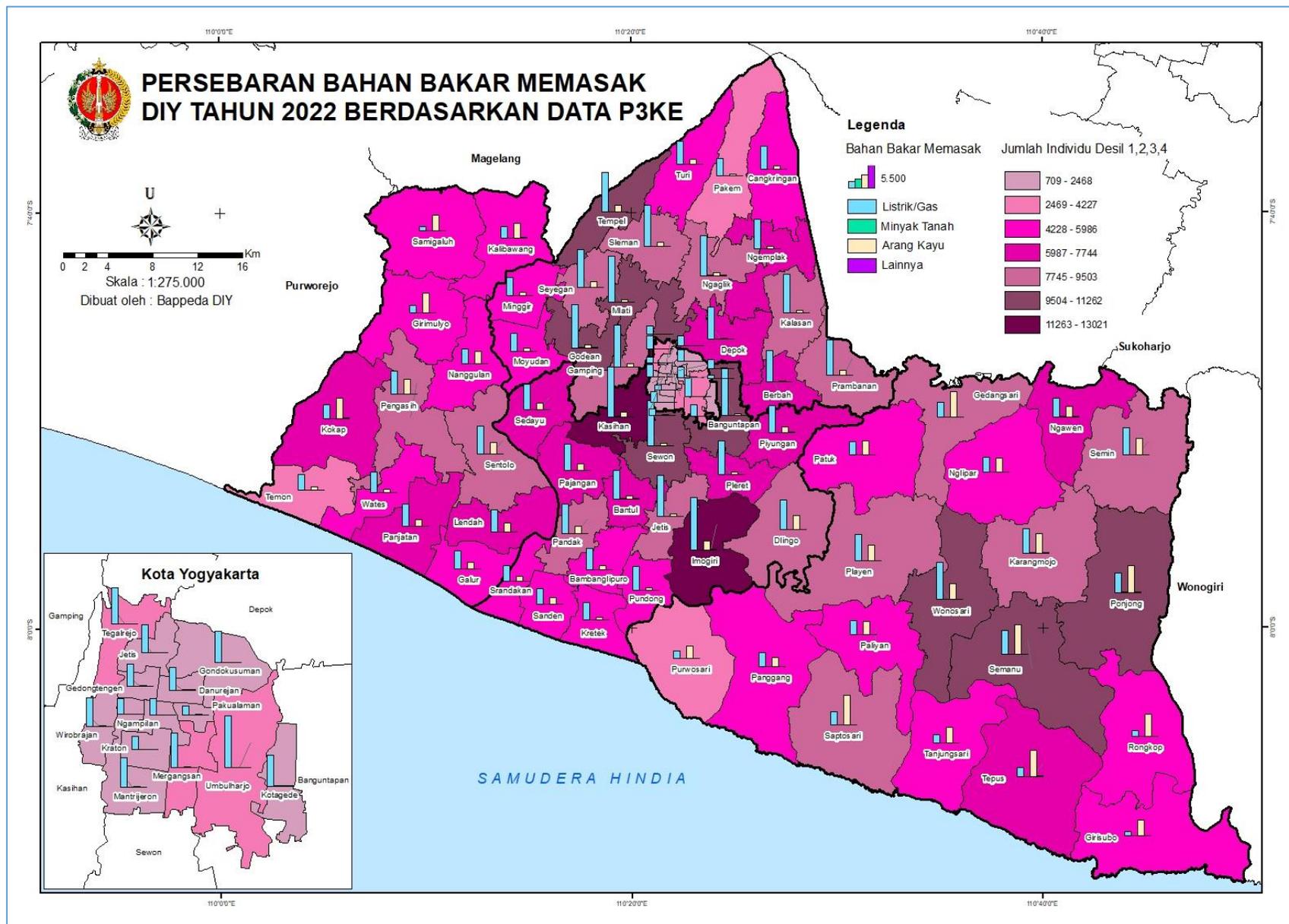
b. Sumber Air Minum



c. Penerangan



d. Bahan Bakar Memasak



BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

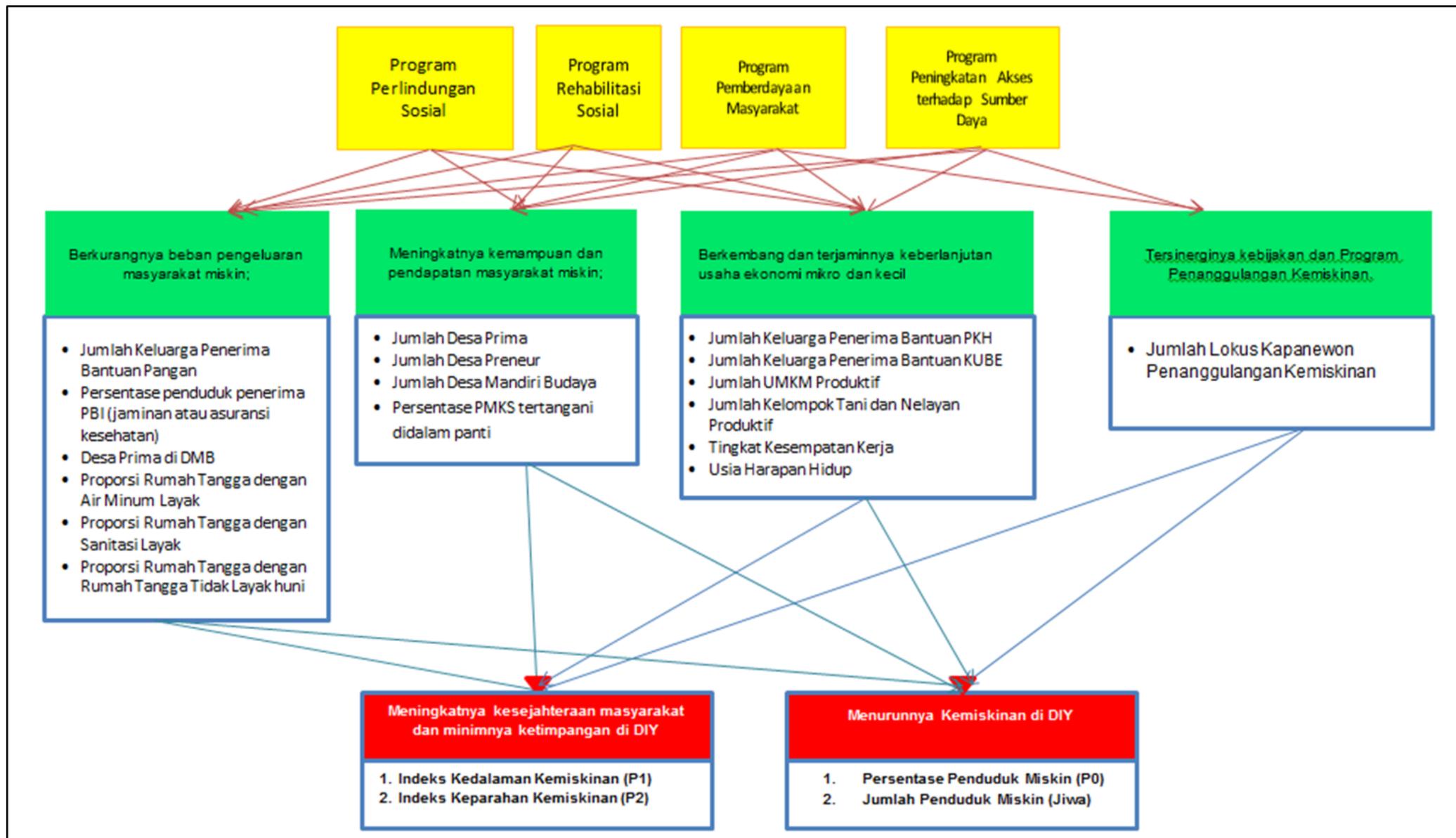
4.1. Analisis Determinan Keterkaitan

Theory of Change (ToC) adalah metodologi untuk perencanaan, partisipasi, dan evaluasi yang digunakan untuk mempromosikan perubahan sosial. Teori Perubahan mendefinisikan tujuan jangka panjang dan kemudian memetakan ke belakang untuk mengidentifikasi prasyarat yang diperlukan. Teori Perubahan menjelaskan proses perubahan dengan menguraikan hubungan sebab akibat dalam suatu inisiatif, yaitu, hasil jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya. Perubahan yang diidentifikasi dipetakan sebagai "jalur hasil" - menunjukkan setiap hasil dalam hubungan logis dengan yang lainnya, serta alur kronologis. Hubungan antara hasil dijelaskan oleh "alasan" atau pernyataan mengapa satu hasil dianggap sebagai prasyarat untuk yang lain.

4.1.1. Theory of Change (ToC)/Logika Program

4.1.1.1. Analisis ToC Bidang Kemiskinan Konsumsi

Pada BAB III, telah dilakukan analisis atau identifikasi masalah kemiskinan berdasarkan 4 indikator kemiskinan konsumsi, yaitu: Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2). Untuk bidang Kemiskinan Konsumsi, ke empat indikator tersebut menjadi masalah multidimensi yang harus diselesaikan bersamaan. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, analisis ToC Bidang Kemiskinan di DIY diuraikan sebagai berikut:



4.1.1.1.1. Program Prioritas

Program Prioritas untuk mendukung tujuan akhir menurunnya kemiskinan di DIY dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta minimnya ketimpangan di DIY mengacu pada kelompok program penanggulangan kemiskinan yang terangkum pada Perda DIY Nomor 11 Tahun 2019. Dimana di dalam kelompok program tersebut terdapat program-program yang dilaksanakan OPD di DIY yang secara langsung atau tidak langsung untuk penanggulangan kemiskinan. Program-program tersebut secara periodic tertuang di Rencana Aksi Tahunan (RAT) TKPKD DIY dan dilakukan monitoring evaluasi setiap 3 bulan serta disampaikan di Dokumen LP2KD. Kelompok program yang dimaksud antara lain Program Perlindungan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Masyarakat, dan Program Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya.

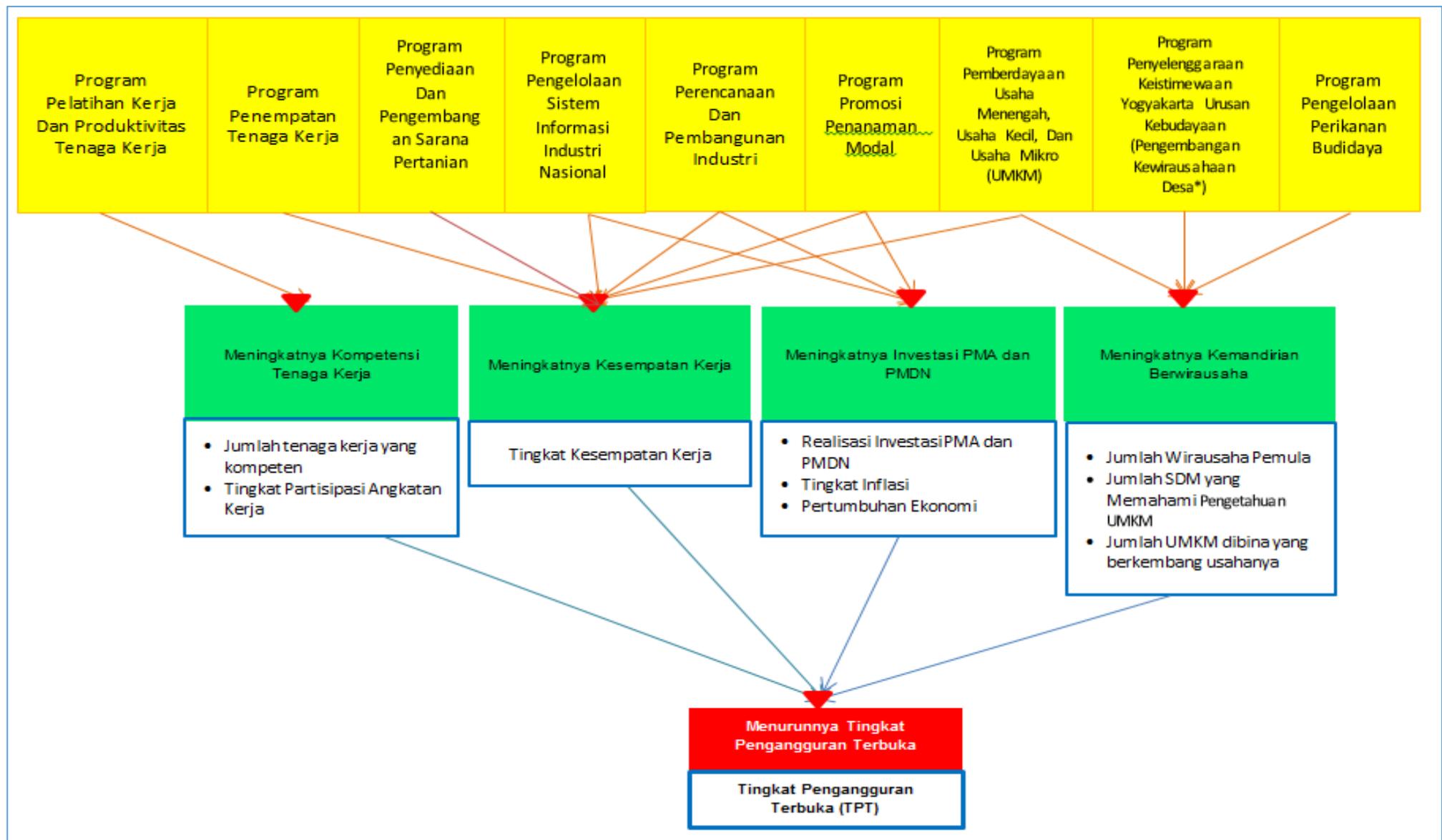
4.1.1.1.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Jangka Menengah Bidang Kemiskinan konsumsi ini sesuai dengan yang tertuang pada Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di DIY yaitu :

- a. Berkurangnya beban pengeluaran masyarakat miskin
- b. Meningkatnya kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
- c. Berkembang dan terjaminnya keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil
- d. Tersinerginya kebijakan dan Program penanggulangan kemiskinan

4.1.1.2. Analisis Toc Bidang Ketenagakerjaan

Sebagaimana yang telah diurai pada Bab III tentang Profil Kemiskinan, masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu indikator penyebab tingginya angka kemiskinan di DIY. Masalah utama yang harus diselesaikan pada bidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, analisis ToC Bidang Ketenagakerjaan di DIY diuraikan sebagai berikut:



4.1.1.2.1. Program Prioritas

Program Prioritas untuk mendukung menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY yaitu :

- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja
- c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- d. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- e. Program Promosi Penanaman Modal
- f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
- g. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- h. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- i. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- j. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- k. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

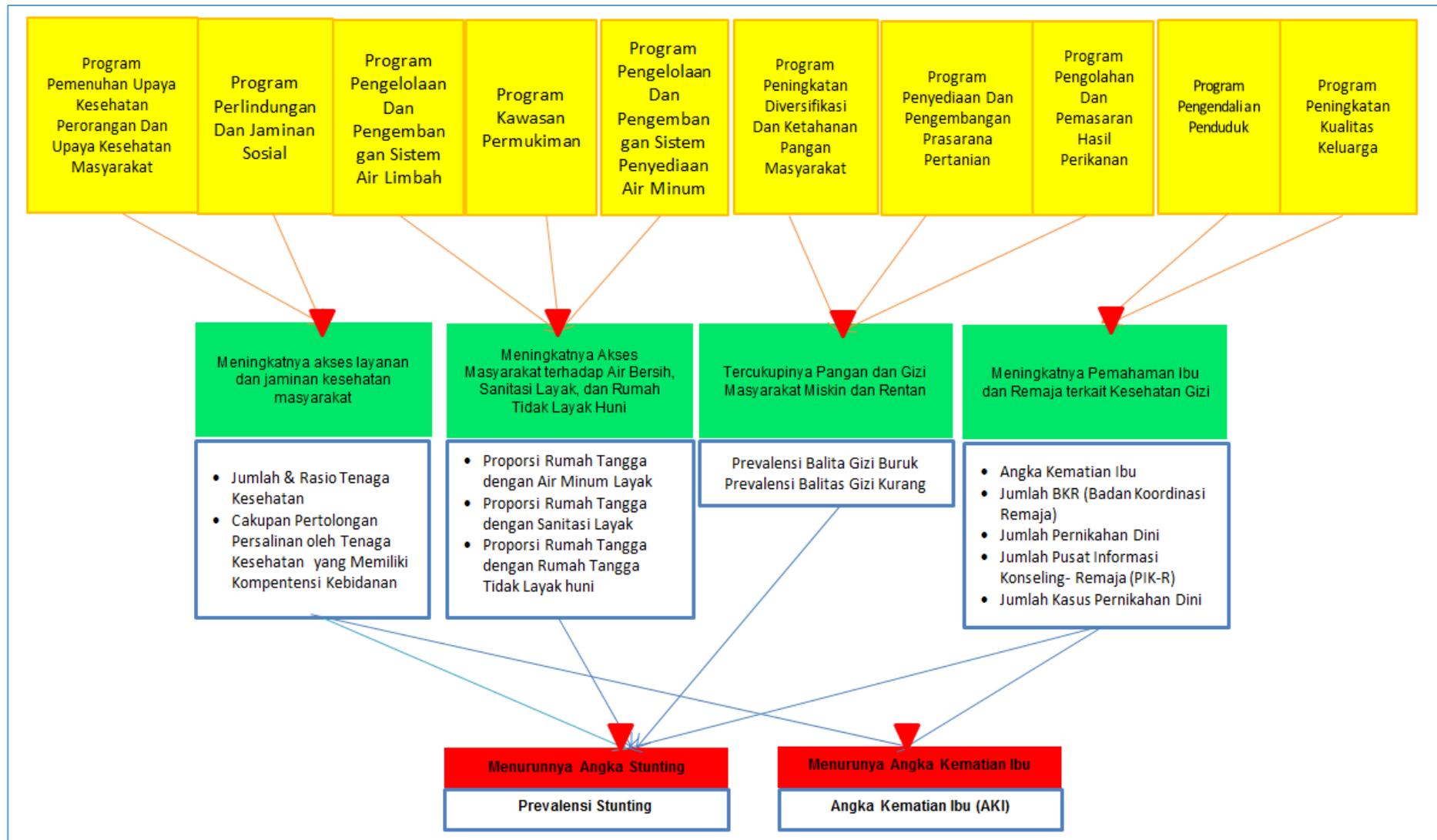
4.1.1.2.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Jangka Menengah Bidang Ketenagakerjaan dalam mendukung menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY yaitu :

- a. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja
- b. Meningkatnya Kesempatan Kerja
- c. Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN
- d. Meningkatnya Kemandirian Berwirausaha

4.1.1.3. Analisis ToC Bidang Kesehatan

Sebagaimana yang telah diurai pada Bab III tentang Profil Kemiskinan, masalah kesehatan menjadi salah satu indikator penyebab tingginya angka kemiskinan di DIY. Masalah utama yang harus diselesaikan pada bidang kesehatan ada dua yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Prevalensi Stunting. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, analisis ToC Bidang Kesehatan di DIY diuraikan sebagai berikut:



4.1.1.3.1. Program Prioritas

Program Prioritas untuk mendukung menurunnya Angka Stunting dan Angka Kematian Ibu (AKI) di DIY yaitu :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- d. Program Kawasan Permukiman
- e. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- f. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- g. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- h. Program Pengendalian Penduduk
- i. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- j. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

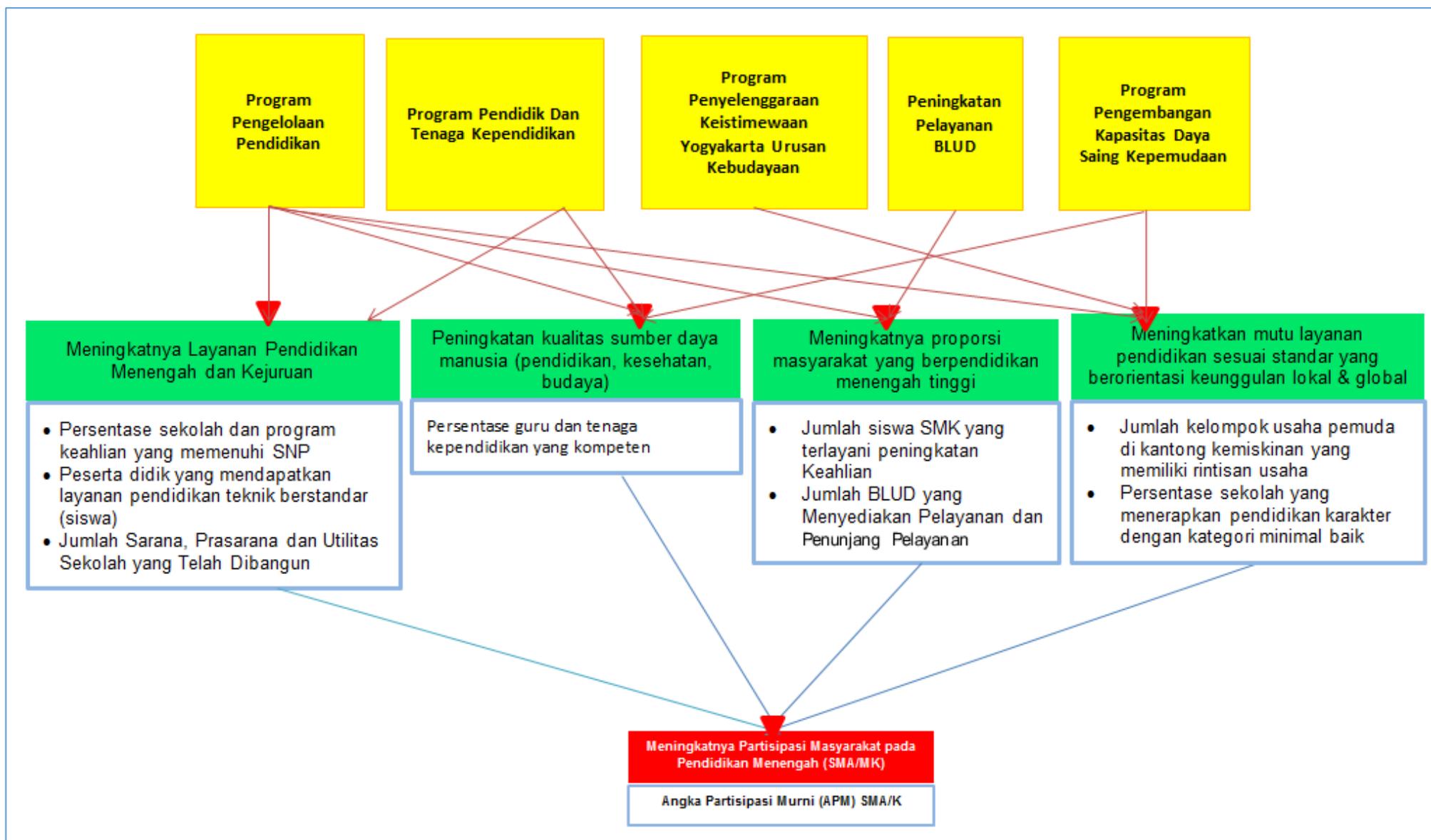
4.1.1.3.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Jangka Menengah Bidang Kesehatan menurunnya Angka Stunting dan Angka Kematian Ibu (AKI) di DIY yaitu :

- a. Meningkatnya akses layanan dan jaminan kesehatan masyarakat
- b. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Bersih, Sanitasi Layak, dan Rumah Tidak Layak Huni
- c. Tercukupinya Pangan dan Gizi Masyarakat Miskin dan Rentan
- d. Meningkatnya Pemahaman Ibu dan Remaja terkait Kesehatan Gizi

4.1.1.4. Analisis ToC Bidang Pendidikan

Pada BAB III, telah dilakukan analisis atau identifikasi bidang pendidikan. Dari hasil analisis masalah pada bidang pendidikan, didapatkan indikator yang perlu perbaikan dan perhatian adalah APM SMA/MK. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, analisis ToC Bidang Pendidikan di DIY diuraikan sebagai berikut:



4.1.1.4.1. Program Prioritas

Program Prioritas untuk mendukung meningkatnya Partisipasi Masyarakat pada Pendidikan Menengah (SMA/MK) di DIY yaitu :

- a. Program Pengembangan Kurikulum
- b. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- d. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

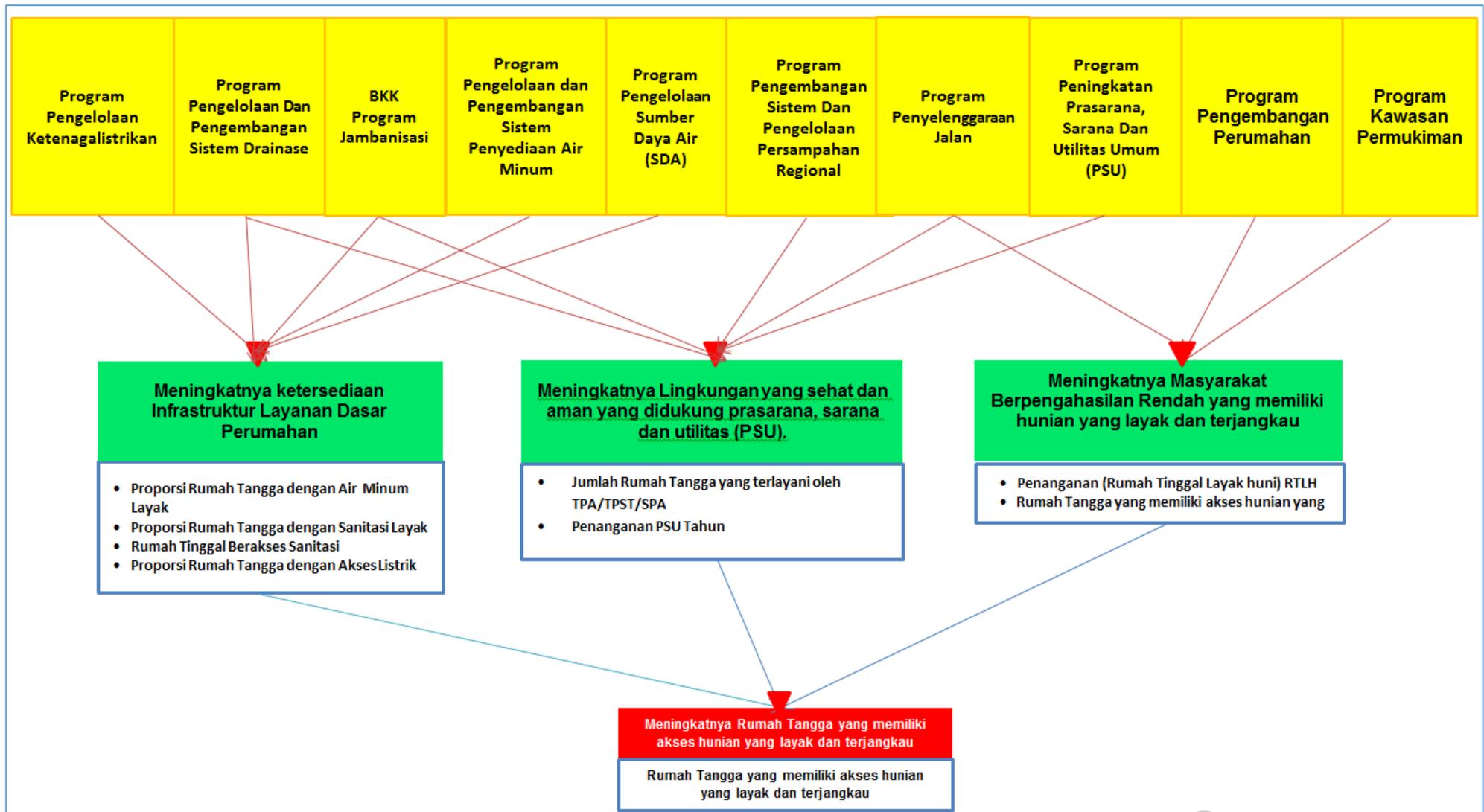
4.1.1.4.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Jangka Menengah Bidang Pendidikan mendukung meningkatnya Partisipasi Masyarakat pada Pendidikan Menengah (SMA/MK) di DIY yaitu :

- a. Meningkatnya Layanan Pendidikan Menengah dan Kejuruan
- b. Menigkatnya kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, budaya)
- c. Meningkatnya proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah tinggi
- d. Meningkatkan mutu layanan pendidikan sesuai standar yang berorientasi keunggulan lokal & global

4.1.1.5. Analisis ToC Bidang Infrastruktur Dasar

Pada BAB III, telah dilakukan analisis atau identifikasi bidang Infrastruktur Dasar. Dari hasil analisis masalah pada bidang Infrastruktur Dasar, didapatkan indikator yang perlu perbaikan dan perhatian adalah Rumah Tangga yang memiliki akses hunian layak dan terjangkau. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, analisis ToC Bidang Infrastruktur Dasar di DIY diuraikan sebagai berikut:



4.1.1.5.1. Program Prioritas

Program Prioritas untuk meningkatnya Rumah Tangga yang memiliki akses hunian yang layak dan terjangkau DIY yaitu :

- a. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- c. Program Jambanisasi (BKK)
- d. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- e. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- f. Program Penyelenggaraan Jalan
- g. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- h. Program Pengembangan Perumahan
- i. Program Kawasan Permukiman

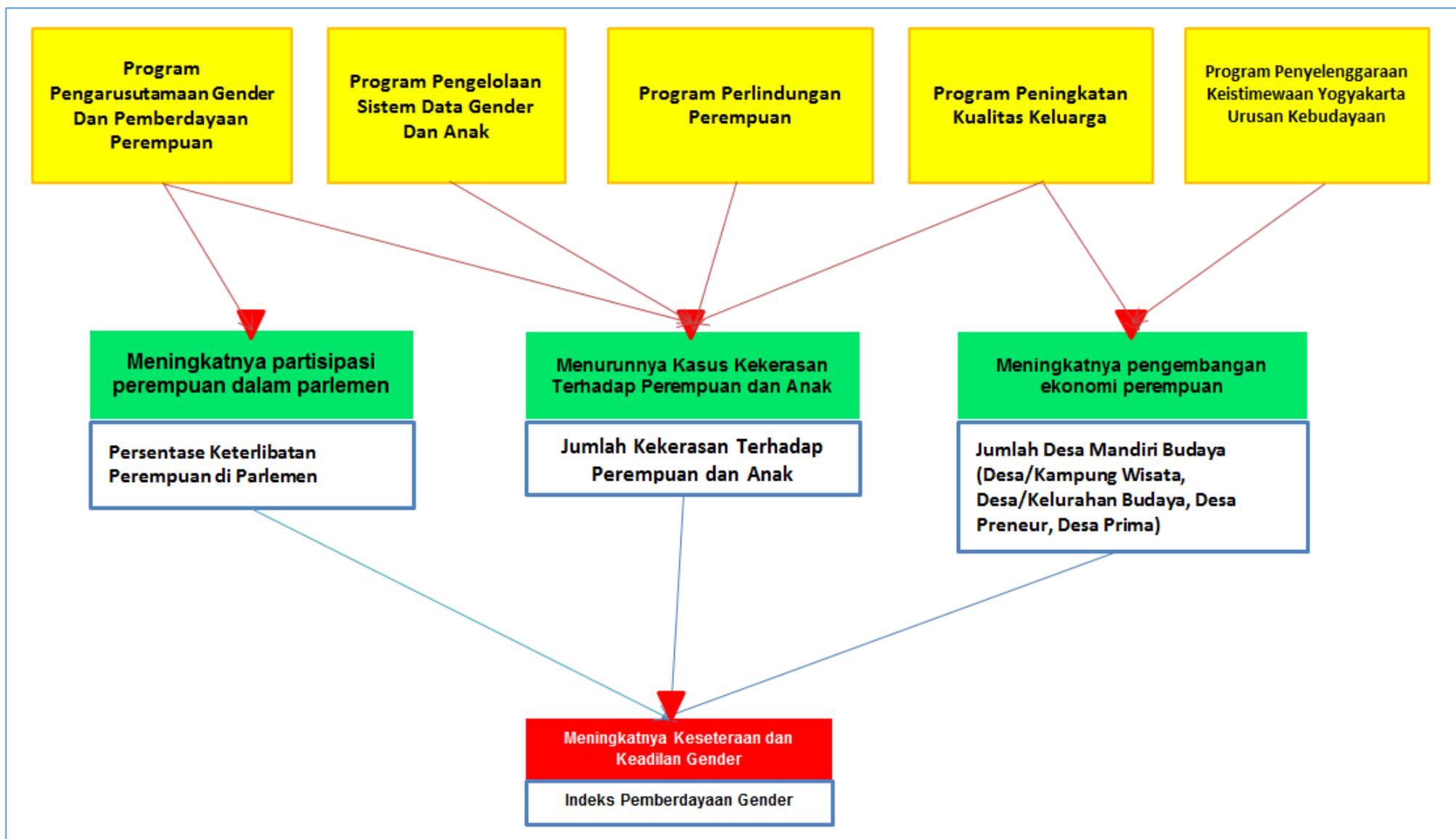
4.1.1.5.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Jangka Menengah Bidang Infrastruktur Dasar meningkatnya Rumah Tangga yang memiliki akses hunian yang layak dan terjangkau di DIY yaitu :

- a. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Layanan Dasar Perumahan
- b. Meningkatnya Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU)
- c. Meningkatnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki hunian yang layak dan terjangkau

4.1.1.6. Analisis ToC Bidang Kesetaraan Gender

Pada BAB III, telah dilakukan analisis atau identifikasi bidang Kesetaraan Gender. Dari hasil analisis masalah pada bidang Kesetaraan Gender, didapatkan indikator yang perlu perbaikan dan perhatian adalah Indeks Pemberdayaan Gender. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, analisis ToC Bidang Kesetaraan Gender di DIY diuraikan sebagai berikut:



4.1.1.6.1. Program Prioritas

Program Prioritas untuk meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender di DIY yaitu :

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- c. Program Perlindungan Perempuan
- d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- e. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

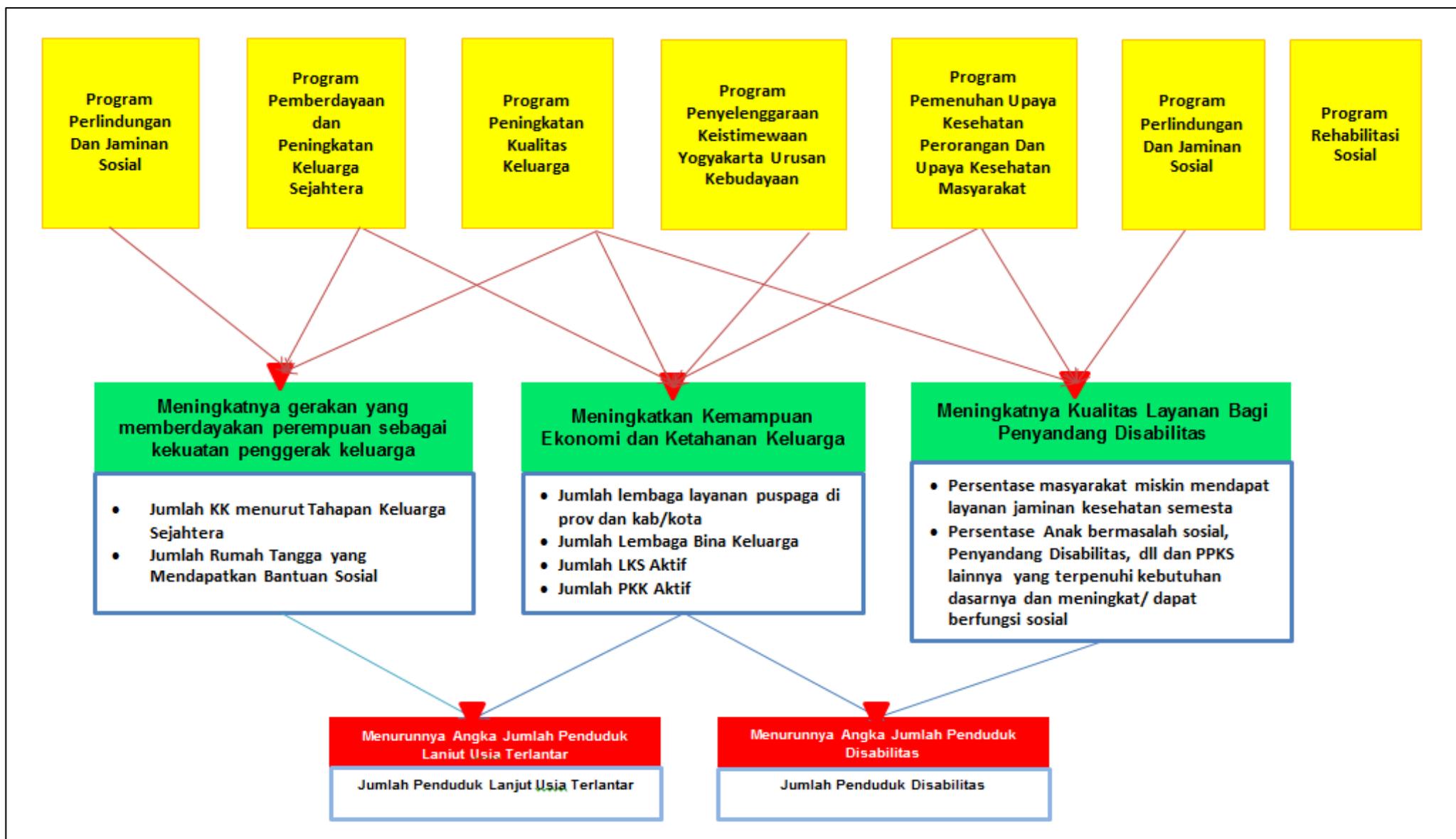
4.1.1.6.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Jangka Menengah Bidang Kesetaraan Gender meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender di DIY yaitu :

- a. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam parlemen
- b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- c. Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Perempuan

4.1.1.7. Analisis ToC Bidang Kesejahteraan Sosial

Pada BAB III, telah dilakukan analisis atau identifikasi bidang Kesejahteraan Sosial.. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, analisis ToC Bidang Kesejahteraan Sosial di DIY diuraikan sebagai berikut:



4.1.1.7.1. Program Prioritas

Program Prioritas untuk menurunnya Angka Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar dan Jumlah Penduduk Disabilitas di DIY yaitu :

- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial

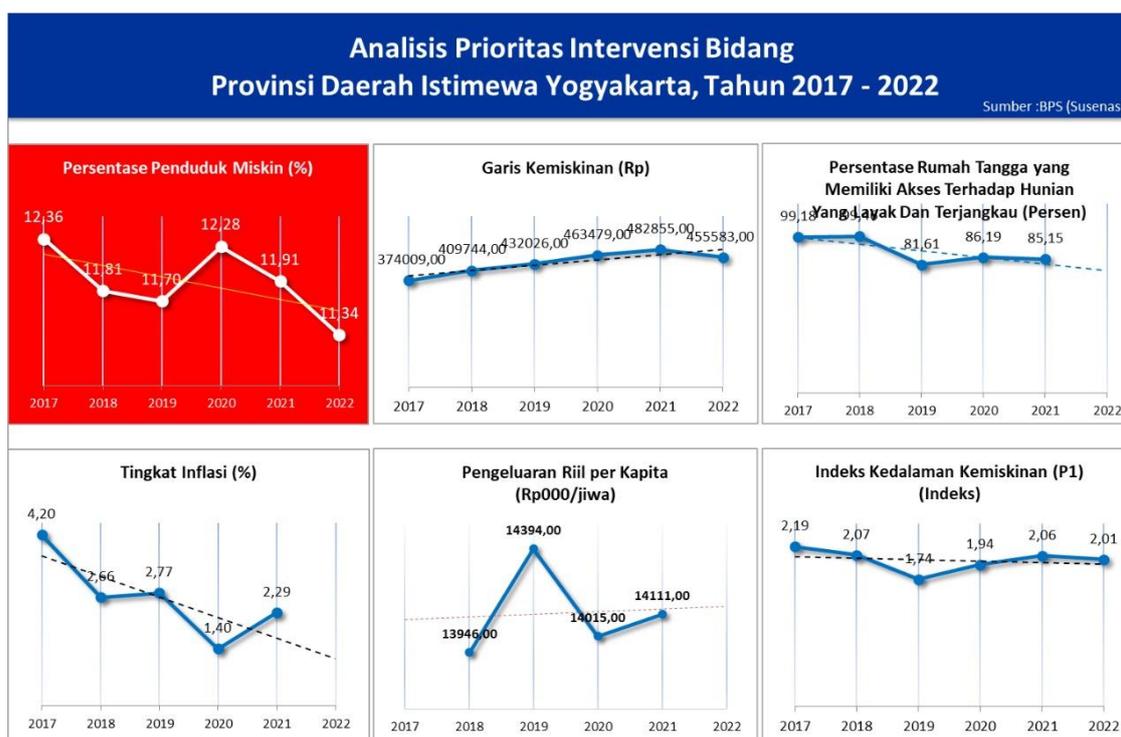
4.1.1.7.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Jangka Menengah Bidang Kesejahteraan Sosial Angka Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar dan Jumlah Penduduk Disabilitas di DIY yaitu :

- Meningkatnya gerakan yang memberdayakan perempuan sebagai kekuatan penggerak keluarga
- Meningkatkan Kemampuan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga
- Meningkatnya Kualitas Layanan Bagi Penyandang Disabilitas

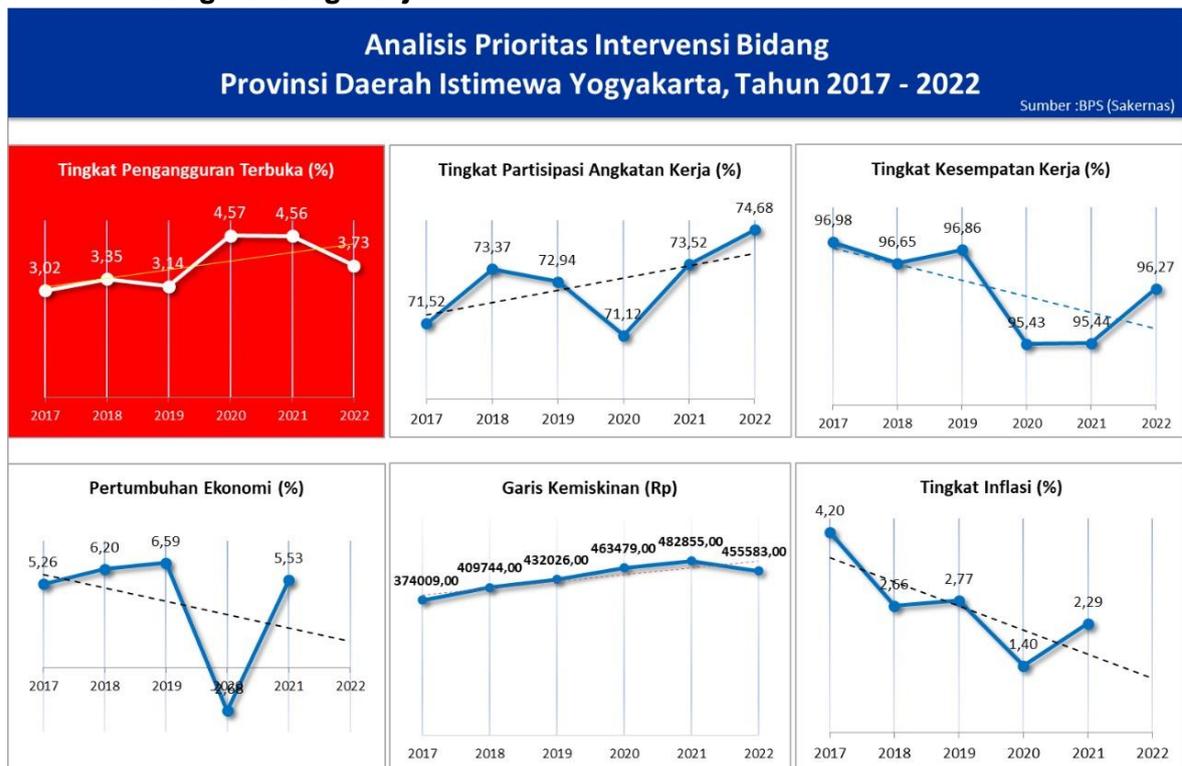
4.1.2. Casual Attribution

4.1.2.1. Bidang Kemiskinan Konsumsi



Berdasarkan grafik keterkaitan di atas, terlihat bahwa persentase penduduk miskin berkorelasi dengan tingkat inflasi dan pengeluaran riil per kapita (Rp 000/jiwa). Dimana pola perkembangannya hampir sama untuk kedua indikator tersebut. Sama halnya dengan rata-rata pengeluaran per kapita secara umum berkaitan dengan persentase penduduk miskin. Kondisi ini juga sejalan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).

4.1.2.2. Bidang Ketenagakerjaan



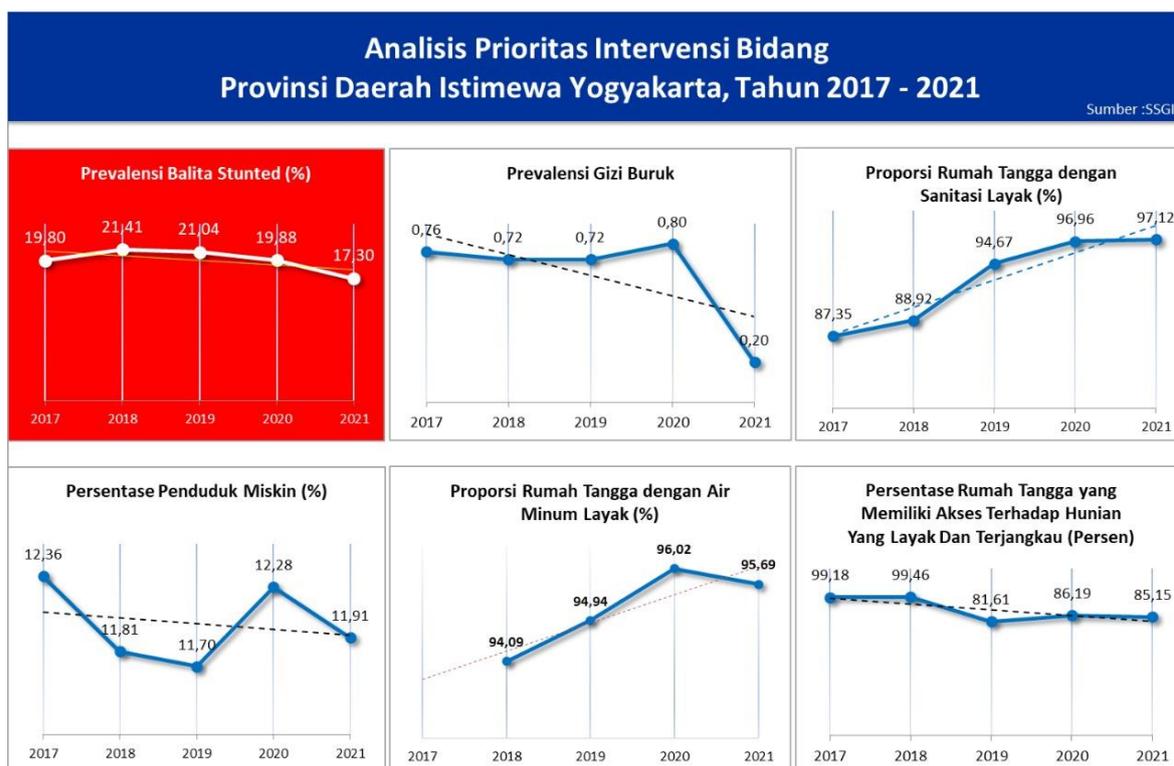
Pada sektor ketenagakerjaan, yang masih menjadi permasalahan di DIY yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Tujuan tersebut akan tercapai dengan meningkatkan daya saing dan memperluas kesempatan kerja sebagai sasaran antara yang harus diraih. Untuk melihat keterkaitan sasaran antara tersebut dengan tujuan utamanya dapat dilihat berdasarkan gambar di atas ini. Selama 5 tahun terakhir, kenaikan TPT di DIY tertinggi di Tahun 2020 yaitu 4,57%. Hal ini sejalan dengan posisi terendah tingkat kesempatan kerja, dan minusnya pertumbuhan ekonomi di DIY. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja.

Kenaikan TPT tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,57% naik 1,39% dibanding tahun 2019 sebesar 3,18%. Kondisi ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang berdampak besar terhadap sektor ketenagakerjaan. Kontraksi pada kesempatan kerja menyebabkan terjadinya penurunan penduduk yang bekerja sebanyak 48.396 orang. Kondisi tersebut yang menyebabkan capaian Program Pemerintah Daerah untuk Indikator TPT pada tahun 2020 dan 2021 tidak optimal kinerjanya. Upaya yang dilakukan

Pemda DIY untuk menurunkan tingkat pengangguran salah satunya melalui strategi perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja melalui kegiatan pemberdayaan dan pelatihan berbasis masyarakat.

4.1.2.3. Bidang Kesehatan

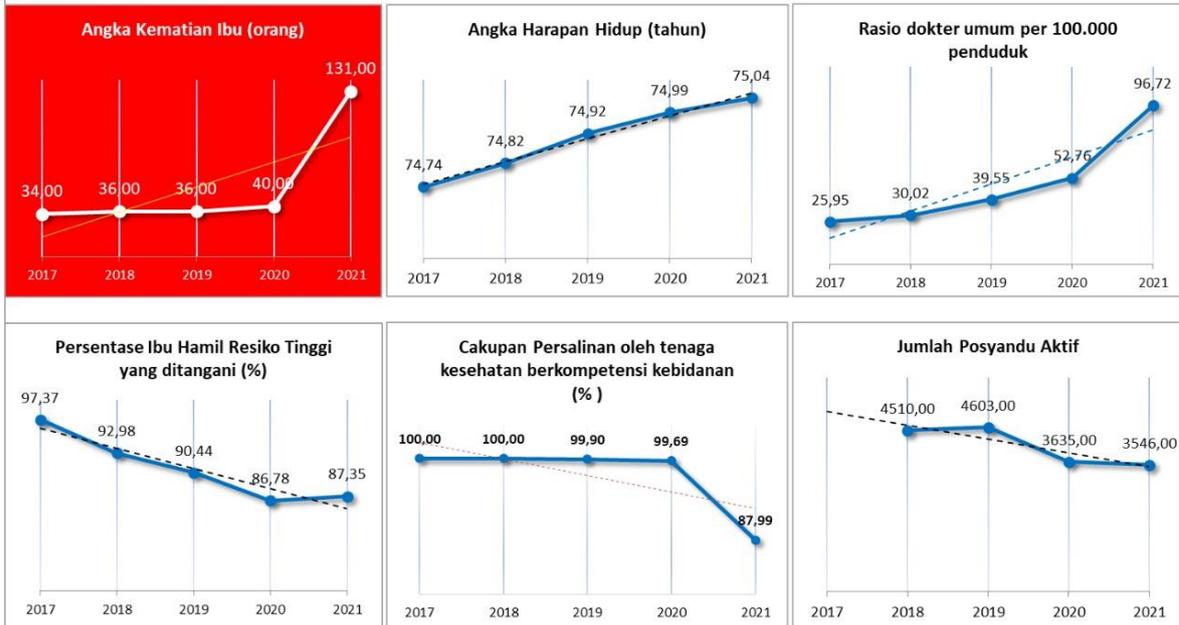
Pada sektor kesehatan, permasalahan yang perlu diintervensi di DIY yaitu prevalensi stunting dan Angka Kematian Ibu (AKI). Adapun keterkaitan antar indikator tersebut sebagai berikut:



Prevalensi stunting di DIY mengalami penurunan dari tahun ke tahun meskipun dengan penurunan yang lambat. Hal ini masih perlu perhatian khusus dikarenakan prevalensi stunting juga menjadi salah satu tujuan SDGs. Penurunan ini sejalan dengan indikator lain yaitu penurunan penduduk miskin, penurunan prevalensi gizi buruk, kenaikan persentase rumah tangga dengan sanitasi layak, kenaikan persentase rumah tangga dengan air minum layak, kenaikan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Stunting sering berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi, paparan suatu penyakit, dan asupan gizi yang kurang secara kuantitas dan kualitas. Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat karena berhubungan dengan meningkatnya resiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan motorik terlambat, dan terhambatnya pertumbuhan mental.

Analisis Prioritas Intervensi Bidang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2017 - 2021

Sumber : Dinas Kesehatan



Selain prevalensi stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) di DIY membutuhkan penanganan khusus karena jumlah kasusnya yang melonjak pesat di Tahun 2021. AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) nomor tiga yaitu fokus dalam upaya penurunan AKI. Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Pada tahun 2021 ini kasus kematian ibu kembali mengalami kenaikan yang sangat signifikan menjadi 131 kasus. Dari 131 kasus tersebut, 80 kasus karena terpapar Covid-19. Pada tahun 2021 paling banyak kasus kematian ibu di Kabupaten Sleman sebanyak 45 kasus dan Kabupaten Bantul 44 kasus.

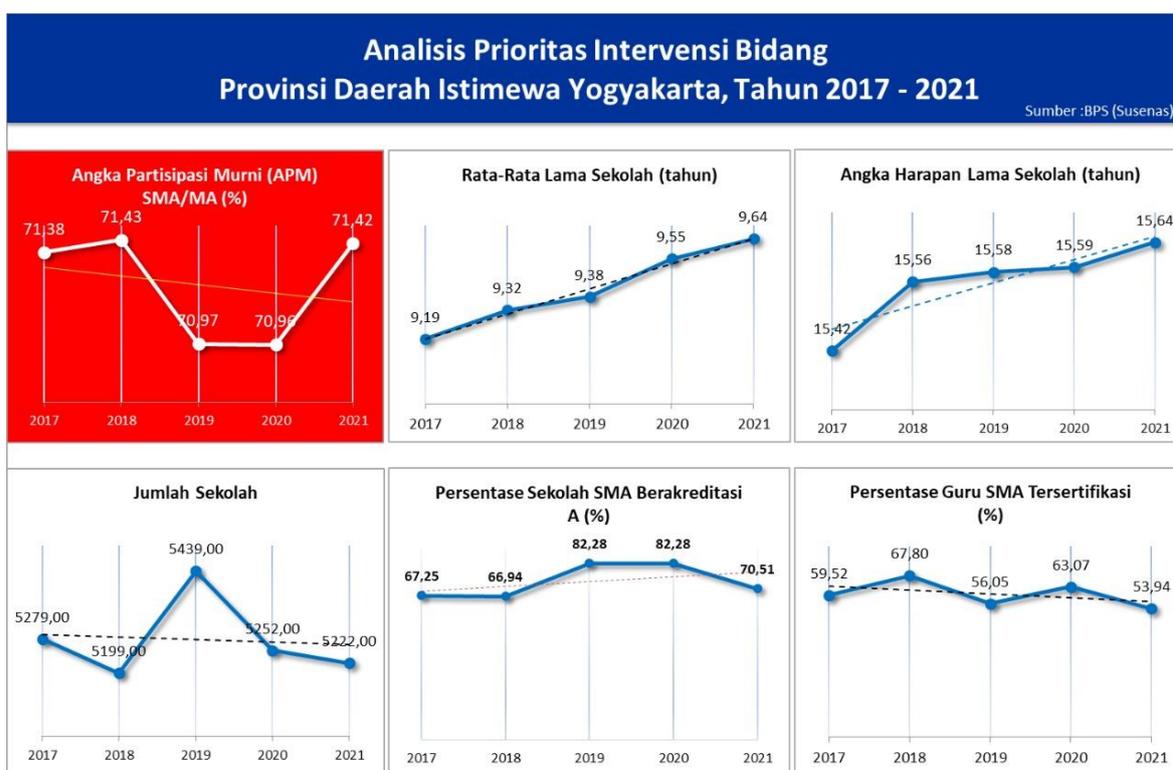
Kenaikan AKI Tahun 2021 sejalan dengan penurunan persentase ibu hamil resiko tinggi yang ditangani dan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan (%).

4.1.2.4. Bidang Pendidikan

Hasil analisis prioritas intervensi bidang Pendidikan di DIY dapat ditemukan untuk yang masih memerlukan perhatian khusus adalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/K. Meskipun terjadi kenaikan di Tahun 2021 yaitu di posisi 71,42%. Hal ini ingin melihat seperti apa tingkat partisipasi masyarakat DIY dalam menyekolahkan anaknya di sekolah menengah. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi

sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

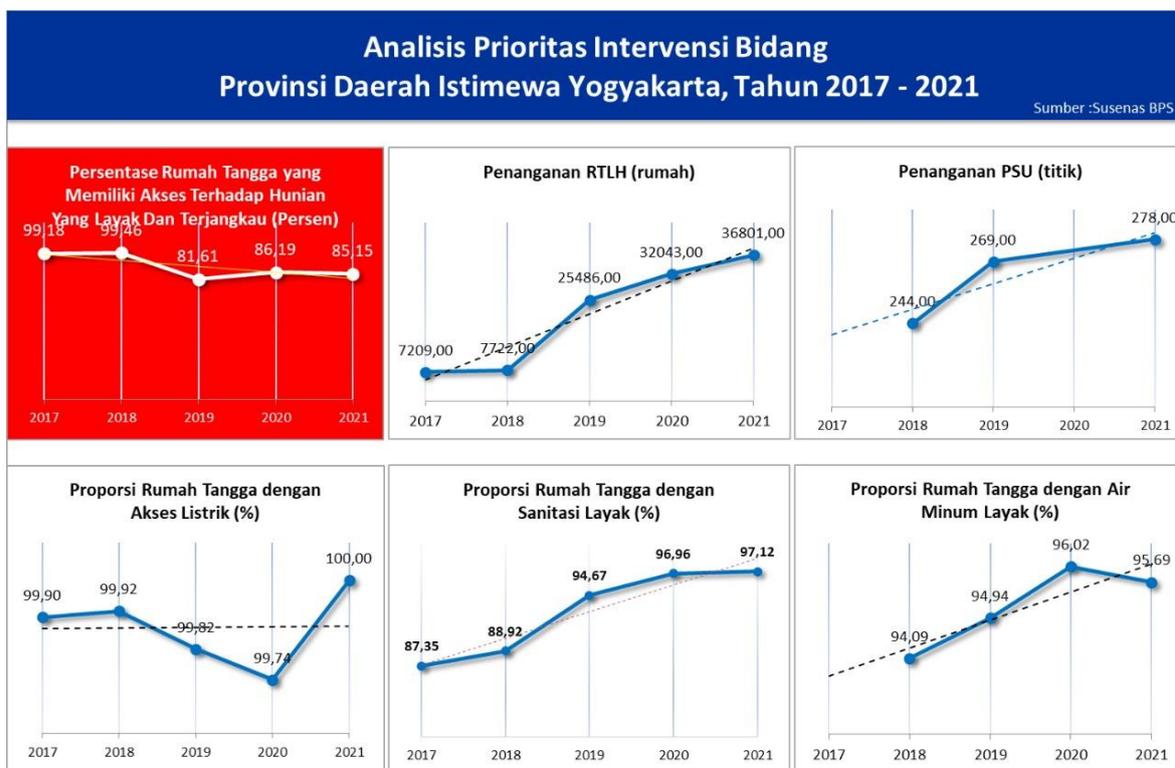
Capaian APM SMA/MA di DIY yang belum mendekati 100% berkorelasi dengan menurunnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Pendidikan terutama di tingkat menengah/tinggi. Seperti halnya dengan jumlah sekolah yang berkurang di tahun 2021, menurunnya persentase sekolah SMA berakreditasi A, penurunan jumlah guru SMA tersertifikasi. Dari kondisi ini, layanan pendidikan DIY menjadi fokus utama perbaikan yang mendukung peningkatan APM SMA/MA di DIY sehingga menuju 100%.



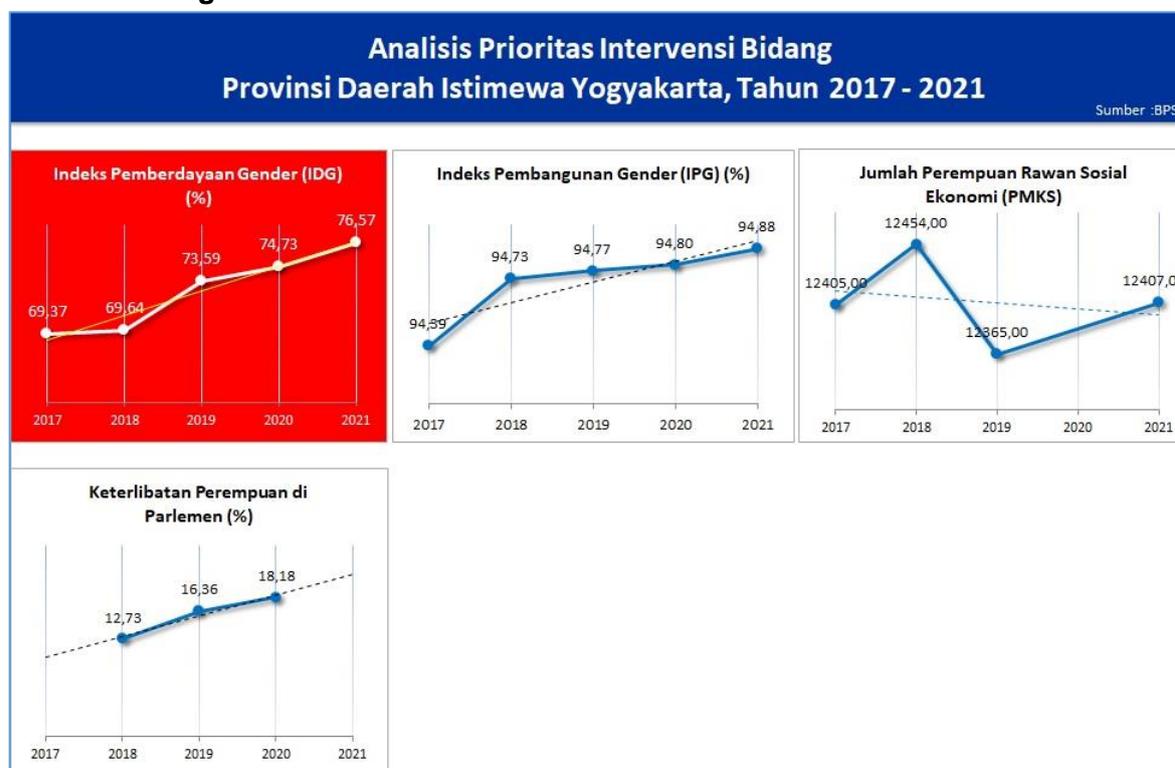
4.1.2.5. Bidang Infrastruktur Dasar

Pada bidang infrastruktur dasar permasalahan yang perlu diintervensi di DIY yaitu Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau. Dari hasil analisis, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak mengalami penurunan mulai di Tahun 2019 ke tahun 2021. Angka ini dan Terjangkau memiliki keterkaitan dengan penanganan RTLH dan PSU di DIY yang meningkat namun lambat. Namun, dalam mendukung Indikator sasaran cakupan hunian yang layak dan berkualitas, DIY terus berupaya untuk meningkatkan perbaikan maupun pembangunan baru terhadap RTLH. Hal ini juga sudah didukung dengan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik, Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi

Layak, dan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak di DIY yang sudah mendekati dan atau mencapai 100%.



4.1.2.6. Bidang Kesetaraan Gender



Pada bidang kesetaraan gender permasalahan yang perlu diintervensi di DIY yaitu Indeks Pemberdayaan Gender. Meskipun kondisinya tumbuh namun belum mendekati 100%, kondisi ini sejalan dengan kenaikan yang lambat pada indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen. Kondisi ini pun didukung dengan meningkatnya Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi pada data PMKS DIY Tahun 2021. Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di DIY yang diukur melalui IDG.

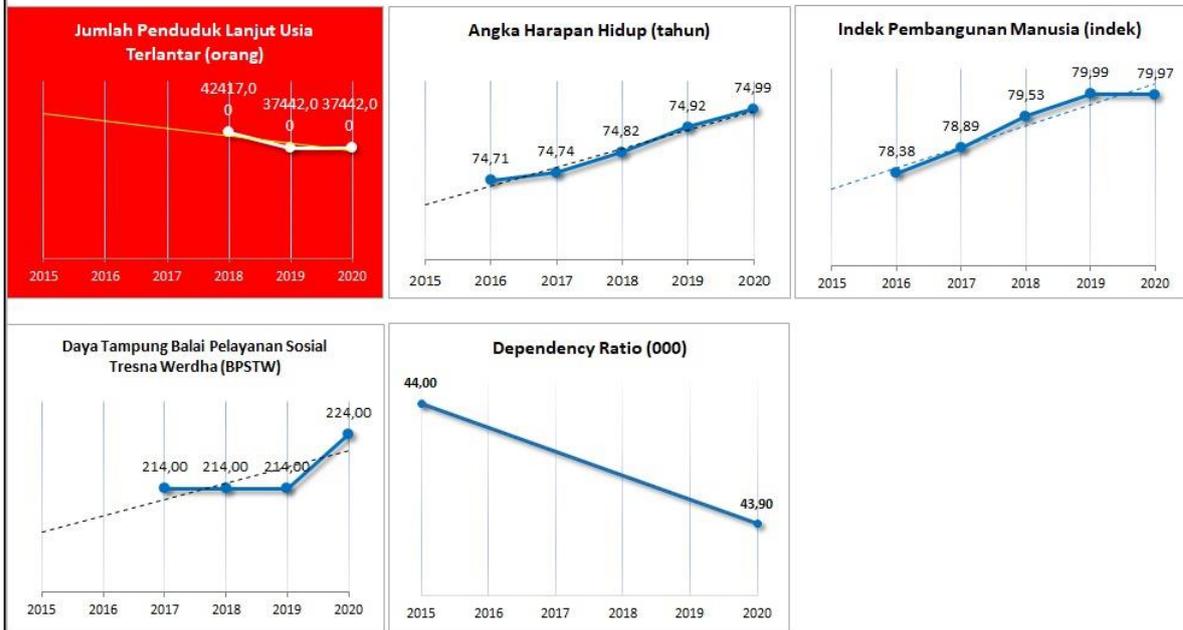
4.1.2.7. Bidang Kesejahteraan Sosial

Pada bidang kesejahteraan sosial permasalahan yang perlu diintervensi di DIY yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lebih spesifiknya indikator Lanjut Usia Terlantar (LUT) dan Penyandang Disabilitas. Dari permasalahan tersebut terdapat beberapa solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan jaminan sosial kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksudkan adalah lanjut usia, perempuan pada rumah tangga miskin dan kaum difabel.

Usia Harapan Hidup yang terus meningkat juga diikuti bertambahnya jumlah lanjut usia terlantar, diantara para lanjut usia dan lanjut usia terlantar sebagian besar belum memiliki jaminan kesehatan. Demikian pula dengan perempuan dalam rumah tangga miskin maupun kaum difabel. Oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana untuk melayani lanjut usia terlantar dan memberikan jaminan sosial termasuk didalamnya jaminan kesehatan. Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk DIY pada tahun 2021 adalah 75,04 tahun merupakan angka tertinggi di Indonesia, UHH yang tinggi juga diikuti dengan kenaikan jumlah lanjut usia terlantar, sebagian besar lanjut usia terlantar ini belum memiliki jaminan atau asuransi Kesehatan. Namun, jumlah dan kapasitas panti atau balai rehabilitasi sosial untuk melayani lanjut usia terlantar belum mencukupi. Di samping itu dengan tingginya Prevalensi Penyakit Tidak Menular di DIY, resiko lansia menjadi pengidap Penyakit Tidak Menular seperti kardiovaskuler, kanker dan lain-lain menjadi meningkat (meningkatkan Rasio Ketergantungan pada Lansia).

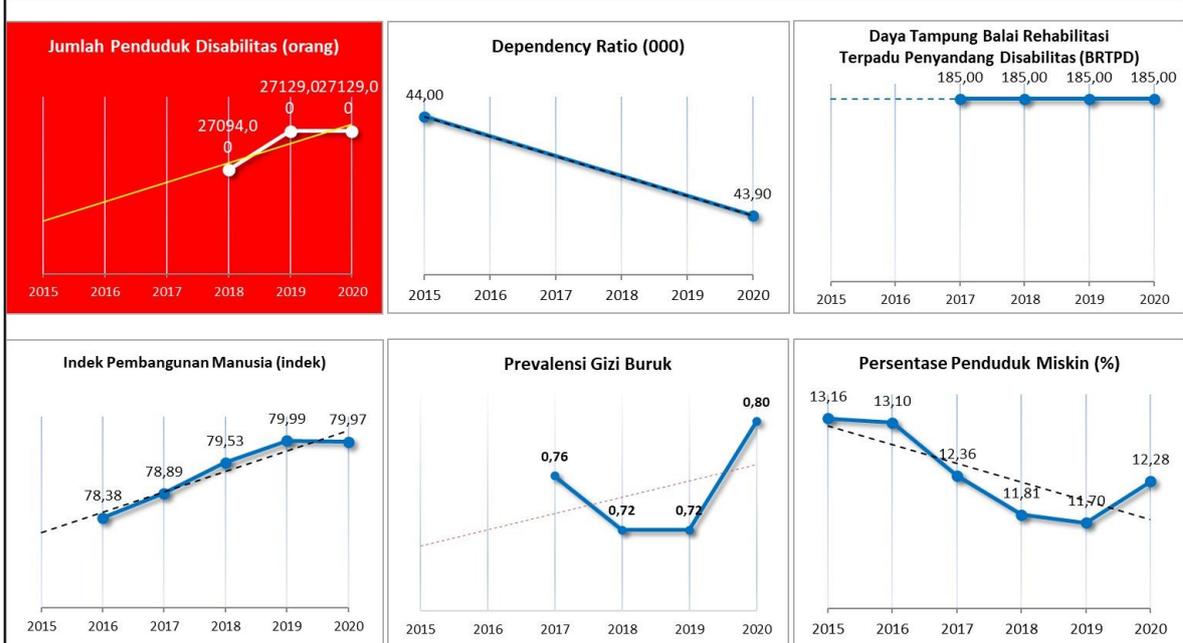
Analisis Prioritas Intervensi Bidang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2015 - 2020

Sumber :Dinsos



Analisis Prioritas Intervensi Bidang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2015 - 2020

Sumber :Dinsos



Penyandang disabilitas PPKS di DIY pada tahun 2021 adalah 26.866 orang, jumlah tersebut cukup besar, dan dari survei yang dilakukan oleh SMERU pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mengalami dampak lebih berat karena tidak dapat melakukan akses kesehatan untuk melakukan terapi ataupun berobat, juga

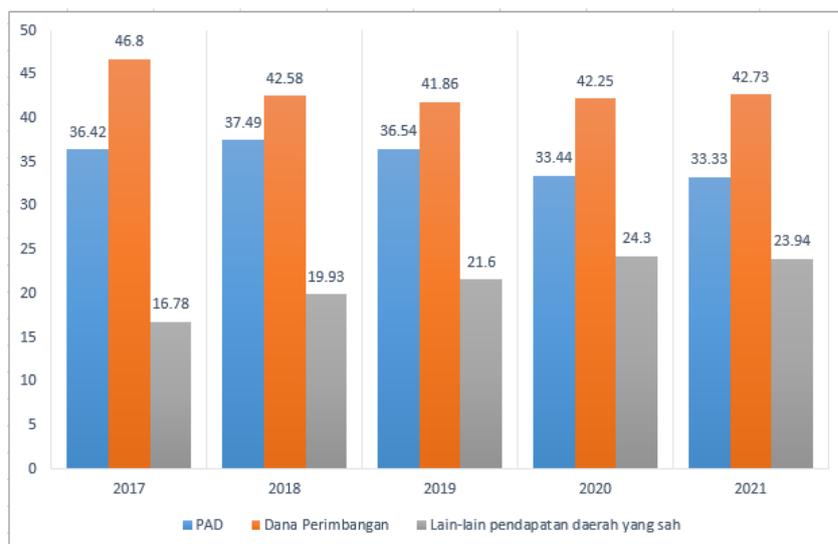
mengalami kehilangan sumber pendapatan sebagai dampak pandemi. Sehingga kedepannya, pembangunan Inklusif yang mencakup kepentingan kelompok rentan harus dikedepankan.

4.2. Analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan

4.2.1. Kemandirian Fiskal

Pengelolaan Barang Milik Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lebih lanjut, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur DIY Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang kemudian dicabut melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah Pemda DIY dan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hingga tahun 2021, Pemda DIY tercatat telah menerima opini WTP sebanyak sebelas kali berturut-turut.

Terkait pendapatan daerah, hingga kini Dana Perimbangan masih menjadi andalan Pemda DIY dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah yang terus meningkat. Proporsi Dana Perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah DIY setidaknya selama kurun waktu 2016-2020 dengan besaran yang cenderung fluktuatif. Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan fiskal DIY terhadap Pusat serta belum terwujudnya kemandirian fiskal DIY. Sementara itu, PAD DIY terus mengalami penurunan sejak 2018 hingga 2020. Adapun PAD DIY berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berbeda dengan PAD DIY, pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat terus meningkat sepanjang 2016-2020. Pendapatan ini antara lain berasal dari hibah serta dana penyesuaian dan otonomi khusus. Gambaran mengenai distribusi pendapatan daerah menurut komponen di DIY tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut :



Sumber: BPKA DIY, 2016-2021, diolah

Distribusi Pendapatan Daerah menurut Komponen di DIY (%), 2016-2021

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, diterapkanlah suatu sistem yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Sistem tersebut dikenal sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah. Pembentukan BLUD diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Pengelolaan keuangan BLUD merupakan pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan BLUD di lingkungan Pemda DIY diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pada Tahun 2021, Pemda DIY memiliki 9 (sembilan) BLUD, yakni SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 1 Sewon, SMKN 3 Wonosari, Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT), RSJ Grhasia, Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) DIY, Balai Laboratorium dan Kalibrasi Kesehatan (BLKK) DIY, Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapeljamkesos) , dan RS Khusus Paru Respira. Jumlah BLUD tersebut diperkirakan akan bertambah khususnya BLUD yang berasal dari SMK Negeri karena terdapat beberapa SMK yang sedang berproses melengkapi persyaratan untuk menerapkan BLUD, baik persyaratan substantif, teknis dan administratif.

Total jumlah aset mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 276.447 barang atau 8,5%. Pada tahun 2020 jumlah barang yang merupakan aset DIY

sebanyak 3.248.384 yang terdiri dari aset pengguna 3.245.216 barang (dengan nilai perolehan Rp. 11.637.502.126.897,00) dan aset pengelola 3.168 barang (dengan nilai perolehan Rp. 974.055.947.161,00). Jumlah ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 3.524.831 barang yang terdiri atas aset pengguna 3.521.730 barang (nilai perolehan Rp13.245.163.989.328,40) dan aset pengelola 3.101 barang (nilai perolehan Rp775.180.466.494,00). Data mengenai jumlah aset DIY disajikan dalam tabel berikut.

Jumlah Aset di Pengguna dan Pengelola

Tahun	Pemda DIY*		Pengguna		Pengelola	
	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)
2021	3.524.831	14.020.344.455.822,40	3.521.730	13.245.163.989.328,40	3.101	775.180.466.494
2020	3.248.384	12.611.558.074.058,10	3.245.216	11.637.502.126.897	3.168	974.055.947.161
2019	3.021.082	11.741.545.	3.019.419	10.743.032.279.959	1.663	998.513.633.279

sumber : BPKA, 2022

Aset tersebut kemudian dioptimalkan melalui kemitraan yang terdiri dari pinjam pakai dan sewa. Pada tahun 2021 terdapat 185 barang yang dimitrakan dengan perolehan Rp139.223.912.185,00.

Jumlah Aset yang Dioptimalkan

Tahun	Kemitraan	
	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
2021	185	139.223.912.185,00
2020	243	248.152.811.375,00
2019	255	308.784.539.571,00

sumber : BPKA, 2022

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari laba BUMD yaitu PT Tarumartani, PT AMI, PT Bank BPD DIY, dan ASKRIDA, BUKP, dan Perumda Tirtatama. Persentase deviden masing-masing BUMD terhadap penyertaan modal bervariasi. Pada tahun 2021, persentase deviden terhadap penyertaan modal terbesar terdapat pada BUKP sebesar 31,93% dan terkecil terdapat pada PT. AMI sebesar 3,35%.

Persentase Dividen BUMD terhadap Penyertaan Modal, 2017 – 2021

BUMD	2018	2019	2020	2021
PT TARUMARTANI	0%	5,84%	0,94%	7,68%
BPD DIY	15,53%	14,77%	13,54%	10,68%
PT AMI	3,50%	3,91%	3,81%	3,35%
ASKRIDA	32,56%	37,69%	15,05%	14,76%

BUKP	26,70%	30,16%	30,13%	31,93%
PERUMDA TIRTATAMA	n/a	n/a	n/a	n/a

sumber : BPKA DIY, 2022

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Analisis Kemampuan Fiskal Seperti diketahui bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah maka pemerintah pusat melakukan perubahan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa. Perubahan tersebut mencakup:

1. Perubahan struktur dan cakupan transfer ke daerah dan dana desa;
2. Peningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa;
3. Reformulasi kebijakan transfer ke daerah, meliputi Dana Transfer Umum (DTU),
4. Dana Transfer Khusus (DTK), dan Dana Insentif Daerah (DID);
5. Kebijakan Dana Desa;
6. Kebijakan Dana Keistimewaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel Kategori Kapasitas Fiskal Provinsi

Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Provinsi
IKFD < 0,275	Sangat Rendah
0,275 ≤ IKFD < 0,458	Rendah
0,458 ≤ IKFD < 0,863	Sedang
0,863 ≤ IKFD < 1,745	Tinggi
IKFD ≥ 1,745	Sangat Tinggi

Tabel Kategori Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota

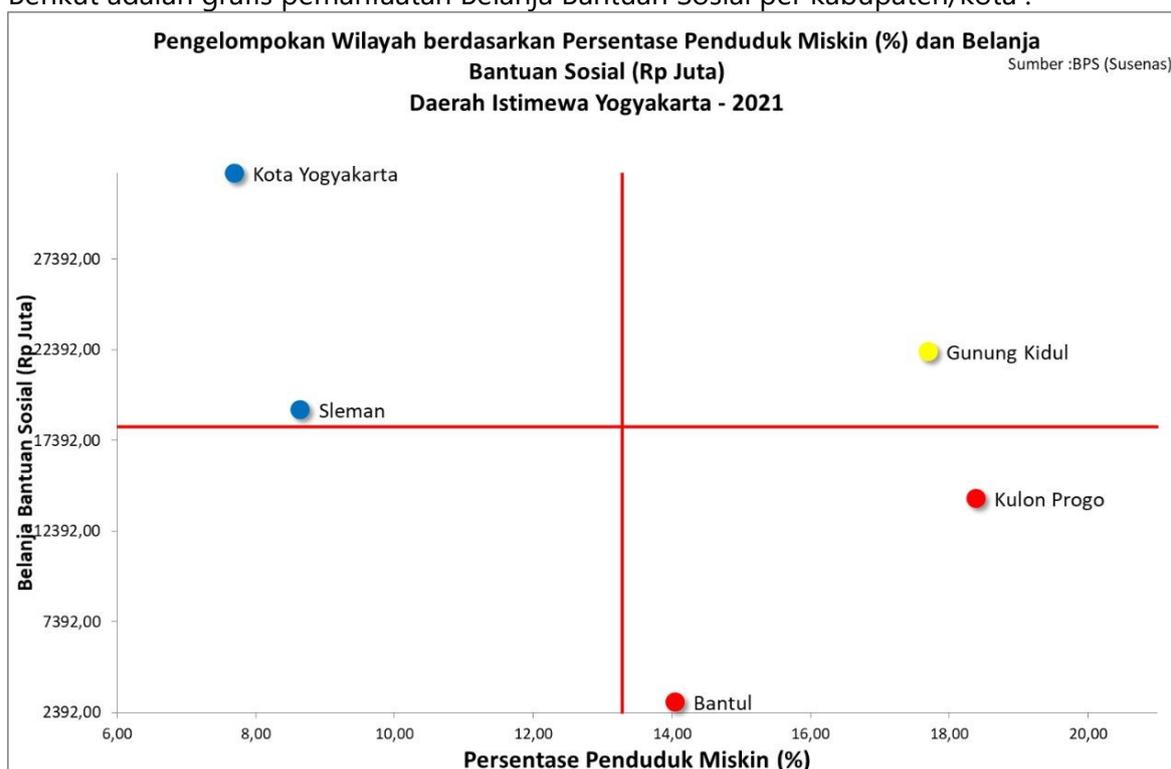
Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota
IKFD < 0,530	Sangat Rendah
0,530 ≤ IKFD < 0,727	Rendah
0,727 ≤ IKFD < 1,053	Sedang
1,053 ≤ IKFD < 1,838	Tinggi
IKFD ≥ 1,838	Sangat Tinggi

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 menggunakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Kapasitas Fiskal DIY dan Kabupaten/Kota tertuang pada tabel di bawah ini :

Tabel Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
DIY	0,269	Sangat Rendah
Kabupaten Bantul	1,487	Tinggi
Kabupaten Gunungkidul	0,934	Sedang
Kabupaten Kulon Progo	0,913	Sedang
Kabupaten Sleman	1,954	Sangat Tinggi
Kota Yogyakarta	1,529	Tinggi

Berikut adalah grafis pemanfaatan Belanja Bantuan Sosial per kabupaten/kota :



4.2.2. Keleluasaan Fiskal

Ruang fiskal menunjukkan tingkat keleluasaan penggunaan anggaran oleh Pemerintah Daerah setelah memenuhi semua kewajibannya. Semakin besar ruang fiskal, maka akan semakin mudah bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan bagi

program dan kegiatan termasuk program-program penanggulangan kemiskinan. Perkembangan Ruang Fiskal Kabupaten DIY dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Uraian	Pendapatan dan Belanja (Rp Juta)				
	2017	2018	2019	2020	2021
PAD	3,649,849.33	3,883,991.89	4,328,667.49	4,743,594.20	1,900,923.07
Dana Perimbangan	8,553,951.60	8,379,471.78	8,607,154.67	8,747,275.71	2,436,884.45
DAK	2,271,664.15	2,412,468.63	2,580,404.65	2,656,888.88	1,079,416.45
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2,067,063.17	2,362,600.24	3,024,483.93	3,495,770.64	7,321.57
Danais	800,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,320,000.00
Pendapatan	17,342,528.25	18,038,532.54	19,540,710.74	20,843,529.43	6,744,545.55
Belanja Tidak Langsung	8,170,480.72	8,073,976.81	8,831,768.61	9,597,773.76	n/a
Belanja Langsung	6,728,083.30	7,342,521.25	8,160,249.05	8,322,062.99	n/a
Total Belanja	14,898,564.03	15,416,498.06	16,992,017.66	17,919,836.75	n/a

4.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Penanggulangan Kemiskinan

Setelah melakukan analisis yang meliputi Bidang Kemiskinan Konsumsi, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Infrastruktur Dasar dan Bidang Ketahanan Pangan, kita sudah mendapatkan permasalahan dari masing-masing bidang. Setelah itu dilakukan analisis keterkaitan sehingga ketemu akar permasalahan dari masing-masing atau prioritas intervensi. Namun untuk menyelesaikan berbagai akar permasalahan masing-masing bidang dan mengkonkritkan menjadi program dan kegiatan tentu tidaklah mudah, pasti ada hambatan, namun disisi lain pasti ada juga faktor pendorong. Berikut adalah beberapa faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di DIY:

4.4. Kekuatan

- Tersedianya potensi sumber daya alam pertanian dan perikanan;
- Terdapat perguruan tinggi dan lembaga penelitian di berbagai bidang;
- Terdapat potensi sumber daya manusia yang unggul baik dari aspek pendidikan maupun kesehatan;
- Tersedianya tenaga kerja lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
- Terdapat keragaman daya tarik wisata seperti wisata alam, kuliner, budaya, dan lainnya;
- Terdapat kekayaan tradisi budaya dan kearifan lokal;
- Tingginya peluang untuk membuka usaha baru.
- Tersedianya potensi sumber daya alam di Kawasan Selatan /pesisir
- Terdapat perguruan tinggi dan lembaga penelitian di berbagai bidang
- Terdapat keragaman daya tarik wisata seperti wisata alam, kuliner, budaya, dan lainnya

- k. Terdapat kekayaan tradisi budaya dan kearifan lokal
- l. Tingginya peluang untuk membuka usaha baru
- m. Komitmen pimpinan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- n. Kesadaran SDM aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi
- o. Sistem manajemen kinerja yang baik
- p. Kepatuhan unit layanan terhadap standar pelayanan publik dalam UU 25/2009 tentang pelayanan publik sudah tinggi
- q. Tingkat demokrasi DIY yang baik
- r. Tingkat pemanfaatan teknologi informasi yang relatif tinggi
 - i. Terdapat perguruan tinggi dan lembaga penelitian di berbagai bidang
 - ii. Regulasi perencanaan yang mendukung kondisi lingkungan hidup yang lebih baik
 - iii. Potensi sumber daya alam yang beragam
- iv. Masyarakat yang responsif dan adaptif terhadap bencana ((penomoran))

4.5. Kelemahan

- a. Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja, terutama pada sektor primer dan sekunder;
- b. Perilaku masyarakat yang belum sehat dan ramah lingkungan;
- c. Terbatasnya lapangan pekerjaan;
- d. Rendahnya kapasitas fiskal;
- e. Meningkatnya komposisi penduduk usia lanjut;
- f. Tingginya angka PMKS termasuk di dalamnya masalah kemiskinan dan kejahatan jalanan;
- g. Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal;
- h. Belum adanya satu data indikator makro dan mikro penduduk miskin;
- i. Rendahnya kualitas tata kelola Kalurahan.
 - i. Rendahnya kapasitas fiskal
 - ii. Penduduk didominasi usia tidak produktif
 - iii. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi
- iv. Aksesibilitas Kawasan Selatan DIY yang masih kurang
- v. Kondisi topografi yang membatasi aktivitas ekonomi dan pembangunan
- vi. Kualitas sumber daya manusia di Kawasan Selatan yang belum merata
- vii. Rendahnya investasi di Kawasan Selatan
- j. Kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur belum merata
- k. Sarana & prasarana penunjang kebutuhan dalam melaksanakan ketugasan kurang memadai

- l. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan aparat
- m. Ketergantungan fiskal yang masih tinggi
- n. Pelayanan publik masih belum prima
- o. Ego sektoral dalam pelaksanaan urusan pemerintahan masih berlangsung
- p. Kapasitas dan aksesibilitas internal birokrasi dan masyarakat atas teknologi informasi masih beragam
- q. Terdapat pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan belum terwujud sesuai perencanaan
- r. Perilaku masyarakat yang belum ramah lingkungan
- s. Wilayah DIY yang rawan bencana
- t. Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang

4.6. Isu Strategi Penanggulangan Kemiskinan

1. Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia yang memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.
2. Selain itu terdapat ketimpangan penyebaran penduduk, di satu sisi wilayah perkotaan semakin mengalami peningkatan kepadatan penduduk, sedangkan di wilayah-wilayah pedesaan mengalami perpindahan penduduk menuju kota khususnya kelompok usia muda, produktif, dan lebih terdidik. Beberapa wilayah pedesaan bahkan mengalami pertumbuhan penduduk yang berkurang (depopulasi).
3. Wilayah-wilayah pedesaan menghadapi kekurangan tenaga kerja dan sumberdaya manusia yang potensial untuk pembangunan wilayah. Pertambahan penduduk di kota juga diakibatkan oleh lulusan lembaga-lembaga pendidikan berasal dari luar daerah yang tidak ingin kembali ke daerahnya sesudah menamatkan pendidikan.
4. Jika melihat dari perkembangan jumlah penduduk terutama usia produktif di DI. Yogyakarta per tahunnya merupakan isu strategis yang perlu ditangkap dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun yang diantaranya merupakan daerah kritis sumber daya.
5. Ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota.

6. Pengendalian distribusi penduduk dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan memberikan penekanan pada pembangunan wilayah-wilayah desa untuk mengurangi kesenjangan dengan pembangunan perkotaan.
7. Pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang memadai.

4.7. Asas dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di DIY ((ditambah asas))

Strategi penanggulangan kemiskinan DIY dilakukan dengan :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
4. Sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan sesuai dengan Permendagri 53 Tahun 2020 adalah :

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan sesuai dengan Perda DIY Nomor 11 Tahun 2019 adalah :

1. Perlindungan dan jaminan sosial,
2. Rehabilitasi sosial,
3. Pemberdayaan masyarakat,
4. Pemenuhan akses terhadap sumber daya,

Dalam pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan minimal telah memenuhi satu dari lima kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan, yaitu :

1. Menggunakan DTKS
2. Menggunakan data kemiskinan lain

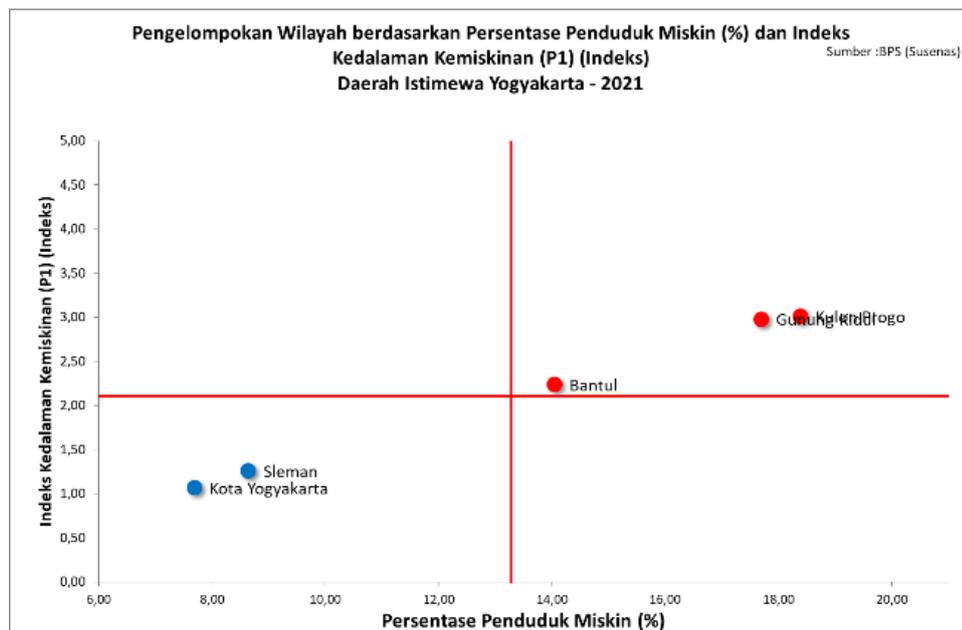
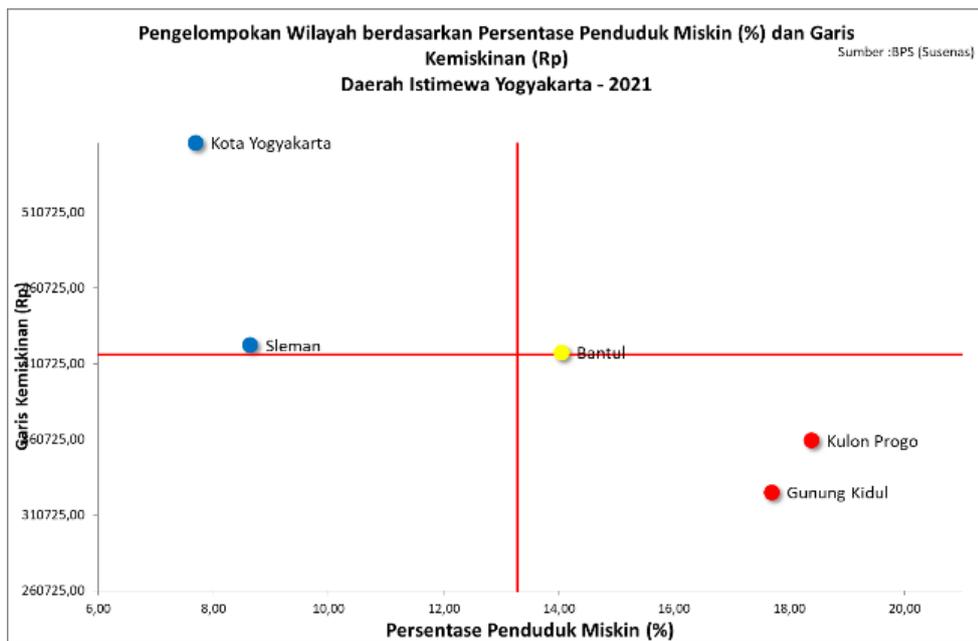
3. Menyentuh lokasi kemiskinan
4. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan kemampuan dan pendapatan ekonomi masyarakat miskin, dan
5. Keterlibatan pemerhati masyarakat miskin atau bertema masyarakat miskin dalam setiap tahapan pembangunan daerah.

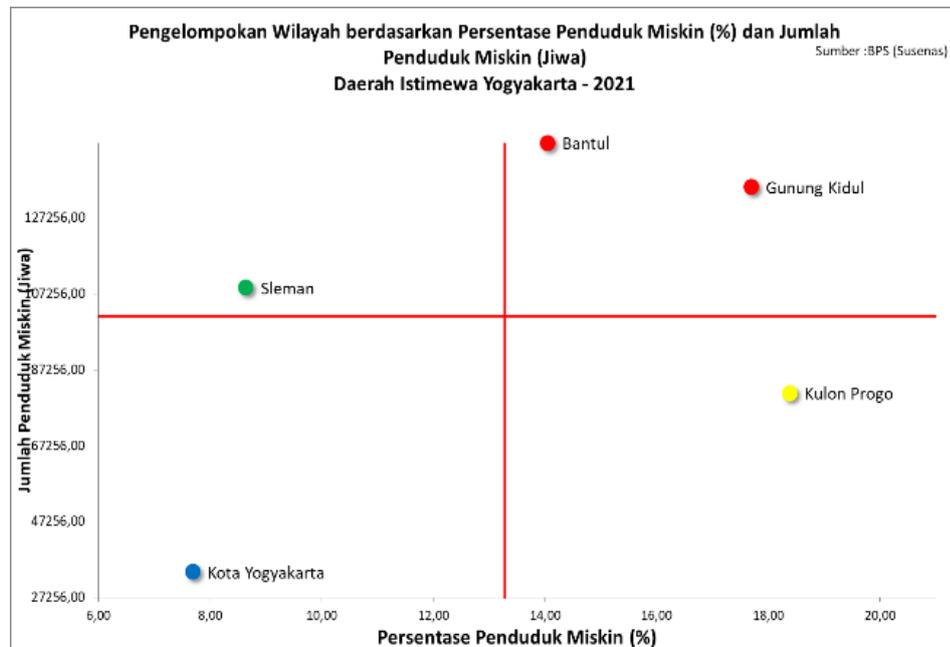
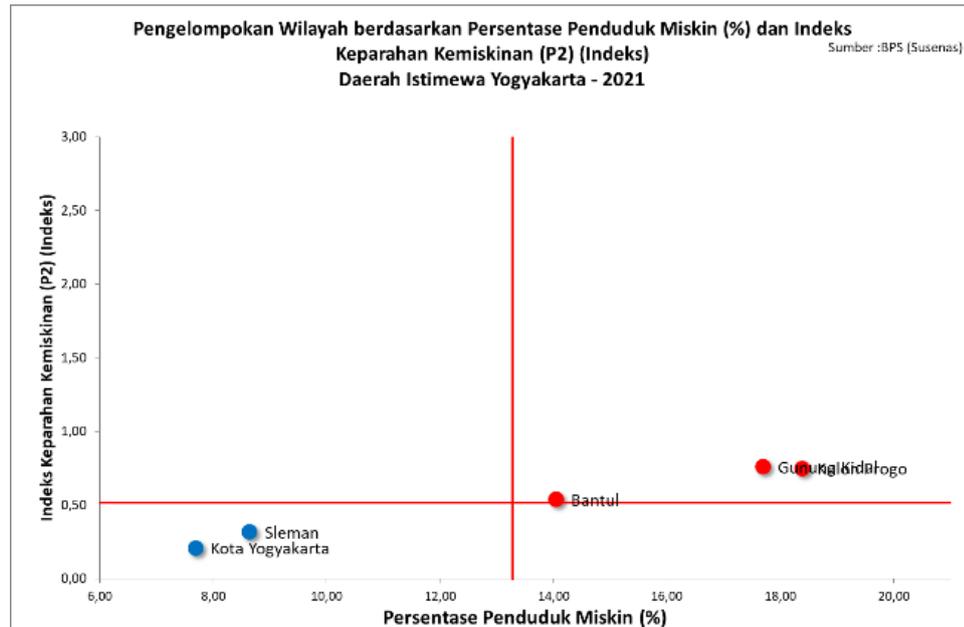
BAB V LOKASI PRIORITAS

5.1. Penentuan Lokasi Prioritas

5.1.1. Bidang Kemiskinan Konsumsi

Penentuan lokasi prioritas program berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penentuan prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan di DIY disajikan pada gambar sebagai berikut.





Gambar tersebut menunjukkan bahwa indikator persentase penduduk miskin (indikator utama) apabila disandingkan dengan indikator pendukung berupa indikator Garis Kemiskinan (Rp), Indeks Kedalaman (P1), Indeks Keparahan (P2) dan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) maka dihasilkan beberapa kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk diintervensi pada program penanggulangan kemiskinan. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa garis kemiskinan yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Indeks Kedalaman (P1) yaitu Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Indeks Keparahan (P2) yaitu Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul. Lokasi prioritas pada indikator pendukung berupa Jumlah Penduduk Miskin yaitu Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.

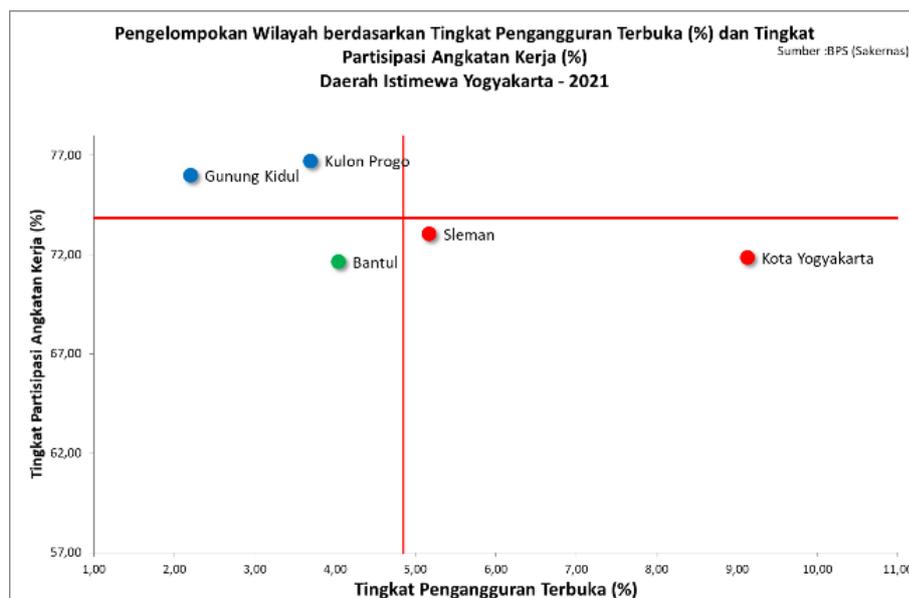
Kabupaten/Kota	Indikator Utama (% penduduk miskin)	Indikator Pendukung				Prioritas
		Garis Kemiskinan (Rp)	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	
Kulon Progo						2
Bantul						3
Gunungkidul						1
Sleman						4
Kota Yogyakarta						5

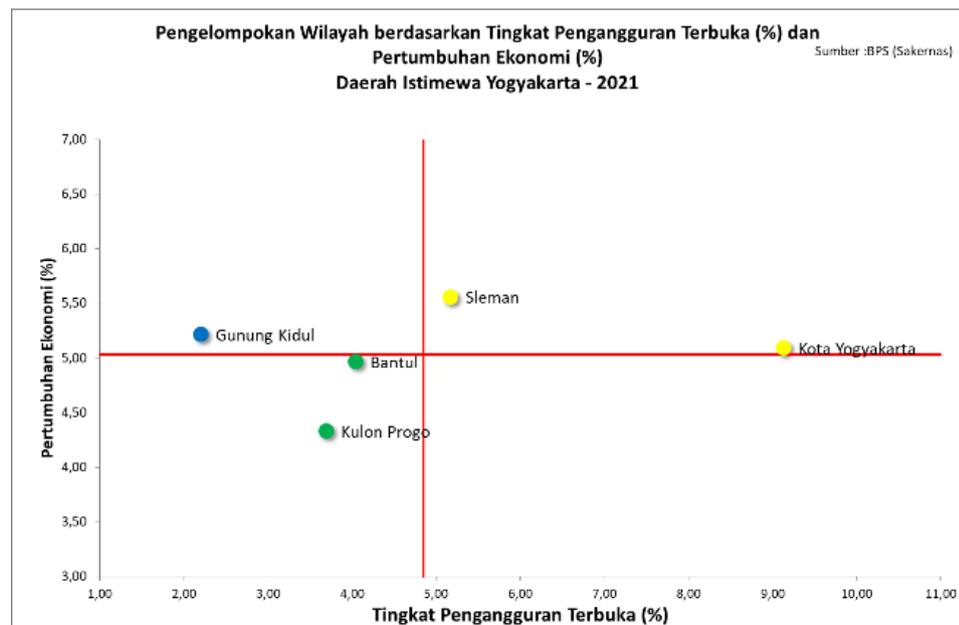
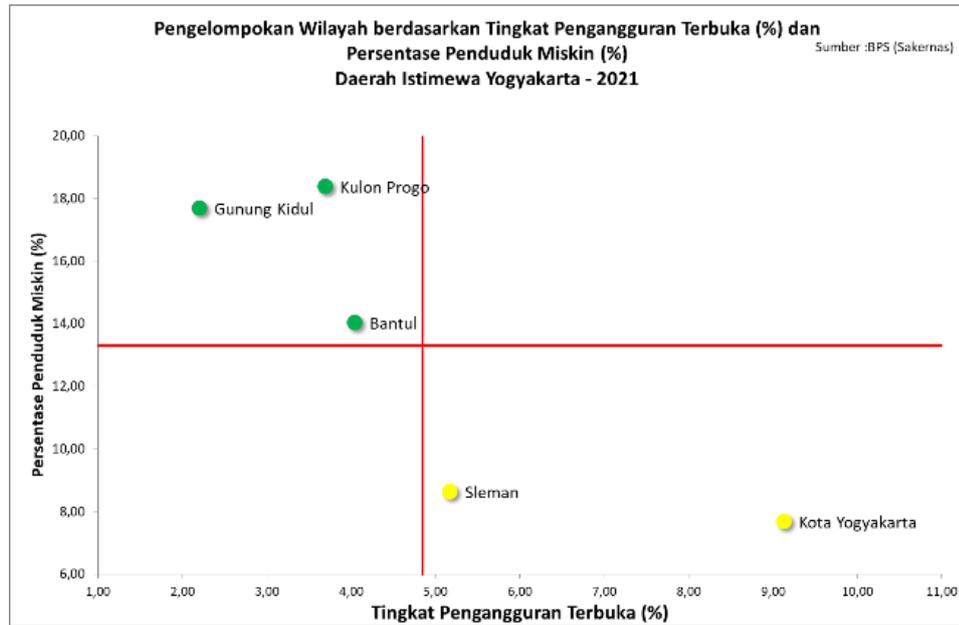
Keterangan: merah= prioritas 1; kuning=prioritas 2; hijau= prioritas 3; dan biru=prioritas 4

Berdasarkan analisa perbandingan keempat indikator kemiskinan (utama dan pendukung) tersebut, maka skala prioritas kabupaten/kota yang dilakukan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan di DIY secara berurutan yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul, Sleman, kemudian Kota Yogyakarta.

5.1.2. Bidang Ketenagakerjaan

Penentuan lokasi prioritas program berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penentuan prioritas wilayah bidang ketenagakerjaan di DIY disajikan pada gambar sebagai berikut.





Gambar tersebut menunjukkan bahwa indikator persentase Pengangguran Terbuka (indikator utama) apabila disandingkan dengan indikator pendukung berupa indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Persentase Penduduk Miskin, dan Pertumbuhan Ekonomi maka dihasilkan beberapa kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk diintervensi pada program penanggulangan kemiskinan khususnya bidang ketenagakerjaan. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, sedangkan pada indikator pendukung Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi tidak ada kabupaten/kota yang masuk pada lokasi prioritas 1.

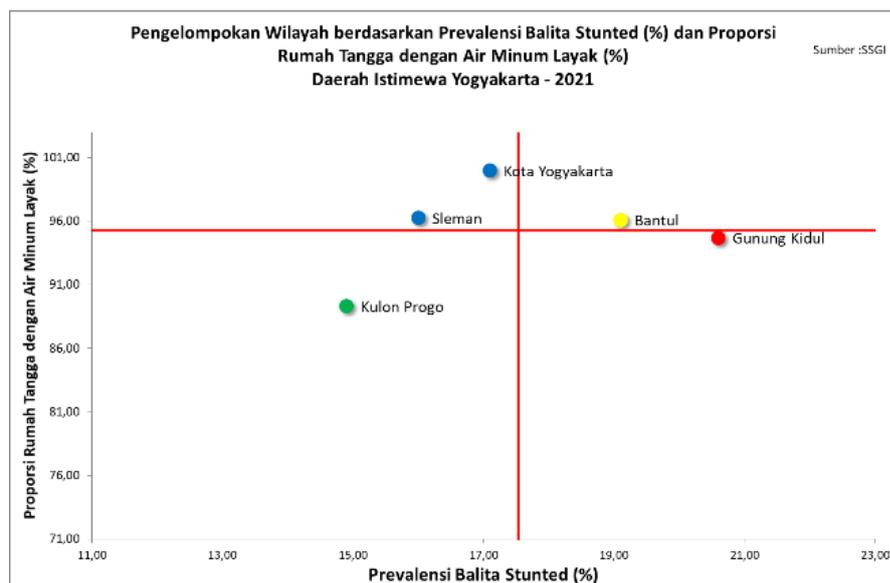
Kabupaten/Kota	Indikator Utama (% Tingkat Pengangguran Terbuka)	Indikator Pendukung			Prioritas
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	
Kulon Progo					4
Bantul					3
Gunungkidul					5
Sleman					1
Kota Yogyakarta					2

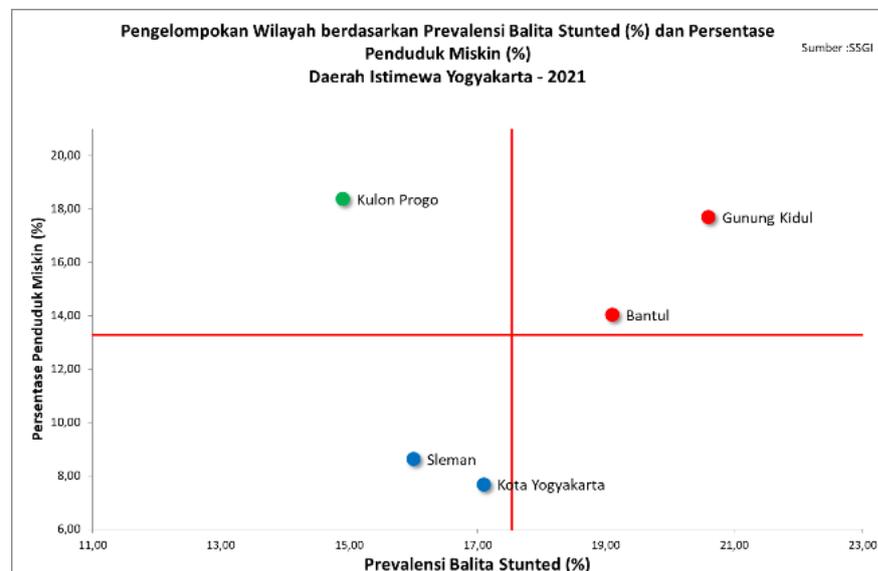
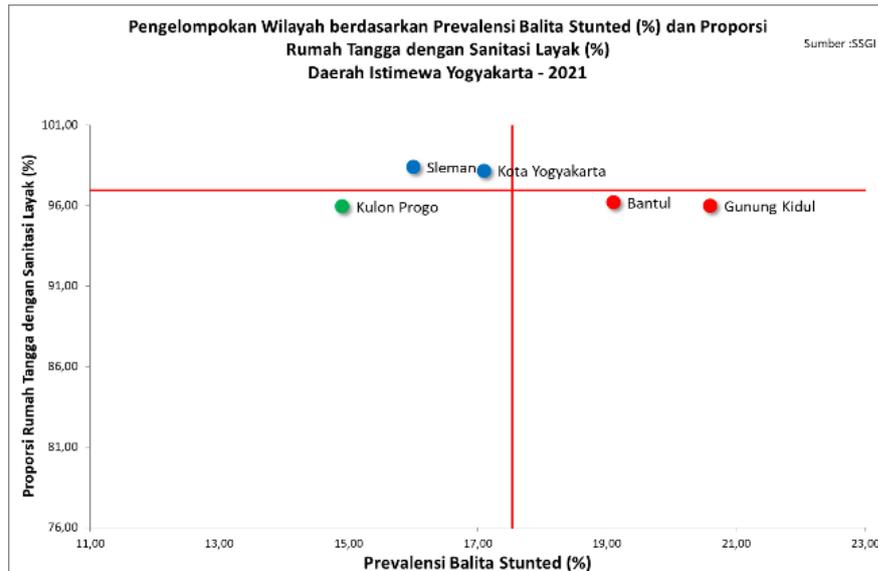
Keterangan: merah= prioritas 1; kuning=prioritas 2; hijau= prioritas 3; dan biru=prioritas 4

Berdasarkan analisa perbandingan ketiga indikator bidang ketenagakerjaan (utama dan pendukung) tersebut, maka skala prioritas kabupaten/kota yang dilakukan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan khususnya bidang ketenagakerjaan di DIY secara berurutan yaitu Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, kemudian Gunungkidul.

5.1.3. Bidang Kesehatan

Penentuan lokasi prioritas program berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penentuan prioritas wilayah bidang kesehatan di DIY disajikan pada gambar sebagai berikut.



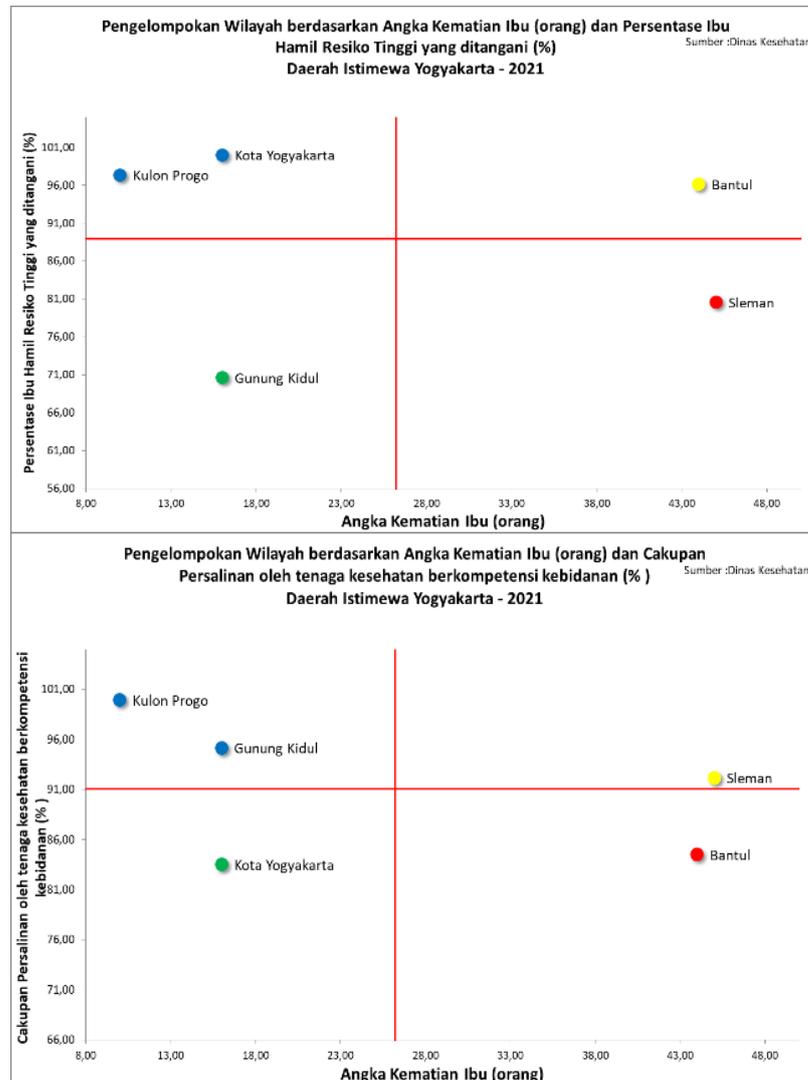


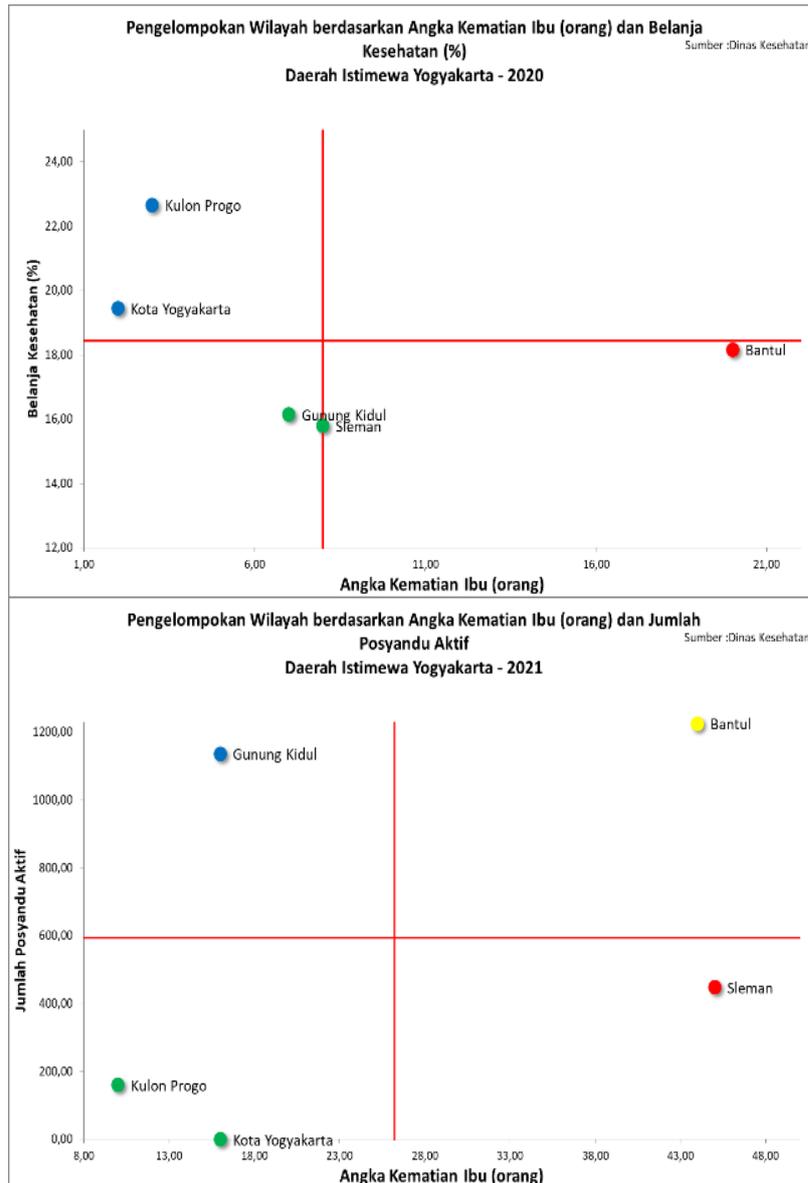
Gambar tersebut menunjukkan bahwa indikator persentase Prevalensi Balita Stunted (indikator utama) apabila disandingkan dengan indikator pendukung berupa indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak, Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, dan Persentase Penduduk Miskin maka dihasilkan beberapa kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk diintervensi pada program penanggulangan kemiskinan khususnya bidang kesehatan. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak yaitu Kabupaten Gunungkidul. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak yaitu Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Persentase Penduduk Miskin berupa Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.

Kabupaten/Kota	Indikator Utama (% Prevalensi Balita Stunted)	Indikator Pendukung			Prioritas
		Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)	Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)	
Kulon Progo					3
Bantul					2
Gunungkidul					1
Sleman					4
Kota Yogyakarta					5

Keterangan: merah= prioritas 1; kuning=prioritas 2; hijau= prioritas 3; dan biru=prioritas 4

Berdasarkan analisa perbandingan ketiga indikator bidang kesehatan (utama dan pendukung) tersebut, maka skala prioritas kabupaten/kota yang dilakukan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan khususnya bidang kesehatan di DIY dengan indikator utama berupa Prevalensi Balita Stunted secara berurutan yaitu Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman, kemudian Kota Yogyakarta.





Gambar tersebut menunjukkan bahwa indikator persentase Angka Kematian Ibu (indikator utama) apabila disandingkan dengan indikator pendukung berupa Prevalensi Ibu Hamil Risiko Tinggi yang Ditangani, Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Berkompetensi Kebidanan, Belanja Kesehatan, dan Jumlah Posyandu Aktif maka dihasilkan beberapa kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk diintervensi pada program penanggulangan kemiskinan khususnya bidang kesehatan. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Prevalensi Ibu Hamil Risiko Tinggi yang Ditangani yaitu Kabupaten Sleman. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Berkompetensi Kebidanan yaitu Kabupaten Bantul. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Belanja Kesehatan yaitu Kabupaten Bantul. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Jumlah Posyandu Aktif yaitu Kabupaten Sleman.

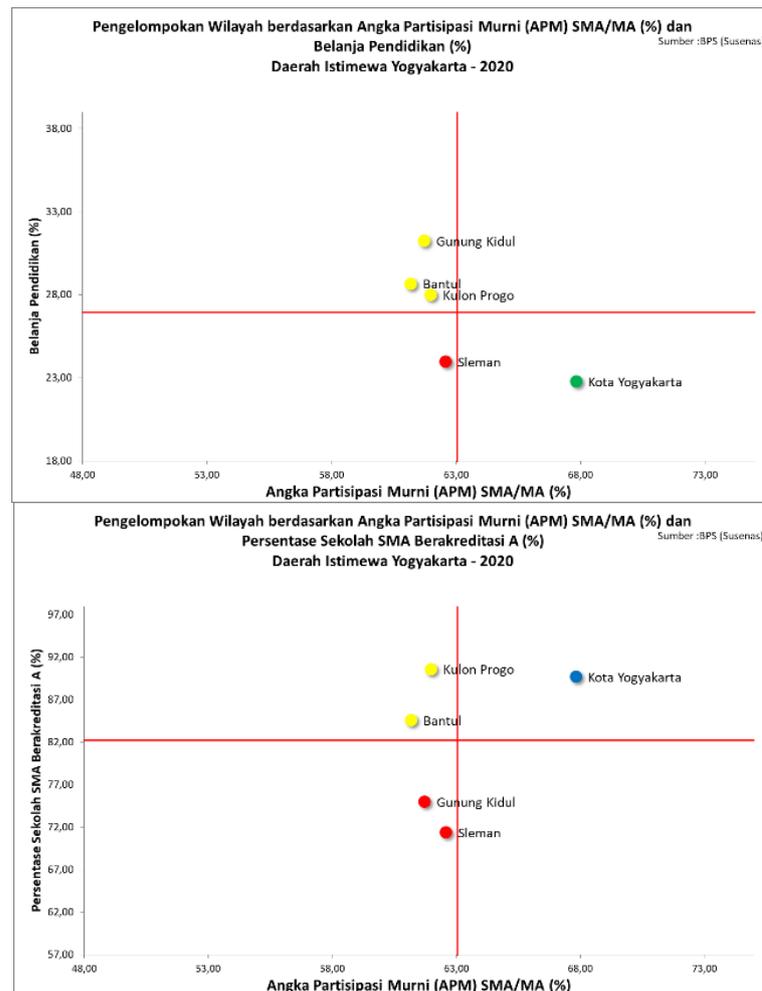
Kabupaten/Kota	Indikator Utama (Angka Kematian Ibu)	Indikator Pendukung				Prioritas
		Prevalensi Ibu Hamil Risiko Tinggi yang Ditangani (%)	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Berkompetensi Kebidanan	Belanja Kesehatan (%)	Jumlah Posyandu Aktif	
Kulon Progo						5
Bantul						1
Gunungkidul						3
Sleman						2
Kota Yogyakarta						4

Keterangan: merah= prioritas 1; kuning=prioritas 2; hijau= prioritas 3; dan biru=prioritas 4

Berdasarkan analisa perbandingan keempat indikator bidang kesehatan (utama dan pendukung) tersebut, maka skala prioritas kabupaten/kota yang dilakukan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan khususnya bidang kesehatan di DIY dengan indikator utama berupa Angka Kematian Ibu secara berurutan yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kota Yogyakarta, kemudian Kabupaten Kulon Progo.

5.1.4. Bidang Pendidikan

Penentuan lokasi prioritas program berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penentuan prioritas wilayah bidang pendidikan di DIY disajikan pada gambar sebagai berikut.



Gambar tersebut menunjukkan bahwa indikator persentase Angka Partisipasi Murni (indikator utama) apabila disandingkan dengan indikator pendukung berupa Belanja Pendidikan dan Persentase Sekolah SMA Berakreditasi maka dihasilkan beberapa kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk diintervensi pada program penanggulangan kemiskinan khususnya bidang pendidikan. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Belanja Pendidikan yaitu Kabupaten Sleman. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Persentase Sekolah SMA Berakreditasi yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Sleman.

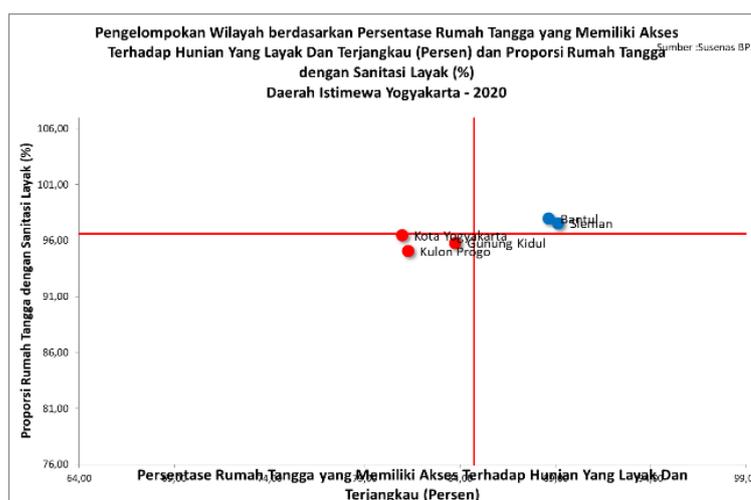
Kabupaten/Kota	Indikator Utama (% Angka Partisipasi Murni SMA/MA)	Indikator Pendukung			Prioritas
		Belanja Pendidikan (%)	Persentase Sekolah SMA Berakreditasi (%)		
Kulon Progo					3
Bantul					4
Gunungkidul					2
Sleman					1
Kota Yogyakarta					5

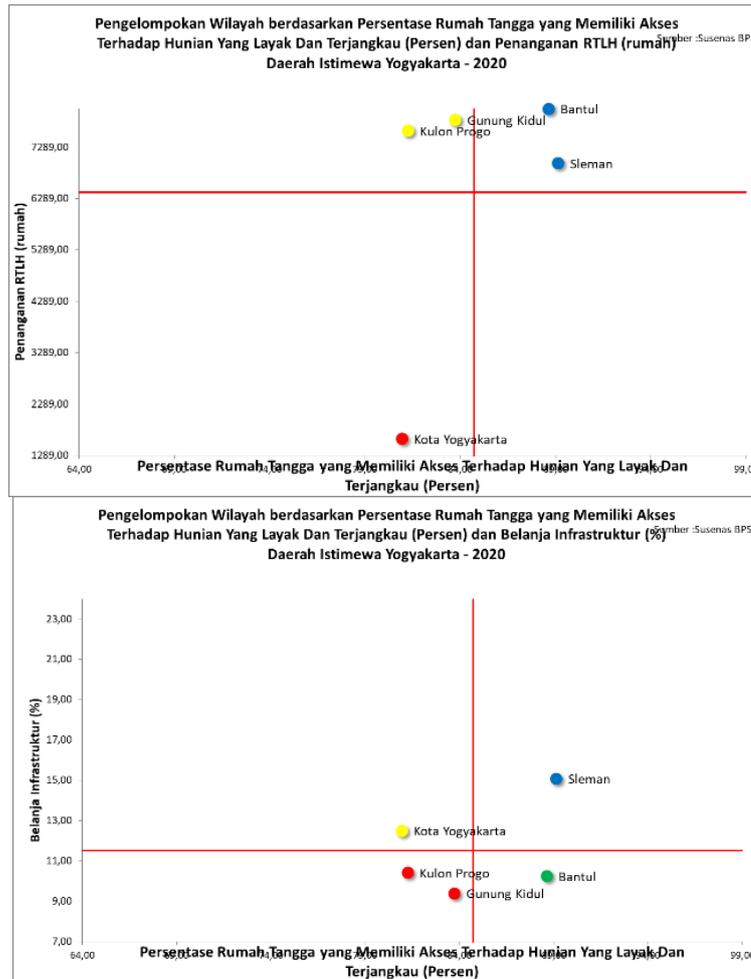
Keterangan: merah= prioritas 1; kuning=prioritas 2; hijau= prioritas 3; dan biru=prioritas 4

Berdasarkan analisa perbandingan kedua indikator bidang pendidikan (utama dan pendukung) tersebut, maka skala prioritas kabupaten/kota yang dilakukan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan khususnya bidang pendidikan di DIY secara berurutan yaitu Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul, kemudian Kota Yogyakarta.

5.1.5. Bidang Infrastruktur

Penentuan lokasi prioritas program berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penentuan prioritas wilayah bidang infrastruktur di DIY disajikan pada gambar sebagai berikut.





Gambar tersebut menunjukkan bahwa indikator persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau (indikator utama) apabila disandingkan dengan indikator pendukung berupa Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, Penanganan RTLH, dan Belanja Insfrastruktur, maka dihasilkan beberapa kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk diintervensi pada program penanggulangan kemiskinan khususnya bidang infrastruktur. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak yaitu Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Penanganan RTLH yaitu Kota Yogyakarta. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Belanja Insfrastruktur yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul.

Kabupaten/Kota	Indikator Utama (% Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau)	Indikator Pendukung			Prioritas
		Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)	Penanganan RTLH (rumah)	Belanja Insfrastruktur (%)	

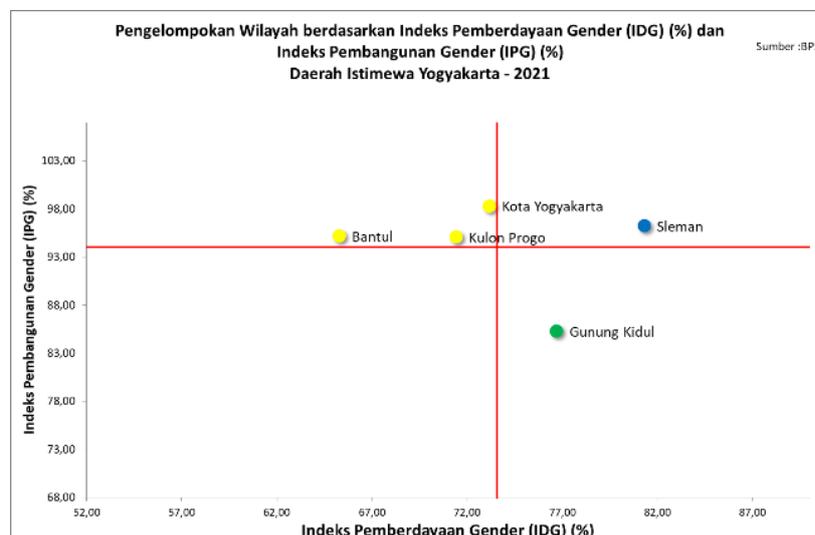
Kabupaten/Kota	Indikator Utama (% Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau)	Indikator Pendukung			Prioritas
		Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)	Penanganan RTLH (rumah)	Belanja Insfrastruktur (%)	
Kulon Progo					1
Bantul					4
Gunungkidul					2
Sleman					5
Kota Yogyakarta					3

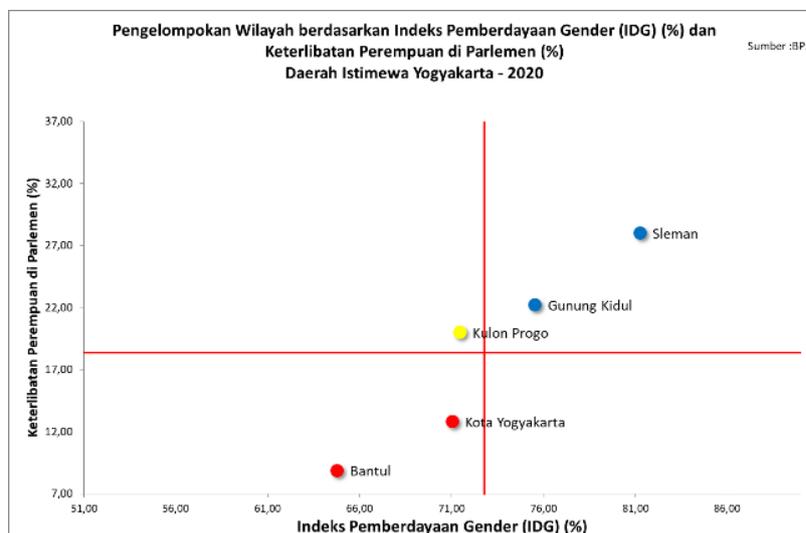
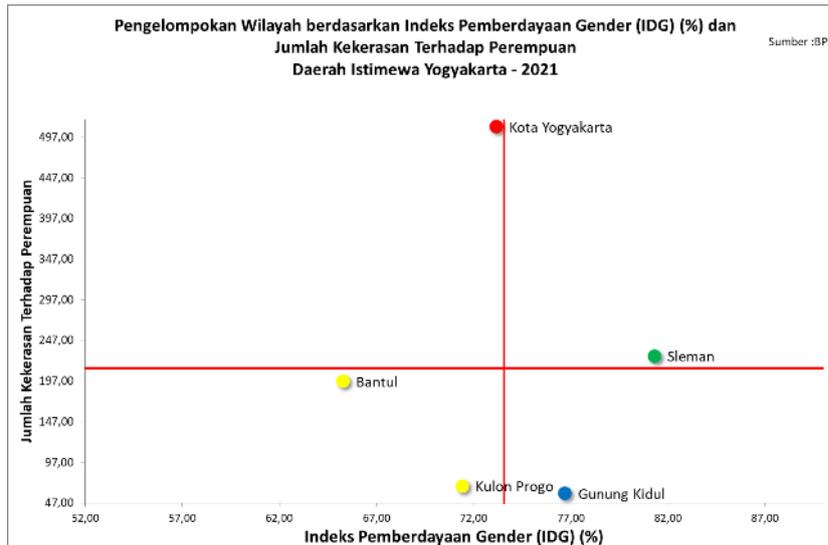
Keterangan: merah= prioritas 1; kuning=prioritas 2; hijau= prioritas 3; dan biru=prioritas 4

Berdasarkan analisa perbandingan kedua indikator bidang infrastruktur (utama dan pendukung) tersebut, maka skala prioritas kabupaten/kota yang dilakukan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan khususnya bidang infrastrktur di DIY secara berurutan yaitu Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, Kota Yogyakarta, Bantul, kemudian Sleman.

5.1.6. Bidang Kesetaraan Gender

Penentuan lokasi prioritas program berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penentuan prioritas wilayah bidang kesetaraan gender di DIY disajikan pada gambar sebagai berikut.





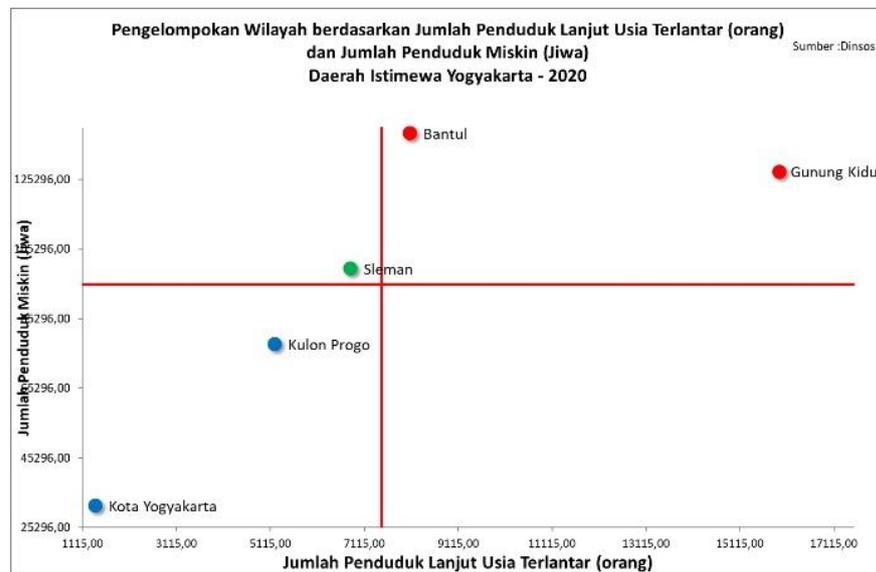
Gambar tersebut menunjukkan bahwa indikator Indeks Pemberdayaan Gender (indikator utama) apabila disandingkan dengan indikator pendukung berupa Indeks Pembangunan Gender, Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen, maka dihasilkan beberapa kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk diintervensi pada program penanggulangan kemiskinan khususnya bidang kesetaraan gender. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan yaitu Kota Yogyakarta. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Keterlibatan Perempuan di Parlemen yaitu Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, sedangkan pada indikator pendukung berupa Indeks Pembangunan Gender tidak ada lokasi prioritas 1.

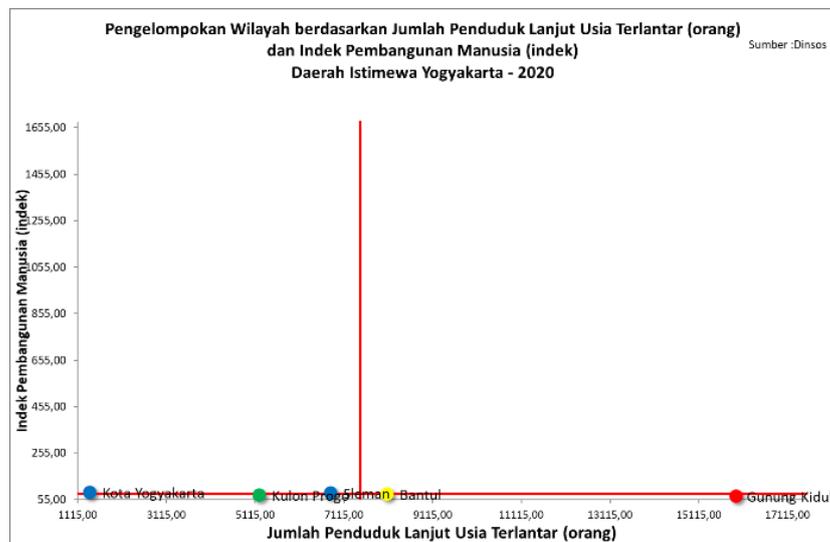
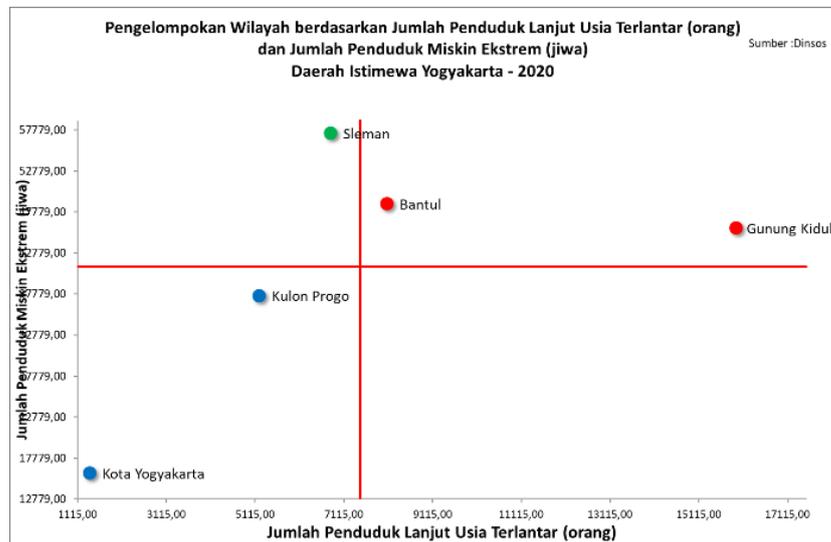
Kabupaten/Kota	Indikator Utama (% Indeks Pembedayaan Gender)	Indikator Pendukung			Prioritas
		Indeks Pembangunan Gender (%)	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	
Kulon Progo					3
Bantul					2
Gunungkidul					4
Sleman					5
Kota Yogyakarta					1

Keterangan: merah= prioritas 1; kuning=prioritas 2; hijau= prioritas 3; dan biru=prioritas 4

Berdasarkan analisa perbandingan ketiga indikator bidang kesetaraan gender (utama dan pendukung) tersebut, maka skala prioritas kabupaten/kota yang dilakukan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan khususnya bidang kesetaraan gender di DIY secara berurutan yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, kemudian Sleman.

5.1.7. Bidang Kesejahteraan Sosial

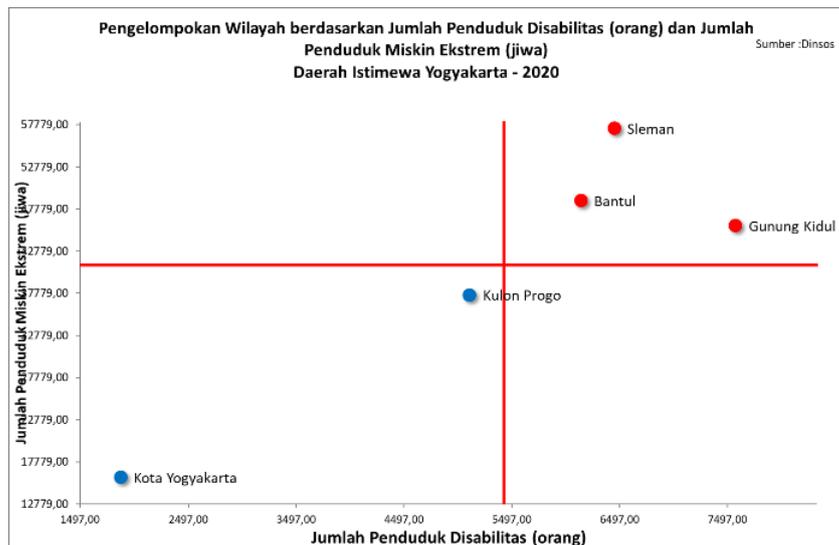
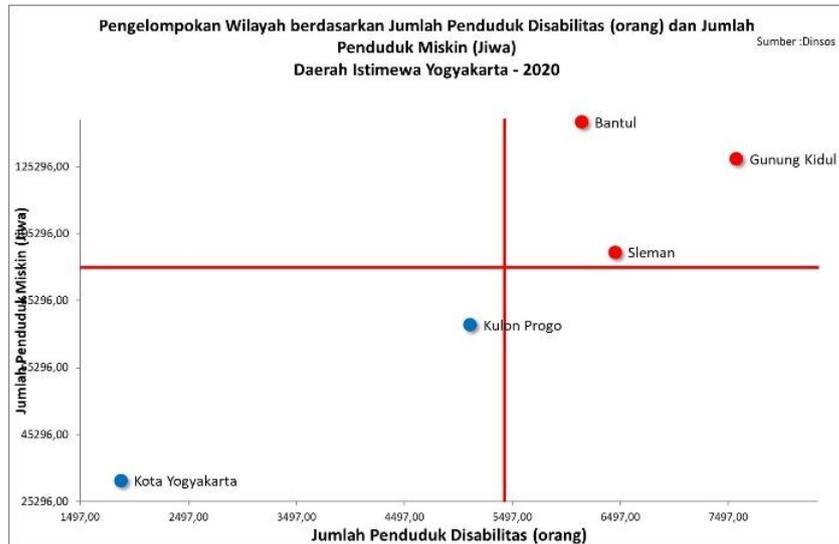


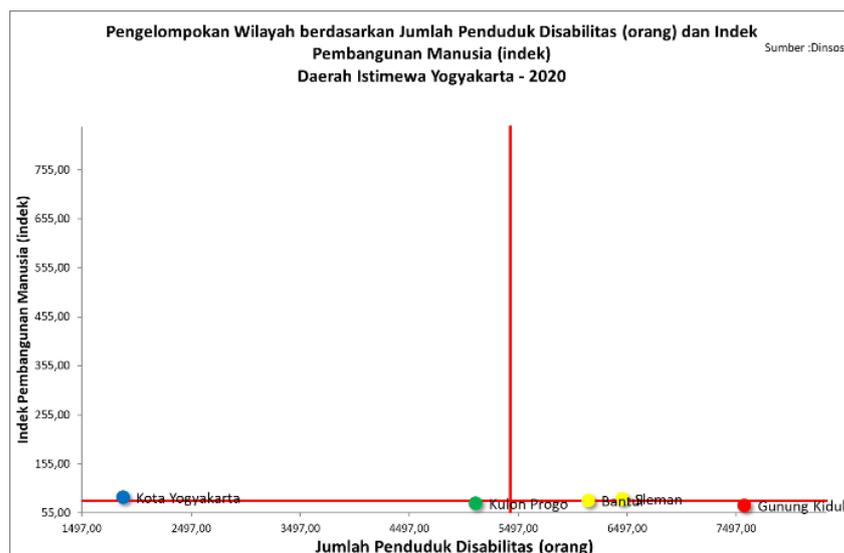


Gambar tersebut menunjukkan bahwa indikator persentase Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar (indikator utama) apabila disandingkan dengan indikator pendukung berupa Jumlah Penduduk Miskin (orang), Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (orang), dan Indeks Pembangunan Manusia (%) maka dihasilkan beberapa kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk diintervensi pada program penanggulangan kemiskinan khususnya bidang kesejahteraan sosial. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Jumlah Penduduk Miskin yaitu Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem yaitu Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Indeks Pembangunan Manusia yaitu Kabupaten Gunungkidul.

Kabupaten/Kota	Indikator Utama Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar (orang)	Indikator Pendukung			Prioritas
		Jumlah Penduduk Miskin (orang)	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (orang)	Indeks Pembangunan Manusia (%)	
Kulon Progo		Blue	Blue	Green	4
Bantul		Red	Red	Yellow	2
Gunungkidul		Red	Red	Red	1
Sleman		Green	Green	Blue	3
Kota Yogyakarta		Blue	Blue	Blue	5

Berdasarkan analisa perbandingan ketiga indikator bidang kesejahteraan sosial (utama dan pendukung) tersebut, maka skala prioritas kabupaten/kota yang dilakukan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan khususnya bidang kesejahteraan sosial di DIY dengan indikator utama berupa Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar secara berurutan yaitu Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo, kemudian Kota Yogyakarta.





Gambar tersebut menunjukkan bahwa indikator persentase Jumlah Penduduk Disabilitas (indikator utama) apabila disandingkan dengan indikator pendukung berupa Jumlah Penduduk Miskin (orang), Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (orang), dan Indeks Pembangunan Manusia (%) maka dihasilkan beberapa kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk diintervensi pada program penanggulangan kemiskinan khususnya bidang kesejahteraan sosial. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Jumlah Penduduk Miskin yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunungkidul. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunungkidul. Lokasi prioritas 1 pada indikator pendukung berupa Indeks Pembangunan Manusia yaitu Kabupaten Gunungkidul.

Kabupaten/Kota	Indikator Utama Jumlah Penduduk Disabilitas (orang)	Indikator Pendukung			Prioritas
		Jumlah Penduduk Miskin (orang)	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (orang)	Indeks Pembangunan Manusia (%)	
Kulon Progo					4
Bantul					2
Gunungkidul					1
Sleman					3
Kota Yogyakarta					5

Berdasarkan analisa perbandingan ketiga indikator bidang kesejahteraan sosial (utama dan pendukung) tersebut, maka skala prioritas kabupaten/kota yang dilakukan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan khususnya bidang kesejahteraan sosial di DIY dengan indikator utama berupa Jumlah Penduduk Disabilitas secara berurutan yaitu Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo, kemudian Kota Yogyakarta.

5.2. Lokus 15 Kapanewon Penanggulangan Kemiskinan di DIY

Dalam rangka perencanaan pembangunan terutama penanggulangan kemiskinan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin yang bersinergi dan berkolaborasi lintas sektor, telah ditetapkan 15 lokus kapanewon penanggulangan kemiskinan di DIY melalui Surat Edaran Wakil Gubernur DIY Nomor 401/0161 tanggal 5 Januari 2022 tentang Penyampaian 15 Lokus Kapanewon Penanggulangan Kemiskinan. Sebagai daerah yang mempunyai frase Keistimewaan, maka kolaborasi antara Kampung, Kampus, Kantor dan Kraton yang di dukung oleh Korporasi akan bisa mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD tahun 2022– 2027. Berkaitan dengan penyelarasan program kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut, kami mengharapkan OPD DIY dan Kabupaten/Kota serta lembaga lainnya untuk menjadikan salah satu pertimbangan dalam menyusun perencanaan program kegiatan terutama penanggulangan kemiskinan.

Penentuan lokus 15 kapanewon penanggulangan kemiskinan di DIY ini dalam rangka untuk dapat memperoleh gambaran ketimpangan dan kemiskinan di DIY khususnya untuk mendapatkan gambaran prioritas pembangunan, melalui kajian Tim Sebermas tahun 2017 dan disampaikan dalam forum penanggulangan kemiskinan TKPKD Pemda DIY selama tahun 2018-2020 telah ditentukan 15 kecamatan (kapanewon) prioritas Penanggulangan Kemiskinan. Sampai saat ini, Belum pernah dilakukan Monitoring dan Evaluasi berkaitan dengan capaian penanggulangan kemiskinan di 15 kapanewon prioritas Penanggulangan Kemiskinan untuk bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Aktivitas monitoring dan evaluasi terhadap hasil pencapaian dan strategi Penanggulangan Kemiskinan pada 15 kapanewon Prioritas disertai perhitungan terhadap seluruh kapanewon lain di DIY untuk ke depan diambil langkah kebijakan dan strategi selanjutnya ini dilakukan Pada triwulan I (Januari-Maret) tahun 2022. Aktivitas tersebut meliputi :

- a. Melakukan analisis kuantitatif dengan data sekunder dari rilis resmi, terhadap kondisi kemiskinan di seluruh kecamatan (kapanewon) di DIY.
- b. Indikator dan metode yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi 15 kecamatan (kapanewon) prioritas Penanggulangan Kemiskinan telah konsisten menggunakan indikator dan metode yang sama dengan simulasi penentuan 15 kecamatan (kapanewon) prioritas terdahulu. Namun ada 1 indikator yang berubah yaitu IPD (Indeks Pembangunan Desa) diubah menjadi IDM (Indeks Desa Membangun) dikarenakan data IPD tersedia terakhir update tahun 2014.
- c. Indikator penilaian tersebut adalah :

1. Jumlah masyarakat miskin yang berada pada Status Kesejahteraan 1 dan 2 dari data DTKS Tahun 2020,
2. IPM (Indeks Pembangunan Masyarakat) Tahun 2018,
3. IDM (Indeks Desa Membangun) Tahun 2020,
4. Desa Rawan Pangan Tahun 2020,
5. RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dengan mengambil komponen jumlah Rumah Tangga dengan atap tidak layak, Jumlah Rumah Tangga dengan dinding tidak layak, Jumlah Rumah Tangga dengan lantai tidak layak,
6. Jumlah Rumah Tangga sanitasi tidak layak dengan klasifikasi tidak ada fasilitas BAB,
7. Jumlah Rumah Tangga listrik yang tidak mempunyai akses listrik, dan
8. Jumlah Rumah Tangga akses air tidak layak dengan kriteria sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air sungai/danau/waduk, air hujan, dan lainnya dari data DTKS Tahun 2020.

Untuk memberikan gambaran prioritas sasaran, berdasarkan data-data yang telah ada, maka dihitung agregat dari seluruh nilai melalui klasifikasi dan pembobotan. Klasifikasi menggunakan formula yang sangat umum digunakan selama ini, yaitu formula Sturgess:

$$K = 1 + 3,3 \text{ Log } N$$

K = jumlah kelas
N = banyaknya data

Dalam perhitungan kita yang berdasarkan prioritas sasaran pada level kecamatan maka dengan jumlah kecamatan di DIY sebesar 78 diperoleh klasifikasi sebanyak 7 kelas. Masing-masing kondisi elemen di kecamatan dengan nilai 7 untuk yang paling prioritas sampai pada nilai 1 sebagai nilai yang paling tidak prioritas penanganannya dan begitu juga sebaliknya. Untuk prioritasasi perlu pembobotan pada elemen-elemen sesuai dengan proporsionalitas. Dalam hal ini bobot dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

Tabel beberapa indikator untuk penentuan lokus Kapanewon di DIY

No	Kriteria	Bobot
1.	Status Kesejahteraan 1 dan 2	10
2.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)	10
3.	Rata-Rata Indeks Desa Membangun (IDM)	10
4.	Desa Rawan Pangan	7
5.	RTLH – Atap	1
6.	RTLH – Lantai	3
7.	RTLH - Dinding	4
8.	Sanitasi	4

No	Kriteria	Bobot
9.	Sumber Air	8
10.	Akses Listrik	5

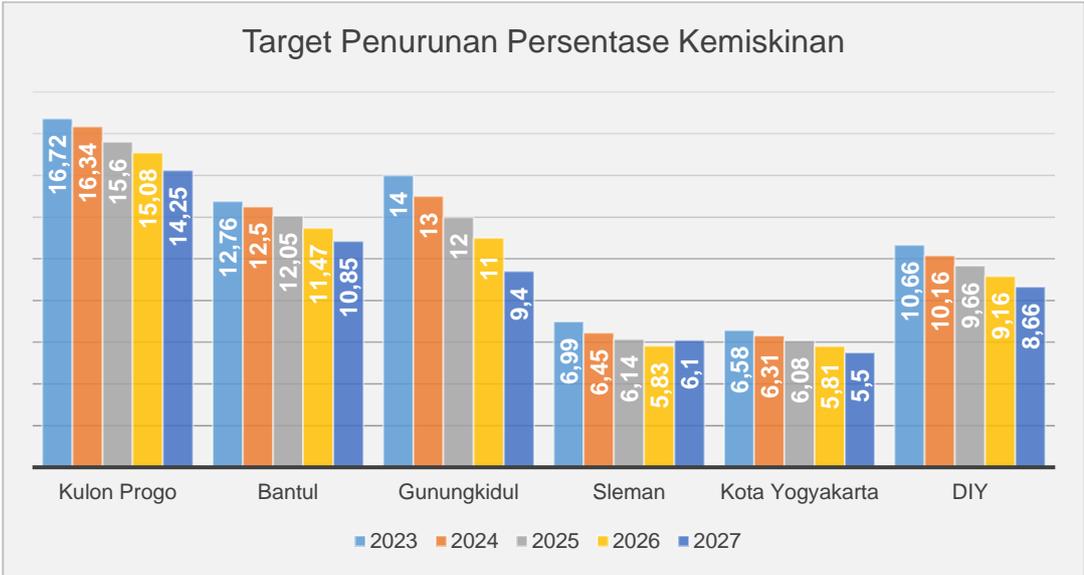


5.3. Rekomendasi (pesisir, diambil dr permasalahan dan)

5.4. Target Penurunan Persentase Kemiskinan

Kabupaten/Kota	2023	2024	2025	2026	2027
Kulon Progo	16,72	16,34	15,6	15,08	14,25
Bantul	12,76	12,50	12,05	11,47	10,85
Gunungkidul	14	13	12	11	9,4
Sleman	6,99	6,45	6,14	5,83	6,10
Kota Yogyakarta	6,58	6,31	6,08	5,81	5,50
DIY	10,66	10,16	9,66	9,16	8,66

Sumber : RPJMD Tahun 2022-2027



BAB VI

PENUTUP

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) DIY Tahun 2023-2027 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Atas program yang menjadi kewenangan daerah dalam dokumen penanggulangan kemiskinan daerah ini, ditentukan indikator program yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Untuk selanjutnya disusun target (target kinerja dan target pagu anggaran) tahun 2023-2027, yang disesuaikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, dimana tahun 2022 merupakan *baseline* penyusunan dokumen ini. Selengkapnya matriks prioritas program penanggulangan kemiskinan DIY Tahun 2022-2027 disebutkan dalam tabel berikut :

6.1. Matriks Prioritas Bidang Ketenagakerjaan :

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-1 (2024)		Tahun ke-2 (2025)		Tahun ke-3 (2026)		Tahun ke-4 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
NON URUSAN																
NON BIDANG																
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				13,664,711,450		23,736,943,000		23,960,839,000		24,086,802,000		24,314,915,000		109,764,210,450	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	97 %	n/a		80%		80%		80%		80%		80%			
	Persentase peserta pelatihan yang terampil	91 %	n/a		95%		96%		96%		97%		97%			
	Persentase peserta magang yang ditempatkan	70%	n/a		60%		60%		60%		60%		60%			
	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi	100%	n/a		100%		100%		100%		100%		100%			
	Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar	90%	n/a		90%		90%		90%		90%		90%			
	Jumlah tenaga kerja yang kompeten	1.350 orang	1.415 orang		n/a											
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				203,000,800		1,191,249,000		1,314,380,000		1,435,466,000		1,582,919,000		5,727,014,800	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik	35%	n/a		45%		50%		55%		60%		60%			

	Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi	n/a	n/a		90%		90%		90%		90%		90%		
	Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	92,5%	n/a		90%		90%		90%		90%		90%		
	jumlah perluasan kesempatan kerja yang diciptakan	6.100 orang	6.380 orang		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				2,503,335,000		4,253,000,000		4,253,000,000		4,253,000,000		4,253,000,000		19,515,335,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n)	519 orang	n/a		550 orang		550 orang		550 orang		550 orang		2.200 orang		
	Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi	24386	n/a		24630		24754		24877		25002		25002		
	Jumlah Wirausaha Pemula (kumulatif)	1.295 orang	1.643 orang		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				716,560,500		600,000,000		650,000,000		700,000,000		720,000,000		3,386,560,500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Jumlah Kepeminatan Investasi	n/a	n/a		13 Kepeminatan		14 Kepeminatan		15 Kepeminatan		16 Kepeminatan		16 Kepeminatan		
	Nilai Rencana Investasi (Rp Trilyun)	Rp 1,24 Trilyun	Rp 1,30 Trilyun		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				148,924,977,600		200,297,784,400		70,208,657,680		77,229,523,448		84,952,475,793		581,613,418,921	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas.	2078 KUMKM	2178 KUMKM		2278 KUMKM		2378 KUMKM		2478 KUMKM		2578 KUMKM		2578 KUMKM		
	Jumlah desa preneur	51	61		71		81		91		101		101		

	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,61	82,68		83,48		85,26		86,74		88,32		88,32		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				8,124,885,500		10,100,000,000		10,100,000,000		10,100,000,000		10,200,000,000		48,624,885,500	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Produksi perikanan budidaya (ton)	97460	97446		97468		97813		98136		98200		98200		
	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	34,42	90		34,82		35,02		35,22		35,42		35,42		
	produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)	N/A	N/A		9		9		9		9		9		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				25,497,393,450		26,727,290,000		26,780,000,000		26,860,000,000		26,930,000,000		132,794,683,450	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%)	98,5	N/A		98,5		98,5		98,5		98,5		98,5		
	Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)	2,32%	N/A		2,35%		2,36%		2,37%		2,38%		2,38%		
	Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	93,5%	N/A		93,5%		93,5%		93,5%		93,5%		93,5%		
	Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%)	N/A	N/A		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	91 %		N/A		N/A		N/A		N/A		91 %		

	Indeks ketersediaan sarana pertanian yang kondisinya baik (-)	N/A	98,5 %		N/A		N/A		N/A		N/A		98,5 %		
	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	100 %		N/A		N/A		N/A		N/A		100 %		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				9,742,934,750		3,550,000,000		3,600,000,000		3,650,000,000		3,700,000,000		24,242,934,750	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	387.210 Orang	412.630 Orang		413.500 Orang		414.000Orang		414.500 Orang		415.000Orang		415.000 Orang		
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG	79,08 %	n/a		84,00 %		86,50 %		89,00 %		89,50 %		89,50 %		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				104,483,400		120,000,000		140,000,000		160,000,000		180,000,000		704,483,400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	410 perusahaan	365 perusahaan		600 perusahaan		700 perusahaan		800 perusahaan		900 Perusahaan		900 Perusahaan		

6.2. Matriks Prioritas Bidang Kesehatan :

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-1 (2024)		Tahun ke-2 (2025)		Tahun ke-3 (2026)		Tahun ke-4 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
NON URUSAN															
NON BIDANG															
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				214,742,253,288		190,160,621,686		109,402,523,044		374,720,045,646		324,995,253,119		1,214,020,696,783	Dinas Kesehatan
	Persentase fasyankes terakreditasi	51.6	52.84		54.32		57.04		62.22		67.41		67.41		
	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	83	84		85		86		87		88		88		
	Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)	59	60		62		63		64		65		65		
	Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur	45	76		77		78		79		80		80		
	Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur	45	76		77		78		79		80		80		
	Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara	13	14		15		16		17		18		18		
	Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas	18	25		30		35		40		50		50		

	Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar	70	71		72		73		74		75		75		
	Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)	6.5	6.5		6.4		6.3		6.2		6.1		6.1		
	Persentase remaja putri anemia	22.9	22.2		21.5		20.8		20.1		19.3		19.3		
	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta	100	100		100		100		100		100		100		
	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM	n/a	93.1%		n/a		n/a		n/a		n/a		93.1%		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				5,541,600,000		33,305,000,000		58,471,399,424		34,015,049,408		52,211,239,398		183,544,288,230	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
	Persentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional	20.98%	21.94%		22.42%		22.90%		23.37%		23.85%		23.85%		
	Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	24.04%	14.78%		N/A		N/A		N/A		N/A		14.78%		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				12,753,199,250		12,115,402,995		54,601,443,294		77,863,587,624		83,905,746,386		241,239,379,549	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional	35.11%	35.39%		36.05%		36.71%		37.38%		38.05%		38.05%		
	Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional	34.72%	35.39%		N/A		N/A		N/A		N/A		35.39%		
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				18,355,000,000		41,380,000,000		26,600,000,000		27,200,000,000		26,600,000,000		140,135,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

	Cakupan penanganan kawasan kumuh	N/A	N/A		N/A		5 Hektar		10 Hektar		15 Hektar		15 Hektar		
	Persentase Penanganan RTLH	N/A	1.39%		3.15%		4.9%		6.66%		8.41%		8.41%		
	Persentase penanganan kawasan kumuh	0%	25%		N/A		N/A		N/A		N/A		25%		
	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	53.78%	58.27%		N/A		N/A		N/A		N/A		58.27%		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1,718,308,200		5,570,652,100		20,072,843,040		21,959,969,074		21,959,969,074		71,281,741,488	Dinas Sosial
	Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	6113 Orang	3.53%		3.55%		3.67%		3.68%		3.68%		3.68%		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				3,750,000		1,108,180,000		1,253,000,000		1,375,297,000		1,500,327,000		5,240,554,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik	1 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				1,045,465,000		734,107,000		675,000,000		676,000,000		677,020,000		3,807,592,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	3.732 kkal/kap/hari	3.735 kkal/kap/hari		3.734 kkal/kap/hari		3.734 kkal/kap/hari		3.734 kkal/kap/hari		3.734 kkal/kap/hari		3.734 kkal/kap/hari		
	Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	2.147 kkal/kap/hari	2.145 kkal/kap/hari		2.143 kkal/kap/hari		2.141 kkal/kap/hari		2.139 kkal/kap/hari		2.137 kkal/kap/hari		2.137 kkal/kap/hari		

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				1,500,000		575,000,000		652,500,000		372,750,000		816,025,000		2,417,775,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)	75,98%	75,98%		76%		76,5%		77%		77,5%		77,5%		
	CWR (Child Women Rate)	236	250		n/a		n/a		n/a		n/a		250		
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				6,452,668,400		7,075,000,000		6,875,000,000		6,895,000,000		6,895,000,000		34,192,668,400	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun)	34,74	32,70		34,80		34,87		34,93		35,00		35,00		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				22,534,364,900		2,380,000,000		2,375,000,000		2,375,000,000		2,375,000,000		32,039,364,900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%)	N/A	N/A		10%		10%		10%		10%		10%		
	Indeks prasarana pertanian yang dibangun	N/A	0,018		N/A		N/A		N/A		N/A		0,018		

6.3. Matriks Prioritas Bidang Pendidikan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-1 (2024)		Tahun ke-2 (2025)		Tahun ke-3 (2026)		Tahun ke-4 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
NON URUSAN																
NON BIDANG																
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				600,238,392,120		705,554,851,548		809,956,231,306		931,291,089,417		1,070,825,318,579		4,117,865,882,970		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	98,49 %	99 %		99,5 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB	86,00 %	86,05 %		86,10 %		86,15 %		86,20 %		86,25 %		86,25 %			
	Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77,37 %	77,42 %		77,47 %		77,52 %		77,57 %		77,62 %		77,62 %			
	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	76,90 %	78,00 %		80 %		80,5 %		81 %		81,5 %		81,5 %			
	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	58,57 %	58,59 %		58,60 %		58,62 %		58,63 %		58,65 %		58,65 %			
	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	49,41 %	49,43 %		49,44 %		49,46 %		49,47 %		49,49 %		49,49 %			
	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	46,94 %	46,95 %		46,97 %		46,98 %		47,00 %		47,01 %		47,01 %			
	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41,43 %	41,44 %		41,46 %		41,47 %		41,49 %		41,50 %		41,50 %			

	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	46.79 %	46.80%		46.82 %		46.83 %		46.85 %		46.86 %		46.86%		
	Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik	0 orang	30 orang		35 orang		40 orang		45 orang		50 orang		50 orang		
	Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	40%	45%		50%		55%		60%		65%		65%		
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,23%	0,22%		0,20%		0,19%		0,17%		0,16%		0,16%		
	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.26		n/a		n/a		n/a		n/a		2.26		
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.11		n/a		n/a		n/a		n/a		2.11		
	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.1		n/a		n/a		n/a		n/a		2.1		
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.93		n/a		n/a		n/a		n/a		1.93		
	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.1		n/a		n/a		n/a		n/a		2.1		
	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.92		n/a		n/a		n/a		n/a		1.92		
	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.83		n/a		n/a		n/a		n/a		1.83		
	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.27		n/a		n/a		n/a		n/a		1.92		
	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.1		n/a		n/a		n/a		n/a		2.1		
	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.92		n/a		n/a		n/a		n/a		1.92		

	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.83		n/a		n/a		n/a		n/a		1.83		
	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.27		n/a		n/a		n/a		n/a		2.27		
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.03		n/a		n/a		n/a		n/a		2.03		
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.9		n/a		n/a		n/a		n/a		1.9		
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	n/a	52%		n/a		n/a		n/a		n/a		52%		
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				248,990,200		461,375,000		530,581,250		610,168,438		701,693,703		2,552,808,591	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten	95.85 %	95.97%		96.09 %		96.21 %		96.33 %		96.45 %		96.45%		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				7,353,057,300		20,031,795,000		23,036,564,250		26,492,048,888		30,465,856,220		107,379,321,658	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
	persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	6.67%	7.50%		8.89%		9.09%		9.23%		9.33%		9.33%		
	Jumlah kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	n/a	3 kelompok		n/a		n/a		n/a		n/a		3 kelompok		
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				31,982,868,900		36,420,000,000		40,062,000,000		44,068,200,000		48,475,020,000		201,008,088,900	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	48.83 %	51,33%		53,83 %		56,33 %		58,83 %		59.00 %		59.00%		
	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori sangat baik	n/a	51,33%		n/a		n/a		n/a		n/a		51,33%		

6.4. Matriks Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
			Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-1 (2024)		Tahun ke-2 (2025)		Tahun ke-3 (2026)		Tahun ke-4 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
NON URUSAN																
NON BIDANG																
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				30,740,688,000		69,913,920,000		69,619,630,000		63,727,520,000		66,952,380,000		300,954,138,000		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari	25377,58 liter/detik	25389,08 liter/detik		25391,58 liter/detik		25395,58 liter/detik		25399,58 liter/detik		25403,58 liter/detik		25403,58 liter/detik			
	Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	0,58 %	8,28 %		21,86 %		40,19 %		49,10 %		58,05 %		58,05 %			
	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	566.01 liter/detik	576.01 liter/detik		N/A		N/A		N/A		N/A		576.01 liter/detik			
	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	10.99%	12.51%		N/A		N/A		N/A		N/A		12.51%			

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				5,541,600,000		33,305,000,000		58,471,399,424		34,015,049,408		52,211,239,398		183,544,288,230	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
	Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional	20.98%	21.94%		22.42%		22.90%		23.37%		23.85%		23.85%		
	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	24.04%	14.78%		N/A		N/A		N/A		N/A		14.78%		
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				93,660,000,000		111,125,000,000		66,050,000,000		13,000,000,000		5,167,000,000		289,002,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
	Presentase terbangunnya sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Piyungan	23,27%	55,08%		60,44%		85,81%		98,63%		100%		100%		
	Kapasitas penampungan pengembangan TPA Regional Piyungan	384.723 M3	541.212 m3		N/A		N/A		N/A		N/A		541.212 m3		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				453,014,300		3,900,000,000		20,600,000,000		10,800,000,000		45,600,000,000		81,353,014,300	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
	Pengurangan luasan genangan	5,44 Ha	5,72 Ha		6,01 Ha		6,29 Ha		6,58 Ha		6,86 Ha		6,86 Ha		
	Pengurangan luasan genangan	3.07 Ha	3.83 Ha		N/A		N/A		N/A		N/A		3.83 Ha		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				74,726,032,350		127,997,148,905		157,978,762,796		165,048,896,175		182,246,607,893		707,997,448,119	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

	Persentase kemandapan jalan	70.18% (SK LAMA)	62.00%		62.10%		62.20%		62.30%		62.40%		62.40%	
	Persentase kemandapan jalan	68.01%	68.61%		N/A		N/A		N/A		N/A		68.61%	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				499,500,000		5,603,500,000		61,402,500,000		60,002,500,000		59,702,500,000	187,210,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	0	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	0%	100%		N/A		N/A		N/A		N/A		100%	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				18,355,000,000		41,380,000,000		26,600,000,000		27,200,000,000		26,600,000,000	140,135,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
	Cakupan penanganan kawasan kumuh	N/A	N/A		N/A		5 Hektar		10 Hektar		15 Hektar		15 Hektar	
	Persentase Penanganan RTLH	N/A	1.39%		3.15%		4.9%		6.66%		8.41%		8.41%	
	Persentase penanganan kawasan kumuh	0%	25%		N/A		N/A		N/A		N/A		25%	
	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	53.78%	58.27%		N/A		N/A		N/A		N/A		58.27%	

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				96,600,000,000		148,080,000,000		55,605,000,000		61,165,000,000		67,282,050,000		428,732,050,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
	Penanganan PSU layak di permukiman	1385 lokasi	249 lokasi		178 lokasi		178 lokasi		178 lokasi		178 lokasi		2346 lokasi		
	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	450 lokasi	160 lokasi		N/A		N/A		N/A		N/A		160 lokasi		
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKA N				427,399,200		3,009,169,500		2,537,896,450		2,698,686,095		2,870,904,705		11,544,055,950	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
	Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrika n	75 izin	90 izin		105 izin		120 izin		135 izin		150 izin		150 izin		
	Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrika n	13907 Rumah Tangga	14023 Rumah Tangga		14623 Rumah Tangga		15223 Rumah Tangga		15823 Rumah Tangga		16423 Rumah Tangga		16423 Rumah Tangga		
	Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrika n yang sesuai ketentuan	28.19%	46,88 %		N/A		N/A		N/A		N/A		46,88 %		
	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	13848 SR	14448 SR		N/A		N/A		N/A		N/A		14448 SR		

6.5. Matriks Prioritas Bidang Kesetaraan Gender

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung jawab		
			Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-1 (2024)		Tahun ke-2 (2025)		Tahun ke-3 (2026)		Tahun ke-4 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
NON URUSAN																
NON BIDANG																
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				736,313,000		3,518,121,180		3,869,935,348		4,257,627,183		4,683,230,150		17,065,226,861	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	38,74%	38,75%		38,8%		38,9%		38,95%		39%		39%			
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				1,085,051,700		2,816,849,200		3,139,524,120		3,473,381,732		3,830,731,500		14,345,538,252	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani	87%	90%		95%		100%		100%		100%		100%			
	Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang dilayani dengan baik	757 orang	meningkat		n/a		n/a		n/a		n/a		meningkat			

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				3,750,000		1,108,180,000		1,253,000,000		1,375,297,000		1,500,327,000		5,240,554,000	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik	1 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				1,500,000		330,000,000		363,000,000		401,375,000		439,230,000		1,535,105,000	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola	2	3		n/a		n/a		n/a		n/a		3		
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				148,924,977,60 0		200,297,784,40 0		70,208,657,68 0		77,229,523,44 8		84,952,475,79 3		581,613,418,92 1	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas.	2078 KUMKM	2178 KUMKM		2278 KUMKM		2378 KUMKM		2478 KUMKM		2578 KUMKM		2578 KUMKM		
	Jumlah desa preneur	51	61		71		81		91		101		101		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,61	82,68		83,48		85,26		86,74		88,32		88,32		

6.6. Matriks Kesejahteraan Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-1 (2024)		Tahun ke-2 (2025)		Tahun ke-3 (2026)		Tahun ke-4 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
NON URUSAN															
NON BIDANG															
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				214,742,253,288		190,160,621,686		109,402,523,044		374,720,045,646		324,995,253,119		1,214,020,696,783	Dinas Kesehatan
	Persentase fasyankes terakreditasi	51.6	52.84		54.32		57.04		62.22		67.41		67.41		
	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	83	84		85		86		87		88		88		
	Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)	59	60		62		63		64		65		65		
	Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur	45	76		77		78		79		80		80		
	Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur	45	76		77		78		79		80		80		

	Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara	13	14		15		16		17		18		18		
	Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas	18	25		30		35		40		50		50		
	Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar	70	71		72		73		74		75		75		
	Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)	6.5	6.5		6.4		6.3		6.2		6.1		6.1		
	Presentase remaja putri anemia	22.9	22.2		21.5		20.8		20.1		19.3		19.3		
	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta	100	100		100		100		100		100		100		
	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM	n/a	93.1%		n/a		n/a		n/a		n/a		93.1%		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				24,379,064,620		29,829,121,400		44,144,876,056		48,501,863,827		48,685,225,284		195,540,151,187	Dinas Sosial

	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	560 orang	22.43%		22.50 %		22.58%		22.70 %		22.70%		22.70 %		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1,718,308,200		5,570,652,100		20,072,843,040		21,959,969,074		21,959,969,074		71,281,741,488	Dinas Sosial
	Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	6113 Orang	3.53%		3.55 %		3.67%		3.68%		3.68%		3.68%		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				3,750,000		1,108,180,000		1,253,000,000		1,375,297,000		1,500,327,000		5,240,554,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik	1 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				3,000,000		574,153,000		631,623,500		694,962,500		764,265,000		2,668,004,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

	Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif	n/a	0.33%		0,37 %		0,40%		0,44%		0,48%		0,48%		
--	---	-----	-------	--	--------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X